



PUTUSAN

Nomor 1770/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Dermawati Turnip**
Tempat Lahir : Lubuk Pakam
Umur/ Tgl Lahir : 50 Tahun / 2 Februari 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Flamboyan Dalam No.8 Medan
Agama : Katolik
Pekerjaan : Direktur CV. Lorin Jayaprima
Pendidikan : D-3

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22-8-2023 s/d 10-9-2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak 5-9-2023 s/d tanggal 4-10-2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5-10-2023 s/d 3-12-2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama : Syahransyah, S.H., M.H., dan Wildan Areza, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja Garu VII No.51 A&B (Gg.Nuri), Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 September 2023 Reg.Nomor 3264/Penk.Perd/2023/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 90 Putusan Pidana Nomor 1770/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1770/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 9 Nopember 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Dermawati Turnip** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan", sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) c Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dermawati Turnip** dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar dua kali pajak terhutang yang tidak disetor yaitu **2 x Rp.6.630.940.036,- (enam milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga puluh enam rupiah) menjadi Rp.13.261.880.072 (tiga belas milyar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh puluh dua rupiah)**, Jika Terdakwa tidak membayar denda, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 90 Putusan Pidana Nomor 1770/Pid.Sus/2023/PN Mdn



A01	Fotokopi Akte Notaris Pauline Sinaga, SH, MKN Nomor 01 tanggal 15 Januari 2003 Tentang Pendirian Perseroan Komanditer C.V. LORIN JAYAPRIMA.
A02	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak 02 sd 09 tahun 2011 dan Masa Pajak 11 sd 12 tahun 20112. Satu set surat tugas No.12569 tanggal 28 April 2015 dilampiri :3. Laporan pelaksanaan visit No.104/WPJ.01/KP.0301/2015 tanggal 12 Juni 2015.4. Surat Tugas No.30073/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 08 Agustus 2017 no. Laporan Visit No.1275/WPJ.01/KP.03010/2017 tanggal 11 September 2017.5. Surat tugas ST-1336/WPJ.01/KP.03/2021 tanggal 30 September 2021 dengan laporan visit LPK-4/WPJ.01/KP.0307/2021 tanggal 04 Oktober 2021.6. S-12570/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Himbaiaun/Klarifikasi untuk melakukan penyetoran dan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 sd 2014.7. S-14414/WPJ.01/KP.0310/2015 tanggal 09 Juni 2015 peihal panggilan konseling8. Und-14451/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 10 Juni 2015 perihal Undangan sosialisasi.9. S-24839/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 21 September 2015 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.10. S-289575/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal Desember 2015 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun pajak 2012.11. S-27697/WPJ.01/KP.03/2017 tangal 31 Juli 2017 perihal Konfirmasi Bukti Potong PPh Pasal 2212. S-27698 tanggal 31 Juli 2017 perihal Konfirmasi Bukti Potong PPh Pasal 22.13. S-2413/WPJ.01/KP.0703/2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal jawaban konfirmasi Bukti potong PPh Pasal 22 a.n CV LORIN JAYAPRIMA.14. S-29948/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 03 Agustus 2017 perihal Permintaan laporan Audit KAP tahun buku 2011.15. S-29949/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 03 Agustus 2017 perihal Permintaan laporan Audit KAP tahun buku 201216. S-28964/WPJ.01/KP.03/2016 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Hibauan memanfaatkan Program Amnesty Pajak17. S-12570/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 28 April 2015 perihal himbauan/Klarifikasi untuk melakukan penyetoran dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 dan 2012.18. S-13726/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal himbauan/Klarifikasi kedua untuk melakukan penyetoran dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 dan 2014.19. SR-28850/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 30 November 2015 perihal permintaan Laporan Audt KAP tahun 2012.20. BA Permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan kepada Wajib Pajak CV LJP melalui telpon.21. LPAD No.PEM:01009688\121\aug\2017 tanggal 14 Aug-17 Surat lain-lain dari Akuntan Publik (KAP) JOACHIM POLTAK LIAN & REKAN berupa laporan Auditor Independen atas lap.Keuangan CV LORIN JAYAPRIMA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011.22. S-29941/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 03 Agustus 2017 perihal Permintaan



	<p>Daftar laporan Jasa Audit KAP</p> <p>23. S-983/PPPK/2017 tanggal 11 Agustus 2017 perihal Jawaban permintaan Daftar laporan Jasa Audit KAP</p> <p>24. Kronologis IDLP CV LORIN JAYAPRIMA.</p> <p>25. SR-2943/WPJ.01/KP.03/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal usulan IDLP</p>
A03	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Januari sd Desember 2011 2. Prin out Laporan SPT Masa Wajib Pajak tahun 2011 3. SPT Masa PPN Nihil Masa Januari 2011 sd Desember 2011 4. Satu Set Laporan kemajuan pemeriksaan Wajib pajak CV LJP No.LAP-027/PL/WPJ.01/KP.0305/2018 tanggal 27 Desember 2018 tahun pajak 2013 5. Satu set surat ketetapan pajak NIHIL PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 6. Satu Set surat tagihan pajak PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 senilai Rp.100.000,- 7. Satu set surat ketetapan pajak NIHIL PPh Pasal 21 Masa Januari sd Desember 2014 8. Satu Set surat tagihan pajak PPh Pasal 21 Masa Januari sd Desember 2014 senilai Rp.1.200.000,- 9. Satu Set Laporan kemajuan pemeriksaan Wajib pajak CV LJP No.LAP-028/PL/WPJ.01/KP.0305/2018 tanggal 27 Desember 2018 tahun pajak 2014 10. Akte pendirian CV LORIN JAYAPRIMA No.01 tanggal 15 Januari 2003 dari Notaris PAULINE SINAGA
A04	<ol style="list-style-type: none"> 1. Installment Schedule agreement no : 0015138/2/02/02/2011 2. Installment Schedule agreement no :0017406/2/02/04/2012 3. Surat kuasa dari Ricard Nikson Pakpahan kepada Rio Leonardo tanggal 11 November 2021 4. Foto kopi KTP a.n DERMAWATI TURNIP 5. Foto Kopi Permohonan fasilitas pembiayaan konsumen a.n DERMAWATI TURNIP tanggal 20 April 2012 6. Foto Kopi Dokumen perjanjian pembiayaan konsumen No.0017406/2/02/04/2012 tanggal 20 April 2012 7. Foto Kopi surat pesanan barang berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen no.0017406/2/02/04/2012 tanggal 20 April 2012 8. Foto Kopi tanda terima barang berdsarkan perjanjian pembiayaan konsumen no.0017406/2/02/04/2012 tanggal 20 April 2012. 9. Foto Copy Tanda terima tanggal 28 Maret 2013 dari PT DSF kepad DERMAWATI TURNIP dengan lampiran foto kopi BPKB faktur dan kuitansi pembelian. 10. Foto kopi delivery order No.21204028 tanggal 21 April 2012 dari PT Ratu Mobil Sejadag kepada PT Dipo Star Finance yang diterima oleh DERMAWATI TURNIP. 11. Kartu Keluarga a.n BONARSIOUS GIRSANG 12. Formulir Latar Belakang Analisa dan Rekomnedasi a,n Dermawati Turnip 13. Rekening koran a,n CV LORIN JAYAPRIMA No.Rek 0154627505 Bank BNI Cabang USU Medan sebanyak 8 lembar
A05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) set Fotokopi dokumen pembukaan rekening nasabah atas nama CV LORIN JAYAPRIMA nomor rekening 6666666695. 2. 1 (satu) set Print Out Rekening Koran atas nama CV LORIN JAYAPRIMA nomor rekening 0154627504 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014. 3. 1 (satu) set Print Out Rekening Koran atas nama CV LORIN JAYAPRIMA nomor rekening 0301708002 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014.



	<ol style="list-style-type: none">4. 1 (satu) set Print Out Rekening Koran atas nama CV LORIN JAYAPRIMA nomor rekening 0236789915 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/20145. 1 (satu) set Print Out Rekening Koran atas nama CV LORIN JAYAPRIMA nomor rekening 0236799876 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/20146. 1 (satu) Set Fotokopi Surat Keputusan Kredit Nomor MDC/2/0999/R7. 1 (satu) set Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 2011.269.MDC8. 1 (satu) set Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 2012.156.MDC9. 1 (satu) set Fotokopi Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2012.156.MDC10. 1 (satu) Set Fotokopi Surat Keputusan Kredit Nomor MDC/2/0425/R.
A06	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen pembukaan rekening nasabah atas nama BONARSIUS GIRSANG nomor rekening 2027218888.2. Dokumen pembukaan rekening nasabah atas nama DERMAWATI TURNIP nomor rekening 02271441283. Rekening Koran atas nama BONARSIUS GIRSANG nomor rekening 2027218888 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014.4. Rekening Koran atas nama DERMAWATI TURNIP nomor rekening 0227144128 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014.5. Rekening Koran atas nama BONARSIUS GIRSANG nomor rekening 2027218888 Periode 01/01/2022 s.d. 31/01/20226. Rekening Koran atas nama DERMAWATI TURNIP nomor rekening 0227144128 Periode 01/01/2022 s.d. 31/01/2022
A07	<ol style="list-style-type: none">1. 3 Box Dokumen Pembelian PT INDO CAFCO dari CV LORIN JAYAPRIMA Tahun 2011, 2013, dan 20142. 1 Box Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan PT INDO CAFCO kepada CV LORIN JAYAPRIMA Tahun 2011 s.d. 2014.3. 4 Set Rekening koran Rabobank nomor 5600001002 a.n. PT INDO CAFCO sebagai bukti pembayaran ke CV LORIN JAYAPRIMA
A08	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen pembelian kopi oleh PT Olam Indonesia dari CV Lorin Jayaprime tahun 2013 sebanyak 6 set bukti pembelian beserta kelengkapannya2. Dokumen pembelian kopi oleh PT Olam Indonesia dari CV Lorin Jayaprime tahun 2014 masa :<ol style="list-style-type: none">a. April sebanyak 31 Setb. Mei sebanyak 2 Setc. Juni sebanyak 7 Set3. SPT Masa PPh Pasal 22 April 2014 beserta bukti potong dan bukti setor atas pembelian kopi4. SPT Masa PPh Pasal 22 Mei 2014 beserta bukti potong dan bukti setor atas pembelian kopi5. SPT Masa PPh Pasal 22 Juni 2014 beserta bukti potong dan bukti setor atas pembelian kopi6. Bukti Pembayaran via transfer beserta lampiran7. Bukti pembayaran via cek

Tetap dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 15 Nopember 2023, sebagaimana selengkapnya terlampir pada Berita Acara Persidangan perkara ini yaitu pada pokoknya dalam kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena kebenaran sejati yang hendak diungkap dari perkara ini haruslah didasarkan pada sistem pembuktian yang berpatokan pada “terbukti secara sah dan meyakinkan” (beyond a reasonable doubt) menurut hukum dan didukung dengan keyakinan Hakim tanpa keraguan atas kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 menyebutkan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Bahwa dengan demikian, dengan berpedoman pada fakta persidangan, analisis yuridis dan dikait-kaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, secara nyata Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dengan hormat, perkenankan Kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan Hukum dengan amarnya menyebutkan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dermawati Turnip** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa **Dermawati Turnip** dari Dakwaan Tunggal tersebut (Vrijspraak), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa **Dermawati Turnip** dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 90 Putusan Pidana Nomor 1770/Pid.Sus/2023/PN Mdn



4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Telah mendengar Tanggapan/Replik secara tertulis dari Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2023 sebagaimana terlampir selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan pada pokoknya yaitu:

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah keliru menggunakan acuan kerugian keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyamakan dengan pengertian kerugian pada pendapat Negara;

Meskipun pendapatan Negara merupakan bagian dari keuangan Negara, akan tetapi memiliki pemahaman objek yang berbeda;

Pasal 11 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah;

Oleh karena itu penghitungan kerugian pada pendapatan Negara dilihat dari potensi Negara kehilangan pendapatan, berbeda dengan kerugian keuangan Negara yang diartikan sebagai berkurangnya Uang, surat berharga dan barang;

Bahwa terkait dengan jumlah kerugian pada pendapatan Negara dalam surat tuntutan kami telah sesuai dengan fakta hukum yaitu telah dilakukan penghitungan oleh ahli pajak dan telah ditemukan kerugian pada pendapatan Negara yang nyata yaitu sebesar Rp.6.630.940.036,- (enam milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga puluh enam rupiah);

Telah mendengar Tanggapan/Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan secara lisan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DERMAWATI TURNIP** selaku direktur CV LORIN JAYAPRIMA yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Pauline Sinaga, SH, MKN Nomor 01 tanggal 15 Januari 2003 Tentang Pendirian Perseroan Komanditer C.V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LORIN JAYAPRIMA yang terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia sejak tanggal 19 Februari 2003 dengan NPWP 02.199.633.6-121.000 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti akan tetapi dalam kurun waktu atau masa pajak antara bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2011, bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2012, bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2013, bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu masa pajak tahun 2011, 2012, 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di kantor LORIN JAYAPRIMA yang beralamat di Jl Flamboyan Dalam no. 8 Tanjung Selamat, Medan Tuntungan, tempat atau domisili dimana CV LORIN JAYAPRIMA melaksanakan kegiatan usaha Penjualan Biji Kopi kepada lawan transaksi yaitu **PT INDO CAFCO** dan **PT OLAM INDONESIA**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan "**dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan perbarengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,**" tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa CV LORIN JAYAPRIMA dengan direktornya terdakwa **DERMAWATI TURNIP**, merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan berupa penjualan biji kopi kepada lawan transaksi yaitu PT INDO CAFCO dan PT OLAM INDONESIA. Selama kurun waktu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, CV LORIN JAYA PRIMA telah melakukan kegiatan perdagangan berupa penjualan biji kopi kepada PT INDO CAFCO dan PT OLAM INDONESIA. Bahwa metode penjualan biji kopi oleh CV LORIN JAYA PRIMA kepada PT INDO CAFCO dan PT OLAM INDONESIA adalah dimana BONARSIUS GIRSANG yang bertindak sebagai bagian operasional dari CV LORIN JAYA PRIMA dengan cara melakukan dan mencari pihak pembeli kopi yang dijual oleh CV LORIN JAYAPRIMA.

Bahwa BONARSIUS GIRSANG disamping sebagai suami dari terdakwa **DERMAWATI TURNIP**, juga melakukan kegiatan pemasaran atau penjualan kopi yang dijual oleh CV LORIN JAYAPRIMA kepada beberapa perusahaan. Bahwa caranya adalah BONARSIUS GIRSANG menemui pihak dari PT INCO CAFCO dan pihak dari PT OLAM INDONESIA, dimana selanjutnya oleh BOARSIOUS GIRSANG menawarkan kopi jenis *arabica* kepada PT INCO CAFCO dan pihak

Halaman 8 dari 90 Putusan Pidana Nomor 1770/Pid.Sus/2023/PN Mdn



dari PT OLAM INDONESIA atas penawaran tersebut terjadilah kesepakatan bahwa PT INCO CAFCO dan PT OLAM INDONESIA bersedia membeli kopi dari CV LORIN JAYAPRIMA.

Bahwa PT INCO CAFCO telah melakukan pembelian kopi dari CV LORIN JAYAPRIMA dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Adapun rincian pembelian kopi oleh PT INCO CAFCO kepada CV LORIN JAYA PRIMA pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:

No	NPWP	Bukti Pemungutan	Tanggal	Qty	Nilai Objek Pajak	PPh yang di pungut
1	02.199.633.5-121.000	000135/PPH22/ICCM/2011	23/02/2011	4,002.00	215,567,730	538,919
2	02.199.633.5-121.000	000140/PPH22/ICCM/2011	28/02/2011	10239.4	551,681,852	1,379,205
3	02.199.633.5-121.000	000203/PPH22/ICCM/2011	01/03/2011	4,610.80	248,404,545	621,011
4	02.199.633.5-121.000	000158/PPH22/ICCM/2011	14/03/2011	8,762.40	478,427,040	1,196,068
5	02.199.633.5-121.000	000159/PPH22/ICCM/2011	14/03/2011	4,291.40	261,615,974	654,040
6	02.199.633.5-121.000	000160/PPH22/ICCM/2011	14/03/2011	3,562.80	198,066,154	495,165
7	02.199.633.5-121.000	000169/PPH22/ICCM/2011	16/03/2011	6,437.00	355,790,370	889,476
8	02.199.633.5-121.000	000173/PPH22/ICCM/2011	17/03/2011	7,505.00	412,701,375	1,031,753
9	02.199.633.5-121.000	000175/PPH22/ICCM/2011	17/03/2011	7,904.20	426,347,384	1,065,868
10	02.199.633.5-121.000	000176/PPH22/ICCM/2011	18/03/2011	2,335.20	122,187,308	305,468
11	02.199.633.5-121.000	000183/PPH22/ICCM/2011	21/03/2011	6,047.80	316,773,967	791,935
12	02.199.633.5-121.000	000186/PPH22/ICCM/2011	22/03/2011	5,499.00	294,320,228	735,801
13	02.199.633.5-121.000	000199/PPH22/ICCM/2011	28/03/2011	1,477.00	78,132,266	195,331
14	02.199.633.5-121.000	000200/PPH22/ICCM/2011	28/03/2011	1,776.40	93,207,708	233,019
15	02.199.633.5-121.000	000205/PPH22/ICCM/2011	29/03/2011	13,642.60	723,998,351	1,809,996
16	02.199.633.5-121.000	000214/PPH22/ICCM/2011	01/04/2011	2,295.40	119,684,681	299,212
17	02.199.633.5-121.000	000217/PPH22/ICCM/2011	02/04/2011	2,994.00	159,378,105	398,445
18	02.199.633.5-121.000	000220/PPH22/ICCM/2011	04/04/2011	4,471.00	234,510,209	586,276
19	02.199.633.5-121.000	000222/PPH22/ICCM/2011	05/04/2011	4,850.20	255,333,929	638,335
20	02.199.633.5-121.000	000226/PPH22/ICCM/2011	06/04/2011	3,453.00	180,486,584	451,216
21	02.199.633.5-121.000	000234/PPH22/ICCM/2011	08/04/2011	6,546.80	343,306,336	858,266
22	02.199.633.5-121.000	000246/PPH22/ICCM/2011	13/04/2011	7,954.00	427,250,701	1,068,127
23	02.199.633.5-121.000	000247/PPH22/ICCM/2011	13/04/2011	1,000.00	54,204,800	135,512
24	02.199.633.5-121.000	000253/PPH22/ICCM/2011	14/04/2011	9,980.00	537,059,728	1,342,649
25	02.199.633.5-121.000	000255/PPH22/ICCM/2011	15/04/2011	2,764.40	151,337,631	378,344
26	02.199.633.5-121.000	000256/PPH22/ICCM/2011	15/04/2011	5,449.00	292,202,625	730,507



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	02.199.633.5-121.000	000261/PPH22/ICCM/2011	19/04/2011	6,976.00	385,577,472	963,944
28	02.199.633.5-121.000	000264/PPH22/ICCM/2011	21/04/2011	13,313.20	748,685,184	1,871,713
29	02.199.633.5-121.000	000269/PPH22/ICCM/2011	25/04/2011	6,966.00	398,942,820	997,357
30	02.199.633.5-121.000	000273/PPH22/ICCM/2011	26/04/2011	998.00	57,155,460	142,889
31	02.199.633.5-121.000	000274/PPH22/ICCM/2011	27/04/2011	6,537.00	370,620,902	926,552
32	02.199.633.5-121.000	000279/PPH22/ICCM/2011	29/04/2011	4,051.80	236,101,627	590,254
33	02.199.633.5-121.000	000292/PPH22/ICCM/2011	03/05/2011	10,199.60	597,047,908	1,492,620
34	02.199.633.5-121.000	000293/PPH22/ICCM/2011	03/05/2011	6,247.60	364,335,042	910,838
35	02.199.633.5-121.000	000294/PPH22/ICCM/2011	03/05/2011	149.60	8,724,074	21,810
36	02.199.633.5-121.000	000312/PPH22/ICCM/2011	05/05/2011	13,872.00	906,949,117	2,267,373
37	02.199.633.5-121.000	000314/PPH22/ICCM/2011	06/05/2011	3,393.20	220,921,072	552,303
38	02.199.633.5-121.000	000320/PPH22/ICCM/2011	09/05/2011	2,814.40	182,052,239	455,131
39	02.199.633.5-121.000	000326/PPH22/ICCM/2011	10/05/2011	15,079.80	986,912,819	2,467,282
40	02.199.633.5-121.000	000334/PPH22/ICCM/2011	11/05/2011	6,287.40	390,051,402	975,129
41	02.199.633.5-121.000	000335/PPH22/ICCM/2011	10/05/2011	6,886.20	433,830,600	1,084,577
42	02.199.633.5-121.000	000359/PPH22/ICCM/2011	13/05/2011	6,776.40	420,136,800	1,050,342
43	02.199.633.5-121.000	000367/PPH22/ICCM/2011	18/05/2011	11,666.60	718,265,896	1,795,665
44	02.199.633.5-121.000	000377/PPH22/ICCM/2011	19/05/2011	7,285.40	433,610,751	1,084,027
45	02.199.633.5-121.000	000380/PPH22/ICCM/2011	20/05/2011	6,686.60	392,946,742	982,367
46	02.199.633.5-121.000	000381/PPH22/ICCM/2011	20/05/2011	4,670.60	275,304,781	688,262
47	02.199.633.5-121.000	000391/PPH22/ICCM/2011	24/05/2011	20,459.00	1,191,898,421	2,979,745
48	02.199.633.5-121.000	000392/PPH22/ICCM/2011	25/05/2011	21,467.00	1,187,025,228	2,967,563
49	02.199.633.5-121.000	000397/PPH22/ICCM/2011	27/05/2011	10,968.40	617,209,937	1,543,025
50	02.199.633.5-121.000	000401/PPH22/ICCM/2011	30/05/2011	10,029.80	551,856,446	1,379,640
51	02.199.633.5-121.000	000411/PPH22/ICCM/2011	01/06/2011	10,748.40	609,380,538	1,523,451
52	02.199.633.5-121.000	000412/PPH22/ICCM/2011	01/06/2011	11,986.00	687,938,867	1,719,847
53	02.199.633.5-121.000	000413/PPH22/ICCM/2011	01/06/2011	11,976.00	685,777,816	1,714,445
54	02.199.633.5-121.000	000417/PPH22/ICCM/2011	06/06/2011	12,724.60	708,760,088	1,771,901
55	02.199.633.5-121.000	000420/PPH22/ICCM/2011	07/06/2011	13,493.00	755,578,831	1,888,947
56	02.199.633.5-121.000	000429/PPH22/ICCM/2011	08/06/2011	11,507.00	650,160,512	1,625,401
57	02.199.633.5-121.000	000430/PPH22/ICCM/2011	09/06/2011	5,988.00	332,570,526	831,426
58	02.199.633.5-121.000	000432/PPH22/ICCM/2011	10/06/2011	9,980.00	547,975,250	1,369,940
59	02.199.633.5-121.000	000437/PPH22/ICCM/2011	13/06/2011	8,024.00	451,229,640	1,128,074
60	02.199.633.5-121.000	000438/PPH22/ICCM/2011	13/06/2011	15,309.20	868,476,855	2,171,192



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	02.199.633.5-121.000	000441/PPH22/ICCM/2011	14/06/2011	21,856.20	1,240,915,765	3,102,290
62	02.199.633.5-121.000	000446/PPH22/ICCM/2011	15/06/2011	20,079.80	1,141,207,995	2,853,020
63	02.199.633.5-121.000	000449/PPH22/ICCM/2011	16/06/2011	7,095.80	400,586,293	1,001,466
64	02.199.633.5-121.000	000454/PPH22/ICCM/2011	17/06/2011	10,998.00	618,960,841	1,547,402
65	02.199.633.5-121.000	000456/PPH22/ICCM/2011	17/06/2011	5,598.00	311,109,311	777,773
66	02.199.633.5-121.000	000461/PPH22/ICCM/2011	20/06/2011	14,441.20	807,850,503	2,019,626
67	02.199.633.5-121.000	000458/PPH22/ICCM/2011	21/06/2011	14,062.20	786,914,163	1,967,285
68	02.199.633.5-121.000	000462/PPH22/ICCM/2011	22/06/2011	13,303.00	722,889,912	1,807,225
69	02.199.633.5-121.000	000463/PPH22/ICCM/2011	22/06/2011	9,091.80	493,182,418	1,232,956
70	02.199.633.5-121.000	000466/PPH22/ICCM/2011	23/06/2011	4,540.80	214,556,218	536,391
71	02.199.633.5-121.000	000467/PPH22/ICCM/2011	24/06/2011	10,039.80	533,257,249	1,333,143
72	02.199.633.5-121.000	000468/PPH22/ICCM/2011	23/06/2011	12,954.00	682,839,568	1,707,099
73	02.199.633.5-121.000	000471/PPH22/ICCM/2011	27/06/2011	14,780.40	800,388,221	2,000,971
74	02.199.633.5-121.000	000474/PPH22/ICCM/2011	28/06/2011	11,074.80	618,908,054	1,547,270
75	02.199.633.5-121.000	000475/PPH22/ICCM/2011	28/06/2011	7,835.00	427,536,363	1,068,841
76	02.199.633.5-121.000	000476/PPH22/ICCM/2011	28/06/2011	13,443.40	743,362,236	1,858,406
77	02.199.633.5-121.000	000480/PPH22/ICCM/2011	01/07/2011	10,765.70	600,456,918	1,501,143
78	02.199.633.5-121.000	000484/PPH22/ICCM/2011	01/07/2011	2,175.80	126,546,051	316,365
79	02.199.633.5-121.000	000485/PPH22/ICCM/2011	01/07/2011	2,295.60	128,439,738	321,100
80	02.199.633.5-121.000	000486/PPH22/ICCM/2011	01/07/2011	2,205.40	126,732,781	316,832
81	02.199.633.5-121.000	000487/PPH22/ICCM/2011	01/07/2011	5,499.00	304,810,669	762,028
82	02.199.633.5-121.000	000489/PPH22/ICCM/2011	01/07/2011	99.80	5,503,222	13,758
83	02.199.633.5-121.000	000490/PPH22/ICCM/2011	04/07/2011	7,824.20	452,223,111	1,130,558
84	02.199.633.5-121.000	000491/PPH22/ICCM/2011	04/07/2011	14,476.00	821,976,232	2,054,940
85	02.199.633.5-121.000	000492/PPH22/ICCM/2011	04/07/2011	171.70	9,839,096	24,598
86	02.199.633.5-121.000	000493/PPH22/ICCM/2011	04/07/2011	10,352.30	591,066,638	1,477,668
87	02.199.633.5-121.000	000494/PPH22/ICCM/2011	04/07/2011	4,106.10	232,417,578	581,045
88	02.199.633.5-121.000	000498/PPH22/ICCM/2011	04/07/2011	8,476.50	470,827,192	1,177,068
89	02.199.633.5-121.000	000495/PPH22/ICCM/2011	04/07/2011	12,417.40	699,720,490	1,749,302
90	02.199.633.5-121.000	000500/PPH22/ICCM/2011	05/07/2011	2,089.20	117,726,420	294,316
91	02.199.633.5-121.000	000503/PPH22/ICCM/2011	05/07/2011	14,017.70	785,867,306	1,964,668
92	02.199.633.5-121.000	000506/PPH22/ICCM/2011	06/07/2011	10,000.00	558,675,000	1,396,687
93	02.199.633.5-121.000	000516/PPH22/ICCM/2011	08/07/2011	371.00	20,549,690	51,374
94	02.199.633.5-121.000	000517/PPH22/ICCM/2011	08/07/2011	3,893.10	213,779,853	534,449



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	02.199.633.5-121.000	000521/PPH22/ICCM/2011	08/07/2011	15,131.50	852,175,817	2,130,439
96	02.199.633.5-121.000	000522/PPH22/ICCM/2011	08/07/2011	4,497.50	250,159,945	625,399
97	02.199.633.5-121.000	000523/PPH22/ICCM/2011	08/07/2011	465.80	25,998,068	64,995
98	02.199.633.5-121.000	000540/PPH22/ICCM/2011	12/07/2011	4,481.30	255,856,238	639,641
99	02.199.633.5-121.000	000538/PPH22/ICCM/2011	12/07/2011	8,432.80	470,972,554	1,177,431
100	02.199.633.5-121.000	000539/PPH22/ICCM/2011	12/07/2011	5,052.90	287,138,520	717,846
101	02.199.633.5-121.000	000550/PPH22/ICCM/2011	15/07/2011	4,601.40	249,165,810	622,915
102	02.199.633.5-121.000	000551/PPH22/ICCM/2011	15/07/2011	17.10	927,914	2,320
103	02.199.633.5-121.000	000552/PPH22/ICCM/2011	15/07/2011	8,382.20	464,119,061	1,160,298
104	02.199.633.5-121.000	000537/PPH22/ICCM/2011	12/07/2011	8,185.00	460,691,088	1,151,727
105	02.199.633.5-121.000	000553/PPH22/ICCM/2011	15/07/2011	11,093.30	596,375,808	1,490,940
106	02.199.633.5-121.000	000526/PPH22/ICCM/2011	08/07/2011	4,800.40	255,592,497	638,981
107	02.199.633.5-121.000	000556/PPH22/ICCM/2011	19/07/2011	11,556.80	608,465,520	1,521,165
108	02.199.633.5-121.000	000561/PPH22/ICCM/2011	21/07/2011	3,702.60	188,467,375	471,170
109	02.199.633.5-121.000	000562/PPH22/ICCM/2011	21/07/2011	13,692.40	694,952,832	1,737,383
110	02.199.633.5-121.000	000563/PPH22/ICCM/2011	21/07/2011	3,792.40	195,343,490	488,358
111	02.199.633.5-121.000	000567/PPH22/ICCM/2011	12/08/2011	14,930.00	746,500,000	1,866,250
112	02.199.633.5-121.000	000568/PPH22/ICCM/2011	15/08/2011	14,720.40	746,946,952	1,867,367
113	02.199.633.5-121.000	000575/PPH22/ICCM/2011	22/08/2011	279.60	14,401,860	36,005
114	02.199.633.5-121.000	000576/PPH22/ICCM/2011	22/08/2011	14,291.20	774,248,625	1,935,622
115	02.199.633.5-121.000	000579/PPH22/ICCM/2011	22/08/2011	2,984.00	161,458,272	403,646
116	02.199.633.5-121.000	000580/PPH22/ICCM/2011	22/08/2011	12,924.00	693,351,921	1,733,380
117	02.199.633.5-121.000	000581/PPH22/ICCM/2011	22/08/2011	708.80	38,285,973	95,715
118	02.199.633.5-121.000	000582/PPH22/ICCM/2011	22/08/2011	6,077.60	327,373,570	818,433
119	02.199.633.5-121.000	000588/PPH22/ICCM/2011	24/08/2011	10,578.80	556,519,989	1,391,300
120	02.199.633.5-121.000	000592/PPH22/ICCM/2011	25/08/2011	4,970.00	267,467,508	668,669
121	02.199.633.5-121.000	000595/PPH22/ICCM/2011	25/08/2011	5,039.80	273,260,375	683,151
122	02.199.633.5-121.000	000601/PPH22/ICCM/2011	05/09/2011	7,495.00	428,721,495	1,071,804
123	02.199.633.5-121.000	000602/PPH22/ICCM/2011	05/09/2011	4,491.00	256,683,105	641,708
124	02.199.633.5-121.000	000603/PPH22/ICCM/2011	05/09/2011	14,421.00	803,180,335	2,007,952
125	02.199.633.5-121.000	000605/PPH22/ICCM/2011	06/09/2011	6,467.00	368,319,901	920,800
126	02.199.633.5-121.000	000606/PPH22/ICCM/2011	06/09/2011	9,520.80	533,309,897	1,333,275
127	02.199.633.5-121.000	000607/PPH22/ICCM/2011	06/09/2011	14,500.00	836,429,600	2,091,075
128	02.199.633.5-121.000	000608/PPH22/ICCM/2011	06/09/2011	470.00	26,960,140	67,400



129	02.199.633.5-121.000	000609/PPH22/ICCM/2011	06/09/2011	7,465.00	430,422,494	1,076,057
130	02.199.633.5-121.000	000613/PPH22/ICCM/2011	07/09/2011	10,958.00	634,165,759	1,585,415
131	02.199.633.5-121.000	000614/PPH22/ICCM/2011	07/09/2011	10,718.40	611,285,358	1,528,215
132	02.199.633.5-121.000	000618/PPH22/ICCM/2011	07/09/2011	2,964.00	168,834,775	422,088
133	02.199.633.5-121.000	000619/PPH22/ICCM/2011	08/09/2011	9,889.60	564,620,010	1,411,550
134	02.199.633.5-121.000	000620/PPH22/ICCM/2011	08/09/2011	2,136.20	121,757,419	304,395
135	02.199.633.5-121.000	000626/PPH22/ICCM/2011	09/09/2011	988.00	55,353,095	138,383
136	02.199.633.5-121.000	000628/PPH22/ICCM/2011	09/09/2011	6,546.80	369,561,295	923,903
137	02.199.633.5-121.000	000629/PPH22/ICCM/2011	09/09/2011	7,974.00	455,441,788	1,138,605
138	02.199.633.5-121.000	000639/PPH22/ICCM/2011	12/09/2011	5,858.20	331,435,164	828,587
139	02.199.633.5-121.000	000642/PPH22/ICCM/2011	12/09/2011	4,101.80	228,147,982	570,369
140	02.199.633.5-121.000	000649/PPH22/ICCM/2011	13/09/2011	14,960.00	762,960,000	1,907,400
141	02.199.633.5-121.000	000650/PPH22/ICCM/2011	13/09/2011	7,395.00	419,259,007	1,048,147
142	02.199.633.5-121.000	000651/PPH22/ICCM/2011	14/09/2011	5,239.60	291,429,695	728,574
143	02.199.633.5-121.000	000652/PPH22/ICCM/2011	14/09/2011	10,968.00	604,170,086	1,510,425
144	02.199.633.5-121.000	000659/PPH22/ICCM/2011	15/09/2011	13,323.20	747,499,468	1,868,748
145	02.199.633.5-121.000	000673/PPH22/ICCM/2011	19/09/2011	3,590.60	192,865,488	482,163
146	02.199.633.5-121.000	000674/PPH22/ICCM/2011	19/09/2011	6,469.20	361,664,508	904,161
147	02.199.633.5-121.000	000675/PPH22/ICCM/2011	19/09/2011	14,191.40	758,101,040	1,895,252
148	02.199.633.5-121.000	000676/PPH22/ICCM/2011	19/09/2011	2,223.00	116,876,448	292,191
149	02.199.633.5-121.000	000685/PPH22/ICCM/2011	20/09/2011	8,722.40	457,895,471	1,144,738
150	02.199.633.5-121.000	000686/PPH22/ICCM/2011	20/09/2011	1,054.60	54,720,030	136,800
151	02.199.633.5-121.000	000687/PPH22/ICCM/2011	21/09/2011	4,843.60	248,887,175	622,218
152	02.199.633.5-121.000	000688/PPH22/ICCM/2011	21/09/2011	1,187.80	4,712,000	11,780
153	02.199.633.5-121.000	000697/PPH22/ICCM/2011	21/09/2011	12,218.00	654,970,326	1,637,425
154	02.199.633.5-121.000	000704/PPH22/ICCM/2011	22/09/2011	2,395.20	124,141,539	310,354
155	02.199.633.5-121.000	000705/PPH22/ICCM/2011	22/09/2011	2,358.40	121,649,220	304,124
156	02.199.633.5-121.000	000706/PPH22/ICCM/2011	22/09/2011	7,761.20	398,807,322	997,018
157	02.199.633.5-121.000	000709/PPH22/ICCM/2011	23/09/2011	2,395.20	125,685,126	314,214
158	02.199.633.5-121.000	000711/PPH22/ICCM/2011	23/09/2011	8,163.60	424,945,994	1,062,365
159	02.199.633.5-121.000	000713/PPH22/ICCM/2011	27/09/2011	5,000.00	261,056,250	652,640
160	02.199.633.5-121.000	000714/PPH22/ICCM/2011	27/09/2011	7,082.80	369,801,842	924,505
161	02.199.633.5-121.000	000715/PPH22/ICCM/2011	27/09/2011	2,038.80	103,406,917	258,518
162	02.199.633.5-121.000	000716/PPH22/ICCM/2011	27/09/2011	2,994.00	152,083,224	380,208



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163	02.199.633.5-121.000	000728/PPH22/ICCM/2011	29/09/2011	8,762.40	438,287,537	1,095,718
164	02.199.633.5-121.000	000729/PPH22/ICCM/2011	30/09/2011	10,488.80	511,435,985	1,278,590
165	02.199.633.5-121.000	000730/PPH22/ICCM/2011	30/09/2011	1,237.60	61,373,624	153,434
166	02.199.633.5-121.000	000731/PPH22/ICCM/2011	30/09/2011	4,511.20	217,806,375	544,515
167	02.199.633.5-121.000	000732/PPH22/ICCM/2011	30/09/2011	458.80	21,828,846	54,572
168	02.199.633.5-121.000	000735/PPH22/ICCM/2011	04/10/2011	9,221.40	440,842,859	1,102,107
169	02.199.633.5-121.000	000736/PPH22/ICCM/2011	04/10/2011	5,988.00	289,760,099	724,400
170	02.199.633.5-121.000	000737/PPH22/ICCM/2011	04/10/2011	2,235.00	105,869,715	264,675
171	02.199.633.5-121.000	000738/PPH22/ICCM/2011	04/10/2011	4,331.80	206,208,841	515,522
172	02.199.633.5-121.000	000739/PPH22/ICCM/2011	05/10/2011	2,554.80	119,857,165	299,642
173	02.199.633.5-121.000	000740/PPH22/ICCM/2011	05/10/2011	6,786.40	323,863,974	809,659
174	02.199.633.5-121.000	000743/PPH22/ICCM/2011	07/10/2011	3,423.80	161,317,473	403,293
175	02.199.633.5-121.000	000744/PPH22/ICCM/2011	07/10/2011	2,564.20	120,996,905	302,492
176	02.199.633.5-121.000	000745/PPH22/ICCM/2011	07/10/2011	5,468.60	259,627,800	649,069
177	02.199.633.5-121.000	000746/PPH22/ICCM/2011	10/10/2011	1,967.20	93,317,870	233,294
178	02.199.633.5-121.000	000747/PPH22/ICCM/2011	10/10/2011	2,972.80	145,016,751	362,541
179	02.199.633.5-121.000	000752/PPH22/ICCM/2011	10/10/2011	7,027.20	344,585,779	861,464
180	02.199.633.5-121.000	000753/PPH22/ICCM/2011	10/10/2011	6,974.60	356,804,843	892,012
181	02.199.633.5-121.000	000754/PPH22/ICCM/2011	10/10/2011	4,461.00	229,303,787	573,259
182	02.199.633.5-121.000	000759/PPH22/ICCM/2011	12/10/2011	3,564.40	181,283,174	453,208
183	02.199.633.5-121.000	000760/PPH22/ICCM/2011	12/10/2011	2,982.40	146,091,015	365,228
184	02.199.633.5-121.000	000762/PPH22/ICCM/2011	13/10/2011	3,017.60	148,367,094	370,918
185	02.199.633.5-121.000	000763/PPH22/ICCM/2011	13/10/2011	3,180.00	157,848,045	394,620
186	02.199.633.5-121.000	000769/PPH22/ICCM/2011	14/10/2011	6,087.80	302,345,291	755,863
187	02.199.633.5-121.000	000775/PPH22/ICCM/2011	17/10/2011	732.20	36,792,794	91,982
188	02.199.633.5-121.000	000776/PPH22/ICCM/2011	17/10/2011	5,325.40	270,135,974	675,340
189	02.199.633.5-121.000	000777/PPH22/ICCM/2011	17/10/2011	8,642.60	442,730,149	1,106,825
190	02.199.633.5-121.000	000782/PPH22/ICCM/2011	18/10/2011	11,032.00	557,846,318	1,394,616
191	02.199.633.5-121.000	000783/PPH22/ICCM/2011	18/10/2011	1,592.60	82,422,146	206,055
192	02.199.633.5-121.000	000784/PPH22/ICCM/2011	18/10/2011	8,407.40	436,667,745	1,091,669
193	02.199.633.5-121.000	000785/PPH22/ICCM/2011	18/10/2011	5,365.00	281,717,760	704,294
194	02.199.633.5-121.000	000786/PPH22/ICCM/2011	19/10/2011	1,635.00	85,854,340	214,636
195	02.199.633.5-121.000	000787/PPH22/ICCM/2011	19/10/2011	7,995.60	422,899,277	1,057,248
196	02.199.633.5-121.000	000788/PPH22/ICCM/2011	19/10/2011	7,004.40	372,961,186	932,403



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197	02.199.633.5-121.000	000789/PPH22/ICCM/2011	19/10/2011	671.40	35,427,764	88,569
198	02.199.633.5-121.000	000794/PPH22/ICCM/2011	20/10/2011	5,489.00	287,253,093	718,133
199	02.199.633.5-121.000	000797/PPH22/ICCM/2011	21/10/2011	8,483.00	437,871,253	1,094,678
200	02.199.633.5-121.000	000811/PPH22/ICCM/2011	25/10/2011	356.60	18,142,025	45,355
201	02.199.633.5-121.000	000812/PPH22/ICCM/2011	25/10/2011	6,000.00	305,250,000	763,125
202	02.199.633.5-121.000	000813/PPH22/ICCM/2011	25/10/2011	4,960.60	252,370,525	630,926
203	02.199.633.5-121.000	000814/PPH22/ICCM/2011	25/10/2011	39.40	2,095,922	5,240
204	02.199.633.5-121.000	000815/PPH22/ICCM/2011	25/10/2011	5,888.60	324,640,873	811,602
205	02.199.633.5-121.000	000818/PPH22/ICCM/2011	26/10/2011	6,756.40	358,734,436	896,836
206	02.199.633.5-121.000	000819/PPH22/ICCM/2011	26/10/2011	3,355.00	184,541,775	461,354
207	02.199.633.5-121.000	000820/PPH22/ICCM/2011	26/10/2011	5,437.40	297,772,414	744,431
208	02.199.633.5-121.000	000826/PPH22/ICCM/2011	27/10/2011	8,153.60	170,105,492	425,264
209	02.199.633.5-121.000	000827/PPH22/ICCM/2011	27/10/2011	3,083.80	436,341,942	1,090,855
210	02.199.633.5-121.000	000830/PPH22/ICCM/2011	27/10/2011	4,291.40	229,411,807	573,530
211	02.199.633.5-121.000	000837/PPH22/ICCM/2011	28/10/2011	4,033.80	217,243,324	543,108
212	02.199.633.5-121.000	000838/PPH22/ICCM/2011	28/10/2011	726.60	39,648,746	99,123
213	02.199.633.5-121.000	000839/PPH22/ICCM/2011	31/10/2011	7,273.40	405,088,376	1,012,722
214	02.199.633.5-121.000	000840/PPH22/ICCM/2011	31/10/2011	6,109.60	326,660,272	816,652
215	02.199.633.5-121.000	000846/PPH22/ICCM/2011	31/10/2011	3,091.60	161,621,119	404,053
216	02.199.633.5-121.000	000847/PPH22/ICCM/2011	31/10/2011	890.40	46,717,151	116,793
217	02.199.633.5-121.000	000850/PPH22/ICCM/2011	01/11/2011	9,570.80	496,915,963	1,242,290
218	02.199.633.5-121.000	000854/PPH22/ICCM/2011	03/11/2011	656.40	35,083,923	87,710
219	02.199.633.5-121.000	000920/PPH22/ICCM/2011	03/11/2011	2,337.60	121,625,328	304,063
220	02.199.633.5-121.000	000855/PPH22/ICCM/2011	04/11/2011	10,728.40	566,754,551	1,416,886
221	02.199.633.5-121.000	000856/PPH22/ICCM/2011	04/11/2011	8,353.20	437,267,048	1,093,167
222	02.199.633.5-121.000	000859/PPH22/ICCM/2011	07/11/2011	2,584.80	139,469,346	348,673
223	02.199.633.5-121.000	000860/PPH22/ICCM/2011	07/11/2011	7,677.20	411,900,205	1,029,750
224	02.199.633.5-121.000	000861/PPH22/ICCM/2011	07/11/2011	2,562.20	139,171,325	347,928
225	02.199.633.5-121.000	000866/PPH22/ICCM/2011	08/11/2011	9,980.00	552,017,752	1,380,045
226	02.199.633.5-121.000	000889/PPH22/ICCM/2011	11/11/2011	7,457.80	413,361,989	1,033,404
227	02.199.633.5-121.000	000890/PPH22/ICCM/2011	11/11/2011	1,184.80	65,784,479	164,462
228	02.199.633.5-121.000	000891/PPH22/ICCM/2011	11/11/2011	7,914.00	437,147,200	1,092,868
229	02.199.633.5-121.000	000901/PPH22/ICCM/2011	14/11/2011	14,960.00	827,548,603	2,068,871
230	02.199.633.5-121.000	000905/PPH22/ICCM/2011	15/11/2011	941.20	52,204,975	130,512



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231	02.199.633.5-121.000	000906/PPH22/ICCM/2011	15/11/2011	4,008.80	226,040,196	565,100
232	02.199.633.5-121.000	000907/PPH22/ICCM/2011	15/11/2011	10,000.00	563,860,000	1,409,650
233	02.199.633.5-121.000	000908/PPH22/ICCM/2011	15/11/2011	1,991.20	110,825,970	277,064
234	02.199.633.5-121.000	000910/PPH22/ICCM/2011	15/11/2011	3,697.40	203,139,777	507,850
235	02.199.633.5-121.000	000916/PPH22/ICCM/2011	15/11/2011	5,559.20	306,676,047	766,690
236	02.199.633.5-121.000	000931/PPH22/ICCM/2011	17/11/2011	1,586.80	85,812,160	214,530
237	02.199.633.5-121.000	000938/PPH22/ICCM/2011	21/11/2011	10,853.60	582,308,230	1,455,770
238	02.199.633.5-121.000	000939/PPH22/ICCM/2011	21/11/2011	2,789.40	150,702,914	376,758
239	02.199.633.5-121.000	000940/PPH22/ICCM/2011	21/11/2011	6,367.20	351,030,103	877,575
240	02.199.633.5-121.000	000943/PPH22/ICCM/2011	22/11/2011	10,299.20	569,853,706	1,424,635
241	02.199.633.5-121.000	000946/PPH22/ICCM/2011	22/11/2011	6,996.60	374,376,941	935,942
242	02.199.633.5-121.000	000950/PPH22/ICCM/2011	23/11/2011	1,850.60	101,759,497	254,400
243	02.199.633.5-121.000	000951/PPH22/ICCM/2011	23/11/2011	9,975.60	542,767,408	1,356,920
244	02.199.633.5-121.000	000953/PPH22/ICCM/2011	23/11/2011	5,024.40	270,252,427	675,632
245	02.199.633.5-121.000	000954/PPH22/ICCM/2011	23/11/2011	5,444.60	294,409,123	736,023
246	02.199.633.5-121.000	000957/PPH22/ICCM/2011	23/11/2011	5,548.80	303,510,482	758,777
247	02.199.633.5-121.000	000961/PPH22/ICCM/2011	24/11/2011	9,006.60	487,479,703	1,218,700
248	02.199.633.5-121.000	000962/PPH22/ICCM/2011	24/11/2011	1,632.00	88,331,543	220,830
249	02.199.633.5-121.000	000970/PPH22/ICCM/2011	25/11/2011	6,846.20	376,420,507	941,052
250	02.199.633.5-121.000	000975/PPH22/ICCM/2011	28/11/2011	11,521.80	618,836,800	1,547,092
251	02.199.633.5-121.000	000976/PPH22/ICCM/2011	28/11/2011	983.00	52,797,009	131,992
252	02.199.633.5-121.000	000980/PPH22/ICCM/2011	29/11/2011	1,306.80	35,283,600	88,210
253	02.199.633.5-121.000	000981/PPH22/ICCM/2011	29/11/2011	3,862.20	204,960,157	512,400
254	02.199.633.5-121.000	000988/PPH22/ICCM/2011	30/11/2011	5,154.80	276,571,928	691,429
255	02.199.633.5-121.000	000989/PPH22/ICCM/2011	30/11/2011	933.00	49,353,461	123,383
256	02.199.633.5-121.000	000999/PPH22/ICCM/2011	05/12/2011	11,217.40	611,841,866	1,529,605
257	02.199.633.5-121.000	001005/PPH22/ICCM/2011	06/12/2011	3,782.60	201,446,146	503,615
258	02.199.633.5-121.000	001006/PPH22/ICCM/2011	06/12/2011	209.40	11,151,806	27,880
259	02.199.633.5-121.000	001009/PPH22/ICCM/2011	07/12/2011	6,337.20	331,035,049	827,588
260	02.199.633.5-121.000	001010/PPH22/ICCM/2011	08/12/2011	3,602.80	190,054,906	475,137
261	02.199.633.5-121.000	001012/PPH22/ICCM/2011	08/12/2011	1,187.80	33,258,400	83,146
262	02.199.633.5-121.000	001014/PPH22/ICCM/2011	12/12/2011	60.00	3,200,064	8,000
263	02.199.633.5-121.000	001015/PPH22/ICCM/2011	12/12/2011	10,000.00	542,868,000	1,357,170
264	02.199.633.5-121.000	001016/PPH22/ICCM/2011	12/12/2011	69.60	3,778,361	9,446



265	02.199.633.5-121.000	001019/PPH22/ICCM/2011	13/12/2011	6,766.40	373,505,280	933,763
266	02.199.633.5-121.000	001022/PPH22/ICCM/2011	14/12/2011	3,233.60	178,569,093	446,423
267	02.199.633.5-121.000	001023/PPH22/ICCM/2011	14/12/2011	9,970.00	548,179,513	1,370,449
268	02.199.633.5-121.000	001026/PPH22/ICCM/2011	16/12/2011	5,030.00	282,496,118	706,240
269	02.199.633.5-121.000	001027/PPH22/ICCM/2011	16/12/2011	1,916.00	108,076,770	270,192
270	02.199.633.5-121.000	001028/PPH22/ICCM/2011	16/12/2011	10,538.80	552,957,663	1,382,394
271	02.199.633.5-121.000	001030/PPH22/ICCM/2011	19/12/2011	2,545.20	137,655,870	344,140
272	02.199.633.5-121.000	001031/PPH22/ICCM/2011	19/12/2011	5,000.00	268,071,000	670,178
273	02.199.633.5-121.000	001032/PPH22/ICCM/2011	19/12/2011	438.80	23,525,911	58,815
	JUMLAH			1,767,633.30	97,392,338,746	243,480,860

Adapun rincian pembelian kopi oleh PT INCO CAFCO kepada CV LORIN JAYAPRIMA dalam kurun waktu tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No	NPWP	Bukti Pemungutan	Tanggal	Qty	Nilai Objek Pajak	PPH yang di pungut
1	02.199.633.5-121.000	000004/PPH22/ICCM/2012	05/01/2012	10,000.00	560,430,000	1,401,075
2	02.199.633.5-121.000	000005/PPH22/ICCM/2012	05/01/2012	4,081.60	232,655,282	581,638
3	02.199.633.5-121.000	000006/PPH22/ICCM/2012	05/01/2012	2,075.60	118,259,386	295,648
4	02.199.633.5-121.000	000007/PPH22/ICCM/2012	05/01/2012	5,918.40	334,396,702	835,992
5	02.199.633.5-121.000	000011/PPH22/ICCM/2012	05/01/2012	7,495	425,686,020	1,064,215
6	02.199.633.5-121.000	000012/PPH22/ICCM/2012	05/01/2012	429.4	24,846,802	62,117
7	02.199.633.5-121.000	000013/PPH22/ICCM/2012	05/01/2012	13,000	755,707,680	1,889,270
8	02.199.633.5-121.000	000014/PPH22/ICCM/2012	05/01/2012	43.4	2,562,766	6,407
9	02.199.633.5-121.000	000015/PPH22/ICCM/2012	06/01/2012	8,323.20	485,982,076	1,214,955
10	02.199.633.5-121.000	000016/PPH22/ICCM/2012	06/01/2012	6,633.40	386,346,463	965,866
11	02.199.633.5-121.000	000017/PPH22/ICCM/2012	06/01/2012	831.6	48,434,546	121,086
12	02.199.633.5-121.000	000022/PPH22/ICCM/2012	10/01/2012	9,930	562,670,342	1,406,676
13	02.199.633.5-121.000	000023/PPH22/ICCM/2012	10/01/2012	6,000	174,000,000	435,000
14	02.199.633.5-121.000	000024/PPH22/ICCM/2012	10/01/2012	266.2	7,719,800	19,300
15	02.199.633.5-121.000	000025/PPH22/ICCM/2012	10/01/2012	70	4,013,374	10,033
16	02.199.633.5-121.000	000026/PPH22/ICCM/2012	10/01/2012	4,011.80	232,079,421	580,198
17	02.199.633.5-121.000	000033/PPH22/ICCM/2012	11/01/2012	6,986	403,405,173	1,008,513
18	02.199.633.5-121.000	000049/PPH22/ICCM/2012	17/01/2012	1,002.20	56,965,048	142,412
19	02.199.633.5-121.000	000050/PPH22/ICCM/2012	17/01/2012	11,492.60	691,233,920	1,728,085
20	02.199.633.5-121.000	000055/PPH22/ICCM/2012	17/01/2012	8,507.40	517,913,497	1,294,784



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	02.199.633.5-121.000	000057/PPH22/ICCM/2012	17/01/2012	2,031.40	123,667,569	309,169
22	02.199.633.5-121.000	000058/PPH22/ICCM/2012	17/01/2012	2,968.60	178,658,066	446,645
23	02.199.633.5-121.000	000059/PPH22/ICCM/2012	17/01/2012	5,115.40	306,344,016	765,860
24	02.199.633.5-121.000	000061/PPH22/ICCM/2012	18/01/2012	6,457.60	389,310,881	973,277
25	02.199.633.5-121.000	000063/PPH22/ICCM/2012	19/01/2012	13,363.20	806,279,363	2,015,698
26	02.199.633.5-121.000	000079/PPH22/ICCM/2012	25/01/2012	63.8	3,832,384	9,580
27	02.199.633.5-121.000	000080/PPH22/ICCM/2012	25/01/2012	1,622.80	95,552,411	238,881
28	02.199.633.5-121.000	000081/PPH22/ICCM/2012	25/01/2012	4,760.80	279,018,586	697,546
29	02.199.633.5-121.000	000082/PPH22/ICCM/2012	26/01/2012	9,960	592,975,572	1,482,438
30	02.199.633.5-121.000	000091/PPH22/ICCM/2012	30/01/2012	3,982	231,147,932	577,870
31	02.199.633.5-121.000	000096/PPH22/ICCM/2012	31/01/2012	4,674.40	275,901,785	689,755
32	02.199.633.5-121.000	000097/PPH22/ICCM/2012	31/01/2012	1,114.20	66,869,827	167,175
33	02.199.633.5-121.000	000101/PPH22/ICCM/2012	01/02/2012	2,365.20	142,951,505	357,379
34	02.199.633.5-121.000	000102/PPH22/ICCM/2012	02/02/2012	7,185.60	430,164,148	1,075,410
35	02.199.633.5-121.000	000116/PPH22/ICCM/2012	03/02/2012	3,007.80	184,209,703	460,524
36	02.199.633.5-121.000	000117/PPH22/ICCM/2012	03/02/2012	4,127.80	253,217,414	633,044
37	02.199.633.5-121.000	000118/PPH22/ICCM/2012	03/02/2012	1,992.20	120,503,397	301,258
38	02.199.633.5-121.000	000119/PPH22/ICCM/2012	03/02/2012	4,335	260,064,453	650,161
39	02.199.633.5-121.000	000124/PPH22/ICCM/2012	07/02/2012	872.2	52,172,300	130,431
40	02.199.633.5-121.000	000125/PPH22/ICCM/2012	07/02/2012	5,000	298,595,000	746,488
41	02.199.633.5-121.000	000126/PPH22/ICCM/2012	07/02/2012	3,000	177,891,000	444,728
42	02.199.633.5-121.000	000127/PPH22/ICCM/2012	07/02/2012	1,836.20	109,423,749	273,559
43	02.199.633.5-121.000	000135/PPH22/ICCM/2012	08/02/2012	4,501.40	272,062,365	680,156
44	02.199.633.5-121.000	000136/PPH22/ICCM/2012	08/02/2012	4,880.20	290,705,218	726,763
45	02.199.633.5-121.000	000141/PPH22/ICCM/2012	08/02/2012	2,964	178,784,034	446,960
46	02.199.633.5-121.000	000146/PPH22/ICCM/2012	09/02/2012	818.2	48,857,586	122,144
47	02.199.633.5-121.000	000147/PPH22/ICCM/2012	09/02/2012	3,553	211,110,022	527,775
48	02.199.633.5-121.000	000155/PPH22/ICCM/2012	13/02/2012	1,447	85,976,978	214,942
49	02.199.633.5-121.000	000156/PPH22/ICCM/2012	13/02/2012	5,399.20	318,674,822	796,687
50	02.199.633.5-121.000	000157/PPH22/ICCM/2012	13/02/2012	2,595	154,172,324	385,431
51	02.199.633.5-121.000	000160/PPH22/ICCM/2012	14/02/2012	5,459	330,855,251	827,138
52	02.199.633.5-121.000	000163/PPH22/ICCM/2012	15/02/2012	3,203.60	193,471,875	483,680
53	02.199.633.5-121.000	000164/PPH22/ICCM/2012	15/02/2012	3,343.20	193,725,736	484,314
54	02.199.633.5-121.000	000175/PPH22/ICCM/2012	16/02/2012	4,391.20	259,124,712	647,812



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	02.199.633.5-121.000	000176/PPH22/ICCM/2012	16/02/2012	1,786.40	105,064,079	262,660
56	02.199.633.5-121.000	000177/PPH22/ICCM/2012	16/02/2012	1,197.60	71,437,439	178,594
57	02.199.633.5-121.000	000178/PPH22/ICCM/2012	17/02/2012	2,016	118,736,392	296,841
58	02.199.633.5-121.000	000179/PPH22/ICCM/2012	17/02/2012	778.4	43,928,825	109,822
59	02.199.633.5-121.000	000180/PPH22/ICCM/2012	17/02/2012	3,543.20	201,807,208	504,518
60	02.199.633.5-121.000	000187/PPH22/ICCM/2012	20/02/2012	678.4	38,036,565	95,091
61	02.199.633.5-121.000	000188/PPH22/ICCM/2012	20/02/2012	4,800.60	268,220,803	670,552
62	02.199.633.5-121.000	000195/PPH22/ICCM/2012	21/02/2012	199.4	11,505,290	28,763
63	02.199.633.5-121.000	000196/PPH22/ICCM/2012	21/02/2012	5,000	288,497,750	721,244
64	02.199.633.5-121.000	000197/PPH22/ICCM/2012	21/02/2012	90	5,192,960	12,982
65	02.199.633.5-121.000	000210/PPH22/ICCM/2012	28/02/2012	10,568.80	602,117,218	1,505,293
66	02.199.633.5-121.000	000214/PPH22/ICCM/2012	28/02/2012	4,431.20	248,141,883	620,355
67	02.199.633.5-121.000	000215/PPH22/ICCM/2012	28/02/2012	10,518.80	586,980,596	1,467,451
68	02.199.633.5-121.000	000216/PPH22/ICCM/2012	28/02/2012	3,592.80	202,332,125	505,830
69	02.199.633.5-121.000	000218/PPH22/ICCM/2012	29/02/2012	5,089.80	286,637,177	716,593
70	02.199.633.5-121.000	000219/PPH22/ICCM/2012	29/02/2012	3,962	231,344,349	578,360
71	02.199.633.5-121.000	000220/PPH22/ICCM/2012	29/02/2012	4,760.40	288,939,047	722,348
72	02.199.633.5-121.000	000221/PPH22/ICCM/2012	2/15/2012	608.80	35,395,632	88,489
73	02.199.633.5-121.000	000223/PPH22/ICCM/2012	01/03/2012	4,041.80	249,548,331	623,871
74	02.199.633.5-121.000	000232/PPH22/ICCM/2012	08/03/2012	1,836.60	106,884,610	267,211
75	02.199.633.5-121.000	000233/PPH22/ICCM/2012	08/03/2012	159.40	9,276,601	23,192
76	02.199.633.5-121.000	000234/PPH22/ICCM/2012	09/03/2012	1,197.80	73,343,534	183,360
77	02.199.633.5-121.000	000235/PPH22/ICCM/2012	09/03/2012	8,782.20	504,565,493	1,261,415
78	02.199.633.5-121.000	000236/PPH22/ICCM/2012	09/03/2012	7,485.00	426,423,444	1,066,058
79	02.199.633.5-121.000	000242/PPH22/ICCM/2012	13/03/2012	4,790.40	273,455,194	683,638
80	02.199.633.5-121.000	000243/PPH22/ICCM/2012	14/03/2012	4,980.00	284,278,320	710,696
81	02.199.633.5-121.000	000245/PPH22/ICCM/2012	15/03/2012	13,283.20	741,093,637	1,852,734
82	02.199.633.5-121.000	000246/PPH22/ICCM/2012	15/03/2012	4,980.00	251,006,940	627,517
83	02.199.633.5-121.000	000250/PPH22/ICCM/2012	19/03/2012	9,530.80	522,131,535	1,305,329
84	02.199.633.5-121.000	000253/PPH22/ICCM/2012	19/03/2012	5,000.00	294,325,000	735,812
85	02.199.633.5-121.000	000254/PPH22/ICCM/2012	19/03/2012	20.00	1,119,890	2,800
86	02.199.633.5-121.000	000255/PPH22/ICCM/2012	19/03/2012	269.40	15,783,930	39,460
87	02.199.633.5-121.000	000259/PPH22/ICCM/2012	19/03/2012	5,000.00	251,685,000	629,213
88	02.199.633.5-121.000	000287/PPH22/ICCM/2012	28/03/2012	879.00	49,153,328	122,883



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	02.199.633.5-121.000	000288/PPH22/ICCM/2012	28/03/2012	7,200.00	346,231,800	865,580
90	02.199.633.5-121.000	000289/PPH22/ICCM/2012	28/03/2012	94.60	4,563,551	11,409
91	02.199.633.5-121.000	000304/PPH22/ICCM/2012	29/03/2012	6,526.20	297,239,042	743,098
92	02.199.633.5-121.000	000305/PPH22/ICCM/2012	29/03/2012	1,557.60	74,556,860	186,392
93	02.199.633.5-121.000	000306/PPH22/ICCM/2012	29/03/2012	2,405.20	120,724,204	301,812
94	02.199.633.5-121.000	000307/PPH22/ICCM/2012	29/03/2012	2,095.80	99,972,804	249,932
95	02.199.633.5-121.000	000308/PPH22/ICCM/2012	29/03/2012	3,283.40	162,093,250	405,233
96	02.199.633.5-121.000	000347/PPH22/ICCM/2012	09/04/2012	1,037.20	50,853,657	127,134
97	02.199.633.5-121.000	000348/PPH22/ICCM/2012	09/04/2012	4,651.40	216,999,671	542,499
98	02.199.633.5-121.000	000360/PPH22/ICCM/2012	11/04/2012	5,348.60	250,596,512	626,491
99	02.199.633.5-121.000	000361/PPH22/ICCM/2012	11/04/2012	2,625.40	124,051,804	310,129
100	02.199.633.5-121.000	000374/PPH22/ICCM/2012	12/04/2012	3,193.60	149,686,044	374,215
101	02.199.633.5-121.000	000375/PPH22/ICCM/2012	12/04/2012	3,882.20	189,199,017	472,997
102	02.199.633.5-121.000	000381/PPH22/ICCM/2012	13/04/2012	298.80	13,781,403	34,454
103	02.199.633.5-121.000	000382/PPH22/ICCM/2012	13/04/2012	4,471.60	204,938,794	512,346
104	02.199.633.5-121.000	000383/PPH22/ICCM/2012	13/04/2012	2,884.20	145,119,100	362,797
105	02.199.633.5-121.000	000384/PPH22/ICCM/2012	13/04/2012	6,387.20	305,902,170	764,755
106	02.199.633.5-121.000	000385/PPH22/ICCM/2012	13/04/2012	4,032.40	186,869,481	467,173
107	02.199.633.5-121.000	000386/PPH22/ICCM/2012	13/04/2012	2,644.20	123,058,953	307,647
108	02.199.633.5-121.000	000394/PPH22/ICCM/2012	16/04/2012	5,888.20	280,758,208	701,895
109	02.199.633.5-121.000	000395/PPH22/ICCM/2012	16/04/2012	8,463.00	412,677,038	1,031,692
110	02.199.633.5-121.000	000396/PPH22/ICCM/2012	16/04/2012	3,393.20	168,512,080	421,280
111	02.199.633.5-121.000	000397/PPH22/ICCM/2012	16/04/2012	5,668.60	279,966,485	699,916
112	02.199.633.5-121.000	000400/PPH22/ICCM/2012	17/04/2012	2,295.40	108,153,510	270,383
113	02.199.633.5-121.000	000401/PPH22/ICCM/2012	17/04/2012	3,592.80	179,894,191	449,735
114	02.199.633.5-121.000	000407/PPH22/ICCM/2012	19/04/2012	3,093.80	147,880,546	369,701
115	02.199.633.5-121.000	000408/PPH22/ICCM/2012	19/04/2012	6,147.60	285,686,657	714,216
116	02.199.633.5-121.000	000409/PPH22/ICCM/2012	19/04/2012	3,992.00	193,532,160	483,830
117	02.199.633.5-121.000	000420/PPH22/ICCM/2012	20/04/2012	2,834.60	134,158,783	335,396
118	02.199.633.5-121.000	000425/PPH22/ICCM/2012	20/04/2012	9,061.80	416,790,242	1,041,975
119	02.199.633.5-121.000	000426/PPH22/ICCM/2012	20/04/2012	5,848.20	283,427,165	708,567
120	02.199.633.5-121.000	000427/PPH22/ICCM/2012	20/04/2012	3,034.40	142,958,473	357,396
121	02.199.633.5-121.000	000428/PPH22/ICCM/2012	20/04/2012	857.80	40,760,083	101,900
122	02.199.633.5-121.000	000433/PPH22/ICCM/2012	23/04/2012	7,055.60	320,324,592	800,811



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123	02.199.633.5-121.000	000434/PPH22/ICCM/2012	23/04/2012	7,375.40	323,346,755	808,366
124	02.199.633.5-121.000	000435/PPH22/ICCM/2012	23/04/2012	7,624.60	335,644,423	839,111
125	02.199.633.5-121.000	000436/PPH22/ICCM/2012	23/04/2012	838.40	36,702,377	91,755
126	02.199.633.5-121.000	000445/PPH22/ICCM/2012	25/04/2012	8,942.20	404,565,248	1,011,413
127	02.199.633.5-121.000	000446/PPH22/ICCM/2012	25/04/2012	2,943.80	132,142,472	330,356
128	02.199.633.5-121.000	000447/PPH22/ICCM/2012	25/04/2012	3,353.40	164,859,012	412,147
129	02.199.633.5-121.000	000448/PPH22/ICCM/2012	25/04/2012	219.40	10,284,513	25,711
130	02.199.633.5-121.000	000452/PPH22/ICCM/2012	25/04/2012	4,002.00	190,127,016	475,317
131	02.199.633.5-121.000	000458/PPH22/ICCM/2012	26/04/2012	688.20	31,854,713	79,636
132	02.199.633.5-121.000	000459/PPH22/ICCM/2012	27/04/2012	13,990.00	617,926,128	1,544,815
133	02.199.633.5-121.000	000460/PPH22/ICCM/2012	27/04/2012	1,916.60	90,911,525	227,278
134	02.199.633.5-121.000	000469/PPH22/ICCM/2012	30/04/2012	3,782.40	176,401,680	441,004
135	02.199.633.5-121.000	000470/PPH22/ICCM/2012	30/04/2012	311.00	14,182,340	35,455
136	02.199.633.5-121.000	000471/PPH22/ICCM/2012	30/04/2012	6,066.20	273,593,203	683,983
137	02.199.633.5-121.000	000473/PPH22/ICCM/2012	26/04/2012	7,366.00	315,767,161	789,417
138	02.199.633.5-121.000	000489/PPH22/ICCM/2012	02/05/2012	2,365.20	102,708,100	256,772
139	02.199.633.5-121.000	000490/PPH22/ICCM/2012	02/05/2012	1,568.60	72,704,610	181,762
140	02.199.633.5-121.000	000491/PPH22/ICCM/2012	02/05/2012	128.00	5,998,720	14,997
141	02.199.633.5-121.000	000492/PPH22/ICCM/2012	02/05/2012	5,708.60	273,507,589	683,769
142	02.199.633.5-121.000	000494/PPH22/ICCM/2012	03/05/2012	4,163.40	189,434,700	473,587
143	02.199.633.5-121.000	000495/PPH22/ICCM/2012	03/05/2012	1,215.80	53,738,360	134,346
144	02.199.633.5-121.000	000496/PPH22/ICCM/2012	03/05/2012	2,934.40	133,072,692	332,682
145	02.199.633.5-121.000	000507/PPH22/ICCM/2012	07/05/2012	849.80	37,241,890	93,105
146	02.199.633.5-121.000	000508/PPH22/ICCM/2012	07/05/2012	10,000.00	439,234,500	1,098,087
147	02.199.633.5-121.000	000509/PPH22/ICCM/2012	07/05/2012	2,303.80	101,190,844	252,977
148	02.199.633.5-121.000	000510/PPH22/ICCM/2012	07/05/2012	5,059.80	223,700,842	559,252
149	02.199.633.5-121.000	000511/PPH22/ICCM/2012	07/05/2012	7,636.40	332,964,451	832,411
150	02.199.633.5-121.000	000512/PPH22/ICCM/2012	07/05/2012	4,329.40	186,428,034	466,070
151	02.199.633.5-121.000	000538/PPH22/ICCM/2012	10/05/2012	6,487.00	290,137,562	725,343
152	02.199.633.5-121.000	000539/PPH22/ICCM/2012	10/05/2012	3,503.00	155,673,320	389,183
153	02.199.633.5-121.000	000555/PPH22/ICCM/2012	16/05/2012	5,988.00	266,647,436	666,619
154	02.199.633.5-121.000	000565/PPH22/ICCM/2012	22/05/2012	1,696.60	42,415,000	106,038
155	02.199.633.5-121.000	000570/PPH22/ICCM/2012	23/05/2012	1,596.80	71,548,456	178,872
156	02.199.633.5-121.000	000571/PPH22/ICCM/2012	23/05/2012	3,333.60	146,668,733	366,672



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157	02.199.633.5-121.000	000584/PPH22/ICCM/2012	18/06/2012	5,000	198,005,000	495,013
158	02.199.633.5-121.000	000585/PPH22/ICCM/2012	18/06/2012	2,235.40	87,970,233	219,926
159	02.199.633.5-121.000	000593/PPH22/ICCM/2012	22/06/2012	2,764.60	109,398,318	273,496
160	02.199.633.5-121.000	000594/PPH22/ICCM/2012	22/06/2012	1,027.80	40,415,408	101,039
161	02.199.633.5-121.000	000595/PPH22/ICCM/2012	22/06/2012	3,972.20	155,882,038	389,705
162	02.199.633.5-121.000	000596/PPH22/ICCM/2012	22/06/2012	5,000	197,458,125	493,645
163	02.199.633.5-121.000	000597/PPH22/ICCM/2012	22/06/2012	468.6	18,505,775	46,264
164	02.199.633.5-121.000	000620/PPH22/ICCM/2012	06/07/2012	8,263.40	350,859,667	877,149
165	02.199.633.5-121.000	000661/PPH22/ICCM/2012	26/07/2012	3,736.60	164,522,675	411,307
166	02.199.633.5-121.000	000662/PPH22/ICCM/2012	26/07/2012	4,826.20	218,685,378	546,713
167	02.199.633.5-121.000	000670/PPH22/ICCM/2012	27/07/2012	4,960	215,610,332	539,026
168	02.199.633.5-121.000	000708/PPH22/ICCM/2012	15/08/2012	213.8	9,283,383	23,209
169	02.199.633.5-121.000	000709/PPH22/ICCM/2012	15/08/2012	5,335	226,444,742	566,112
170	02.199.633.5-121.000	000723/PPH22/ICCM/2012	23/08/2012	6,008	265,006,872	662,517
171	02.199.633.5-121.000	000727/PPH22/ICCM/2012	24/08/2012	5,848.20	248,443,817	621,109
172	02.199.633.5-121.000	000728/PPH22/ICCM/2012	24/08/2012	165	7,172,475	17,931
173	02.199.633.5-121.000	000729/PPH22/ICCM/2012	24/08/2012	4,336	188,483,969	471,209
174	02.199.633.5-121.000	000730/PPH22/ICCM/2012	24/08/2012	3,143.80	138,464,741	346,161
175	02.199.633.5-121.000	000731/PPH22/ICCM/2012	24/08/2012	2,864.20	124,990,108	312,475
176	02.199.633.5-121.000	000739/PPH22/ICCM/2012	27/08/2012	664	28,335,204	70,838
177	02.199.633.5-121.000	000740/PPH22/ICCM/2012	27/08/2012	3,028.60	128,052,539	320,131
178	02.199.633.5-121.000	000741/PPH22/ICCM/2012	27/08/2012	4,107.20	169,355,340	423,388
179	02.199.633.5-121.000	000742/PPH22/ICCM/2012	27/08/2012	404.2	16,666,690	41,666
180	02.199.633.5-121.000	000747/PPH22/ICCM/2012	28/08/2012	6,966	285,382,217	713,455
181	02.199.633.5-121.000	000748/PPH22/ICCM/2012	29/08/2012	3,034	123,890,356	309,725
182	02.199.633.5-121.000	000749/PPH22/ICCM/2012	29/08/2012	1,946	79,462,964	198,657
183	02.199.633.5-121.000	000752/PPH22/ICCM/2012	31/08/2012	9,121	366,632,276	916,580
184	02.199.633.5-121.000	000756/PPH22/ICCM/2012	03/09/2012	3,562.80	154,295,961	385,740
185	02.199.633.5-121.000	000757/PPH22/ICCM/2012	03/09/2012	2,774.40	119,415,378	298,538
186	02.199.633.5-121.000	000758/PPH22/ICCM/2012	03/09/2012	4,541.80	183,317,267	458,293
187	02.199.633.5-121.000	000759/PPH22/ICCM/2012	03/09/2012	846.80	34,178,753	85,447
188	02.199.633.5-121.000	000760/PPH22/ICCM/2012	03/09/2012	4,620.60	183,827,106	459,567
189	02.199.633.5-121.000	000767/PPH22/ICCM/2012	04/09/2012	4,532.60	181,356,691	453,392
190	02.199.633.5-121.000	000768/PPH22/ICCM/2012	04/09/2012	3,431.40	135,357,595	338,394



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191	02.199.633.5-121.000	000773/PPH22/ICCM/2012	04/09/2012	3,402.80	130,750,531	326,876
192	02.199.633.5-121.000	000786/PPH22/ICCM/2012	07/09/2012	2,495.00	96,595,422	241,489
193	02.199.633.5-121.000	000787/PPH22/ICCM/2012	07/09/2012	2,544.60	101,791,379	254,478
194	02.199.633.5-121.000	000788/PPH22/ICCM/2012	07/09/2012	670.80	26,628,117	66,570
195	02.199.633.5-121.000	000789/PPH22/ICCM/2012	07/09/2012	2,502.80	99,588,414	248,971
196	02.199.633.5-121.000	000802/PPH22/ICCM/2012	10/09/2012	4,952.60	201,321,704	503,304
197	02.199.633.5-121.000	000803/PPH22/ICCM/2012	10/09/2012	5,000.00	199,861,025	499,653
198	02.199.633.5-121.000	000804/PPH22/ICCM/2012	10/09/2012	17.40	668,571	1,671
199	02.199.633.5-121.000	000805/PPH22/ICCM/2012	10/09/2012	4,301.40	164,891,244	412,228
200	02.199.633.5-121.000	000806/PPH22/ICCM/2012	10/09/2012	681.20	26,203,935	65,510
201	02.199.633.5-121.000	000807/PPH22/ICCM/2012	10/09/2012	2,322.80	88,226,541	220,566
202	02.199.633.5-121.000	000812/PPH22/ICCM/2012	12/09/2012	2,677.20	106,247,573	265,619
203	02.199.633.5-121.000	000813/PPH22/ICCM/2012	12/09/2012	1,734.00	69,693,414	174,234
204	02.199.633.5-121.000	000853/PPH22/ICCM/2012	20/09/2012	3,266.00	124,940,569	312,351
205	02.199.633.5-121.000	000854/PPH22/ICCM/2012	20/09/2012	2,602.20	106,066,401	265,166
206	02.199.633.5-121.000	000894/PPH22/ICCM/2012	25/09/2012	2,375.20	97,456,831	243,642
207	02.199.633.5-121.000	000898/PPH22/ICCM/2012	26/09/2012	2,022.60	83,245,968	208,115
208	02.199.633.5-121.000	000899/PPH22/ICCM/2012	26/09/2012	2,667.40	107,059,433	267,649
209	02.199.633.5-121.000	000909/PPH22/ICCM/2012	27/09/2012	2,332.60	95,045,869	237,615
210	02.199.633.5-121.000	000910/PPH22/ICCM/2012	27/09/2012	840.60	34,334,753	85,837
211	02.199.633.5-121.000	000918/PPH22/ICCM/2012	28/09/2012	2,744.20	110,431,602	276,080
212	02.199.633.5-121.000	000921/PPH22/ICCM/2012	01/10/2012	6,415.20	252,456,051	631,141
213	02.199.633.5-121.000	000922/PPH22/ICCM/2012	01/10/2012	949.2	36,676,158	91,692
214	02.199.633.5-121.000	000927/PPH22/ICCM/2012	01/10/2012	7,135.60	290,024,036	725,060
215	02.199.633.5-121.000	000928/PPH22/ICCM/2012	01/10/2012	2,764.40	106,802,483	267,006
216	02.199.633.5-121.000	000934/PPH22/ICCM/2012	02/10/2012	4,002	157,623,012	394,059
217	02.199.633.5-121.000	000935/PPH22/ICCM/2012	02/10/2012	148.8	5,803,254	14,510
218	02.199.633.5-121.000	000936/PPH22/ICCM/2012	02/10/2012	3,184.80	127,879,529	319,700
219	02.199.633.5-121.000	000942/PPH22/ICCM/2012	02/10/2012	1,815.20	74,851,043	187,128
220	02.199.633.5-121.000	000943/PPH22/ICCM/2012	02/10/2012	4,512	180,714,173	451,786
221	02.199.633.5-121.000	000962/PPH22/ICCM/2012	05/10/2012	488	19,668,166	49,170
222	02.199.633.5-121.000	000963/PPH22/ICCM/2012	05/10/2012	1,508	61,376,656	153,441
223	02.199.633.5-121.000	000964/PPH22/ICCM/2012	05/10/2012	2,265.40	91,423,162	228,557
224	02.199.633.5-121.000	000965/PPH22/ICCM/2012	08/10/2012	1,226.60	50,773,390	126,933



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225	02.199.633.5-121.000	000966/PPH22/ICCM/2012	08/10/2012	1,458	60,646,268	151,615
226	02.199.633.5-121.000	000975/PPH22/ICCM/2012	08/10/2012	3,542	142,749,117	356,872
227	02.199.633.5-121.000	000976/PPH22/ICCM/2012	08/10/2012	5,000	203,954,700	509,886
228	02.199.633.5-121.000	000977/PPH22/ICCM/2012	08/10/2012	2,584.80	117,121,837	292,804
229	02.199.633.5-121.000	000978/PPH22/ICCM/2012	08/10/2012	200.4	8,056,886	20,142
230	02.199.633.5-121.000	000980/PPH22/ICCM/2012	09/10/2012	7,524	303,422,756	758,556
231	02.199.633.5-121.000	000981/PPH22/ICCM/2012	09/10/2012	2,275.60	91,217,039	228,042
232	02.199.633.5-121.000	000982/PPH22/ICCM/2012	09/10/2012	3,762	146,763,144	366,907
233	02.199.633.5-121.000	000983/PPH22/ICCM/2012	09/10/2012	1,238	48,420,656	121,051
234	02.199.633.5-121.000	000984/PPH22/ICCM/2012	09/10/2012	5,069.20	198,266,550	495,666
235	02.199.633.5-121.000	001001/PPH22/ICCM/2012	11/10/2012	2,774.40	107,990,746	269,977
236	02.199.633.5-121.000	001002/PPH22/ICCM/2012	11/10/2012	2,156.40	86,540,645	216,352
237	02.199.633.5-121.000	001003/PPH22/ICCM/2012	11/10/2012	997.2	39,419,336	98,549
238	02.199.633.5-121.000	001010/PPH22/ICCM/2012	15/10/2012	3,002.80	117,363,837	293,410
239	02.199.633.5-121.000	001011/PPH22/ICCM/2012	15/10/2012	4,931.20	194,691,666	486,730
240	02.199.633.5-121.000	001012/PPH22/ICCM/2012	15/10/2012	3,552.80	147,391,395	368,479
241	02.199.633.5-121.000	001013/PPH22/ICCM/2012	15/10/2012	2,365.20	99,147,079	247,868
242	02.199.633.5-121.000	001017/PPH22/ICCM/2012	16/10/2012	68.8	2,635,830	6,590
243	02.199.633.5-121.000	001018/PPH22/ICCM/2012	16/10/2012	5,000	189,632,200	474,081
244	02.199.633.5-121.000	001019/PPH22/ICCM/2012	16/10/2012	909.2	34,832,798	87,082
245	02.199.633.5-121.000	001034/PPH22/ICCM/2012	17/10/2012	4,090.80	163,253,437	408,134
246	02.199.633.5-121.000	001035/PPH22/ICCM/2012	17/10/2012	2,406.20	94,818,982	237,048
247	02.199.633.5-121.000	001036/PPH22/ICCM/2012	18/10/2012	2,593.80	102,089,245	255,224
248	02.199.633.5-121.000	001037/PPH22/ICCM/2012	18/10/2012	3,993.40	157,975,909	394,940
249	02.199.633.5-121.000	001041/PPH22/ICCM/2012	18/10/2012	3,007	116,163,417	290,409
250	02.199.633.5-121.000	001042/PPH22/ICCM/2012	18/10/2012	2,282.40	85,939,207	214,849
251	02.199.633.5-121.000	001047/PPH22/ICCM/2012	19/10/2012	2,095.80	77,622,145	194,056
252	02.199.633.5-121.000	001063/PPH22/ICCM/2012	22/10/2012	2,621.80	100,232,725	250,581
253	02.199.633.5-121.000	001064/PPH22/ICCM/2012	22/10/2012	2,637	100,028,266	250,070
254	02.199.633.5-121.000	001065/PPH22/ICCM/2012	23/10/2012	1,197.40	47,273,855	118,184
255	02.199.633.5-121.000	001066/PPH22/ICCM/2012	23/10/2012	2,385.20	93,689,273	234,223
256	02.199.633.5-121.000	001067/PPH22/ICCM/2012	23/10/2012	3,417.40	132,722,316	331,805
257	02.199.633.5-121.000	001068/PPH22/ICCM/2012	23/10/2012	2,363	87,206,562	218,016
258	02.199.633.5-121.000	001069/PPH22/ICCM/2012	23/10/2012	5,000	188,389,500	470,973



259	02.199.633.5-121.000	001070/PPH22/ICCM/2012	23/10/2012	1,025.80	38,352,682	95,881
260	02.199.633.5-121.000	001080/PPH22/ICCM/2012	24/10/2012	2,974.20	110,520,498	276,301
261	02.199.633.5-121.000	001081/PPH22/ICCM/2012	24/10/2012	1,197.40	44,495,073	111,237
262	02.199.633.5-121.000	001082/PPH22/ICCM/2012	24/10/2012	2,802.60	107,267,553	268,168
263	02.199.633.5-121.000	001083/PPH22/ICCM/2012	24/10/2012	1,967.80	73,953,860	184,884
264	02.199.633.5-121.000	001087/PPH22/ICCM/2012	25/10/2012	2,032.20	73,053,526	182,634
265	02.199.633.5-121.000	001088/PPH22/ICCM/2012	25/10/2012	961.8	34,574,786	86,436
266	02.199.633.5-121.000	001101/PPH22/ICCM/2012	30/10/2012	3,263.40	120,890,695	302,226
267	02.199.633.5-121.000	001116/PPH22/ICCM/2012	05/11/2012	415.2	17,527,087	43,819
268	02.199.633.5-121.000	001117/PPH22/ICCM/2012	05/11/2012	2,249.40	85,013,374	212,534
269	02.199.633.5-121.000	001118/PPH22/ICCM/2012	05/11/2012	1,750.60	65,773,071	164,434
270	02.199.633.5-121.000	001119/PPH22/ICCM/2012	05/11/2012	7,690.40	277,563,263	693,909
271	02.199.633.5-121.000	001127/PPH22/ICCM/2012	06/11/2012	2,309.60	104,082,876	260,207
272	02.199.633.5-121.000	001128/PPH22/ICCM/2012	06/11/2012	2,840	88,034,446	220,086
273	02.199.633.5-121.000	001144/PPH22/ICCM/2012	12/11/2012	160	5,875,589	14,688
274	02.199.633.5-121.000	001145/PPH22/ICCM/2012	12/11/2012	5,000	182,663,250	456,658
275	02.199.633.5-121.000	001146/PPH22/ICCM/2012	12/11/2012	1,157.20	42,275,583	105,689
276	02.199.633.5-121.000	001149/PPH22/ICCM/2012	12/11/2012	921.6	36,162,497	90,406
277	02.199.633.5-121.000	001150/PPH22/ICCM/2012	12/11/2012	1,842.80	69,947,436	174,868
278	02.199.633.5-121.000	001156/PPH22/ICCM/2012	13/11/2012	3,078.40	115,671,434	289,178
279	02.199.633.5-121.000	001157/PPH22/ICCM/2012	13/11/2012	1,000	35,875,800	89,689
280	02.199.633.5-121.000	001158/PPH22/ICCM/2012	13/11/2012	402.6	13,745,489	34,363
281	02.199.633.5-121.000	001159/PPH22/ICCM/2012	14/11/2012	3,597.40	124,293,767	310,734
282	02.199.633.5-121.000	001160/PPH22/ICCM/2012	14/11/2012	3,338.60	124,736,773	311,842
283	02.199.633.5-121.000	001162/PPH22/ICCM/2012	16/11/2012	1,661.40	61,690,939	154,227
284	02.199.633.5-121.000	001163/PPH22/ICCM/2012	16/11/2012	2,620	93,543,825	233,859
285	02.199.633.5-121.000	001175/PPH22/ICCM/2012	19/11/2012	2,380	82,172,475	205,431
286	02.199.633.5-121.000	001176/PPH22/ICCM/2012	19/11/2012	4,755.60	166,382,275	415,956
287	02.199.633.5-121.000	001177/PPH22/ICCM/2012	20/11/2012	244.4	8,439,279	21,098
288	02.199.633.5-121.000	001178/PPH22/ICCM/2012	20/11/2012	6,102.80	205,187,731	512,969
289	02.199.633.5-121.000	001186/PPH22/ICCM/2012	21/11/2012	897.2	30,739,866	76,849
290	02.199.633.5-121.000	001187/PPH22/ICCM/2012	21/11/2012	4,292.40	151,040,971	377,602
291	02.199.633.5-121.000	001190/PPH22/ICCM/2012	22/11/2012	4,740.40	167,777,925	419,444
292	02.199.633.5-121.000	001203/PPH22/ICCM/2012	27/11/2012	967.2	34,537,358	86,343



293	02.199.633.5-121.000	001204/PPH22/ICCM/2012	27/11/2012	6,088.60	211,693,925	529,234
294	02.199.633.5-121.000	001215/PPH22/ICCM/2012	28/11/2012	3,911.40	143,303,526	358,260
295	02.199.633.5-121.000	001216/PPH22/ICCM/2012	28/11/2012	1,368	49,713,585	124,285
296	02.199.633.5-121.000	001220/PPH22/ICCM/2012	30/11/2012	4,632	163,466,615	408,667
297	02.199.633.5-121.000	001221/PPH22/ICCM/2012	30/11/2012	1,266.20	45,293,898	113,235
298	02.199.633.5-121.000	001226/PPH22/ICCM/2012	04/12/2012	3,733.80	131,494,130	328,735
299	02.199.633.5-121.000	001227/PPH22/ICCM/2012	04/12/2012	1,994.60	70,621,964	176,555
300	02.199.633.5-121.000	001228/PPH22/ICCM/2012	04/12/2012	4,005.40	146,041,931	365,105
301	02.199.633.5-121.000	001229/PPH22/ICCM/2012	04/12/2012	2,311.80	82,262,745	205,657
302	02.199.633.5-121.000	001235/PPH22/ICCM/2012	10/12/2012	688.2	24,458,662	61,147
303	02.199.633.5-121.000	001236/PPH22/ICCM/2012	10/12/2012	4,641	168,330,578	420,826
304	02.199.633.5-121.000	001237/PPH22/ICCM/2012	11/12/2012	3,570.40	122,570,403	306,426
305	02.199.633.5-121.000	001240/PPH22/ICCM/2012	13/12/2012	1,788.60	65,972,422	164,930
306	02.199.633.5-121.000	001241/PPH22/ICCM/2012	13/12/2012	107.6	4,027,421	10,069
307	02.199.633.5-121.000	001250/PPH22/ICCM/2012	17/12/2012	2,385.20	87,933,594	219,834
308	02.199.633.5-121.000	001251/PPH22/ICCM/2012	17/12/2012	4,780.40	168,628,419	421,571
309	02.199.633.5-121.000	001252/PPH22/ICCM/2012	17/12/2012	2,375.20	81,675,195	204,188
310	02.199.633.5-121.000	001270/PPH22/ICCM/2012	28/12/2012	6,000	220,404,525	551,011
311	02.199.633.5-121.000	001271/PPH22/ICCM/2012	28/12/2012	2,291	84,948,539	212,371
312	02.199.633.5-121.000	001272/PPH22/ICCM/2012	28/12/2012	2,709	100,585,170	251,463
313	02.199.633.5-121.000	001273/PPH22/ICCM/2012	28/12/2012	2,291	84,612,358	211,530
314	02.199.633.5-121.000	001275/PPH22/ICCM/2012	28/12/2012	1,307.40	46,779,530	116,949
315	02.199.633.5-121.000	001276/PPH22/ICCM/2012	28/12/2012	351.6	13,106,407	32,766
JUMLAH				1,109,542.40	52,216,920,862	130,542,275

Adapun rincian pembelian kopi oleh PT INCO CAFCO kepada CV LORIN JAYAPRIMA dalam kurun waktu tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No	NPWP	Bukti Pemungutan	Tanggal	Qty	Nilai Objek Pajak	PPH yang di pungut
1	02.199.633.5-121.000	000001/PPH22/ICCM/2013	03/01/2013	1,401.60	49,814,575	124,536
2	02.199.633.5-121.000	000002/PPH22/ICCM/2013	03/01/2013	3,408.80	123,096,540	307,741
3	02.199.633.5-121.000	000003/PPH22/ICCM/2013	03/01/2013	1,591.20	57,369,761	143,424
4	02.199.633.5-121.000	000004/PPH22/ICCM/2013	03/01/2013	7,301.00	268,242,755	670,607
5	02.199.633.5-121.000	000005/PPH22/ICCM/2013	04/01/2013	993.00	35,808,652	89,522
6	02.199.633.5-121.000	000006/PPH22/ICCM/2013	04/01/2013	2,699.00	100,191,468	250,480
7	02.199.633.5-121.000	000013/PPH22/ICCM/2013	07/01/2013	4,007.00	140,225,686	350,564
8	02.199.633.5-121.000	000014/PPH22/ICCM/2013	07/01/2013	763.40	27,286,771	68,217
9	02.199.633.5-121.000	000060/PPH22/ICCM/2013	25/01/2013	3,083.80	107,870,522	269,676
10	02.199.633.5-121.000	000065/PPH22/ICCM/2013	28/01/2013	1,152.80	40,522,811	101,307
11	02.199.633.5-121.000	000066/PPH22/ICCM/2013	28/01/2013	5,803.20	207,196,060	517,990
12	02.199.633.5-121.000	000067/PPH22/ICCM/2013	28/01/2013	196.80	7,269,320	18,173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	02.199.633.5-121.000	000068/PPH22/ICCM/2013	28/01/2013	2,897.00	104,801,872	262,005
14	02.199.633.5-121.000	000108/PPH22/ICCM/2013	11/02/2013	1,103.00	38,778,833	96,947
15	02.199.633.5-121.000	000109/PPH22/ICCM/2013	11/02/2013	5,000.00	185,040,000	462,600
16	02.199.633.5-121.000	000110/PPH22/ICCM/2013	11/02/2013	3,258.20	117,564,979	293,912
17	02.199.633.5-121.000	000133/PPH22/ICCM/2013	19/02/2013	1,741.80	61,816,482	154,541
18	02.199.633.5-121.000	000134/PPH22/ICCM/2013	19/02/2013	1,432.00	52,124,800	130,312
19	02.199.633.5-121.000	000136/PPH22/ICCM/2013	20/02/2013	3,612.80	135,971,341	339,928
20	02.199.633.5-121.000	000137/PPH22/ICCM/2013	20/02/2013	4,955.20	183,718,995	459,297
21	02.199.633.5-121.000	000138/PPH22/ICCM/2013	20/02/2013	3,000.00	109,837,650	274,594
22	02.199.633.5-121.000	000139/PPH22/ICCM/2013	20/02/2013	1,056.80	39,573,736	98,934
23	02.199.633.5-121.000	000140/PPH22/ICCM/2013	21/02/2013	4,760.60	178,115,183	445,288
24	02.199.633.5-121.000	000141/PPH22/ICCM/2013	22/02/2013	4,182.60	155,458,877	388,647
25	02.199.633.5-121.000	000142/PPH22/ICCM/2013	22/02/2013	1,382.80	52,159,216	130,398
26	02.199.633.5-121.000	000147/PPH22/ICCM/2013	25/02/2013	3,373.40	127,037,184	317,593
27	02.199.633.5-121.000	000148/PPH22/ICCM/2013	25/02/2013	3,642.80	144,814,414	362,036
28	02.199.633.5-121.000	000149/PPH22/ICCM/2013	26/02/2013	2,994.20	118,170,894	295,427
29	02.199.633.5-121.000	000151/PPH22/ICCM/2013	26/02/2013	1,597.00	61,430,521	153,576
30	02.199.633.5-121.000	000152/PPH22/ICCM/2013	26/02/2013	4,171.80	157,976,054	394,940
31	02.199.633.5-121.000	000153/PPH22/ICCM/2013	26/02/2013	2,838.00	109,329,977	273,325
32	02.199.633.5-121.000	000154/PPH22/ICCM/2013	26/02/2013	1,952.60	73,845,184	184,613
33	02.199.633.5-121.000	000163/PPH22/ICCM/2013	01/03/2013	3,047.40	115,555,960	288,890
34	02.199.633.5-121.000	000166/PPH22/ICCM/2013	04/03/2013	2,731.20	100,992,746	252,482
35	02.199.633.5-121.000	000180/PPH22/ICCM/2013	06/03/2013	7,268.80	268,981,217	672,453
36	02.199.633.5-121.000	000181/PPH22/ICCM/2013	06/03/2013	1,483.80	56,656,529	141,641
37	02.199.633.5-121.000	000196/PPH22/ICCM/2013	13/03/2013	3,516.20	138,048,473	345,121
38	02.199.633.5-121.000	000197/PPH22/ICCM/2013	13/03/2013	4,088.60	156,557,809	391,395
39	02.199.633.5-121.000	000213/PPH22/ICCM/2013	15/03/2013	4,780.60	170,346,881	425,867
40	02.199.633.5-121.000	000214/PPH22/ICCM/2013	15/03/2013	1,130.80	43,983,201	109,958
41	02.199.633.5-121.000	000215/PPH22/ICCM/2013	15/03/2013	4,338.40	168,744,888	421,862
42	02.199.633.5-121.000	000218/PPH22/ICCM/2013	19/03/2013	9,680.60	356,816,267	892,041
43	02.199.633.5-121.000	000219/PPH22/ICCM/2013	19/03/2013	5,661.60	212,898,807	532,247
44	02.199.633.5-121.000	000220/PPH22/ICCM/2013	19/03/2013	1,673.80	62,144,846	155,362
45	02.199.633.5-121.000	000221/PPH22/ICCM/2013	19/03/2013	3,645.60	132,126,387	330,316
46	02.199.633.5-121.000	000222/PPH22/ICCM/2013	19/03/2013	456.40	16,329,102	40,823
47	02.199.633.5-121.000	000228/PPH22/ICCM/2013	20/03/2013	5,768.60	208,721,216	521,803
48	02.199.633.5-121.000	000229/PPH22/ICCM/2013	21/03/2013	7,265.60	252,983,833	632,460
49	02.199.633.5-121.000	000232/PPH22/ICCM/2013	22/03/2013	1,509.40	53,462,948	133,657
50	02.199.633.5-121.000	000233/PPH22/ICCM/2013	22/03/2013	5,000.00	175,950,000	439,875
51	02.199.633.5-121.000	000234/PPH22/ICCM/2013	22/03/2013	1,035.60	36,680,952	91,702
52	02.199.633.5-121.000	000235/PPH22/ICCM/2013	25/03/2013	7,784.40	272,306,875	680,767
53	02.199.633.5-121.000	000236/PPH22/ICCM/2013	25/03/2013	1,180.00	41,341,300	103,353
54	02.199.633.5-121.000	000237/PPH22/ICCM/2013	25/03/2013	3,331.00	113,670,375	284,176
55	02.199.633.5-121.000	000242/PPH22/ICCM/2013	26/03/2013	6,669.00	230,055,491	575,139
56	02.199.633.5-121.000	000243/PPH22/ICCM/2013	26/03/2013	4,428.80	146,665,912	366,665
57	02.199.633.5-121.000	000255/PPH22/ICCM/2013	28/03/2013	571.20	19,436,337	48,591
58	02.199.633.5-121.000	000256/PPH22/ICCM/2013	28/03/2013	4,119.60	134,337,684	335,844
59	02.199.633.5-121.000	000259/PPH22/ICCM/2013	28/03/2013	2,395.20	72,850,487	182,126
60	02.199.633.5-121.000	000263/PPH22/ICCM/2013	02/04/2013	880.40	27,348,569	68,371
61	02.199.633.5-121.000	000264/PPH22/ICCM/2013	02/04/2013	1,924.20	60,292,728	150,732
62	02.199.633.5-121.000	000274/PPH22/ICCM/2013	08/04/2013	680.60	21,425,342	53,563
63	02.199.633.5-121.000	000275/PPH22/ICCM/2013	08/04/2013	5,587.00	175,879,206	439,698
64	02.199.633.5-121.000	000277/PPH22/ICCM/2013	09/04/2013	2,006.20	65,347,551	163,369
65	02.199.633.5-121.000	000278/PPH22/ICCM/2013	09/04/2013	2,406.80	75,866,764	189,667
66	02.199.633.5-121.000	000279/PPH22/ICCM/2013	09/04/2013	2,293.80	70,227,072	175,568
67	02.199.633.5-121.000	000287/PPH22/ICCM/2013	12/04/2013	2,405.40	73,408,045	183,520
68	02.199.633.5-121.000	000289/PPH22/ICCM/2013	16/04/2013	3,383.40	106,120,341	265,301
69	02.199.633.5-121.000	000312/PPH22/ICCM/2013	22/04/2013	300.80	9,465,514	23,664



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	02.199.633.5-121.000	000313/PPH22/ICCM/2013	22/04/2013	1,616.60	51,171,856	127,930
71	02.199.633.5-121.000	000314/PPH22/ICCM/2013	22/04/2013	1,056.80	32,074,514	80,186
72	02.199.633.5-121.000	000315/PPH22/ICCM/2013	22/04/2013	7,634.80	225,274,393	563,186
73	02.199.633.5-121.000	000316/PPH22/ICCM/2013	22/04/2013	1,308.40	39,459,067	98,648
74	02.199.633.5-121.000	000317/PPH22/ICCM/2013	22/04/2013	787.60	24,335,532	60,839
75	02.199.633.5-121.000	000326/PPH22/ICCM/2013	25/04/2013	4,212.40	132,041,469	330,104
76	02.199.633.5-121.000	000327/PPH22/ICCM/2013	25/04/2013	877.60	27,591,524	68,979
77	02.199.633.5-121.000	000335/PPH22/ICCM/2013	29/04/2013	2,585.00	80,405,778	201,014
78	02.199.633.5-121.000	000337/PPH22/ICCM/2013	29/04/2013	1,537.40	46,084,794	115,212
79	02.199.633.5-121.000	000338/PPH22/ICCM/2013	29/04/2013	2,444.80	71,534,750	178,837
80	02.199.633.5-121.000	000340/PPH22/ICCM/2013	30/04/2013	2,555.20	78,190,806	195,477
81	02.199.633.5-121.000	000341/PPH22/ICCM/2013	30/04/2013	4,610.60	141,303,132	353,258
82	02.199.633.5-121.000	000342/PPH22/ICCM/2013	30/04/2013	5,389.40	166,230,384	415,575
83	02.199.633.5-121.000	000343/PPH22/ICCM/2013	30/04/2013	968.00	29,856,943	74,642
84	02.199.633.5-121.000	000345/PPH22/ICCM/2013	30/04/2013	2,375.40	70,217,180	175,542
85	02.199.633.5-121.000	000347/PPH22/ICCM/2013	30/04/2013	6,387.40	196,845,296	492,113
86	02.199.633.5-121.000	000355/PPH22/ICCM/2013	02/05/2013	269.20	8,106,588	20,266
87	02.199.633.5-121.000	000356/PPH22/ICCM/2013	02/05/2013	2,505.40	74,870,747	187,176
88	02.199.633.5-121.000	000357/PPH22/ICCM/2013	02/05/2013	4,760.60	149,954,139	374,885
89	02.199.633.5-121.000	000358/PPH22/ICCM/2013	02/05/2013	3,253.80	95,615,841	239,039
90	02.199.633.5-121.000	000359/PPH22/ICCM/2013	02/05/2013	5,579.00	168,665,946	421,665
91	02.199.633.5-121.000	000363/PPH22/ICCM/2013	03/05/2013	2,034.80	58,730,127	146,825
92	02.199.633.5-121.000	000364/PPH22/ICCM/2013	03/05/2013	1,947.40	57,437,395	143,593
93	02.199.633.5-121.000	000365/PPH22/ICCM/2013	03/05/2013	2,734.00	85,451,854	213,629
94	02.199.633.5-121.000	000366/PPH22/ICCM/2013	03/05/2013	1,746.20	53,234,461	133,086
95	02.199.633.5-121.000	000367/PPH22/ICCM/2013	03/05/2013	2,386.20	72,745,431	181,863
96	02.199.633.5-121.000	000369/PPH22/ICCM/2013	07/05/2013	4,351.40	138,896,688	347,242
97	02.199.633.5-121.000	000370/PPH22/ICCM/2013	07/05/2013	2,575.00	74,127,040	185,317
98	02.199.633.5-121.000	000371/PPH22/ICCM/2013	07/05/2013	1,126.20	33,721,131	84,302
99	02.199.633.5-121.000	000372/PPH22/ICCM/2013	07/05/2013	1,259.20	37,703,470	94,258
100	02.199.633.5-121.000	000378/PPH22/ICCM/2013	07/05/2013	8,503.20	268,782,751	671,957
101	02.199.633.5-121.000	000382/PPH22/ICCM/2013	08/05/2013	3,213.80	98,579,793	246,449
102	02.199.633.5-121.000	000383/PPH22/ICCM/2013	08/05/2013	3,293.60	104,389,466	260,973
103	02.199.633.5-121.000	000384/PPH22/ICCM/2013	08/05/2013	237.60	7,352,675	18,381
104	02.199.633.5-121.000	000385/PPH22/ICCM/2013	08/05/2013	4,563.00	144,734,892	361,837
105	02.199.633.5-121.000	000389/PPH22/ICCM/2013	10/05/2013	3,929.60	120,384,082	300,960
106	02.199.633.5-121.000	000390/PPH22/ICCM/2013	10/05/2013	1,050.60	31,890,963	79,727
107	02.199.633.5-121.000	000398/PPH22/ICCM/2013	13/05/2013	2,714.60	78,802,123	197,005
108	02.199.633.5-121.000	000399/PPH22/ICCM/2013	13/05/2013	6,234.80	192,702,081	481,755
109	02.199.633.5-121.000	000400/PPH22/ICCM/2013	13/05/2013	930.80	28,768,701	71,921
110	02.199.633.5-121.000	000408/PPH22/ICCM/2013	14/05/2013	6,357.40	184,424,995	461,062
111	02.199.633.5-121.000	000411/PPH22/ICCM/2013	14/05/2013	2,711.80	79,284,897	198,212
112	02.199.633.5-121.000	000412/PPH22/ICCM/2013	14/05/2013	1,050.60	30,905,416	77,263
113	02.199.633.5-121.000	000423/PPH22/ICCM/2013	15/05/2013	4,760.60	136,632,981	341,582
114	02.199.633.5-121.000	000427/PPH22/ICCM/2013	16/05/2013	4,188.80	126,508,965	316,272
115	02.199.633.5-121.000	000428/PPH22/ICCM/2013	16/05/2013	2,547.80	78,359,831	195,900



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11						
6	02.199.633.5-121.000	000429/PPH22/ICCM/2013	16/05/2013	3,452.20	102,473,793	256,184
11						
7	02.199.633.5-121.000	000430/PPH22/ICCM/2013	16/05/2013	3,703.60	108,945,838	272,365
11						
8	02.199.633.5-121.000	000439/PPH22/ICCM/2013	20/05/2013	5,539.00	164,672,808	411,682
11						
9	02.199.633.5-121.000	000443/PPH22/ICCM/2013	21/05/2013	3,183.60	95,466,932	238,667
12						
0	02.199.633.5-121.000	000445/PPH22/ICCM/2013	21/05/2013	2,573.80	79,779,821	199,500
12						
1	02.199.633.5-121.000	000446/PPH22/ICCM/2013	21/05/2013	2,027.60	62,849,314	157,123
12						
2	02.199.633.5-121.000	000449/PPH22/ICCM/2013	22/05/2013	1,567.00	47,253,512	118,134
12						
3	02.199.633.5-121.000	000450/PPH22/ICCM/2013	22/05/2013	2,595.00	82,797,056	206,993
12						
4	02.199.633.5-121.000	000451/PPH22/ICCM/2013	22/05/2013	4,940.20	161,190,920	402,977
12						
5	02.199.633.5-121.000	000452/PPH22/ICCM/2013	22/05/2013	7,915.00	257,551,340	643,878
12						
6	02.199.633.5-121.000	000465/PPH22/ICCM/2013	24/05/2013	955.20	29,425,414	73,563
12						
7	02.199.633.5-121.000	000466/PPH22/ICCM/2013	24/05/2013	2,418.20	74,493,860	186,234
12						
8	02.199.633.5-121.000	000467/PPH22/ICCM/2013	24/05/2013	4,691.20	139,498,931	348,747
12						
9	02.199.633.5-121.000	000468/PPH22/ICCM/2013	24/05/2013	2,425.80	74,167,622	185,419
13						
0	02.199.633.5-121.000	000491/PPH22/ICCM/2013	29/05/2013	3,882.40	108,796,495	271,991
13						
1	02.199.633.5-121.000	000492/PPH22/ICCM/2013	29/05/2013	2,439.40	69,712,661	174,281
13						
2	02.199.633.5-121.000	000493/PPH22/ICCM/2013	29/05/2013	1,742.40	48,032,741	120,081
13						
3	02.199.633.5-121.000	000440/PPH22/ICCM/2013	20/05/2013	3,078.80	87,123,544	217,809
13						
4	02.199.633.5-121.000	000473/PPH22/ICCM/2013	24/05/2013	2,210.80	63,767,939	159,420
13						
5	02.199.633.5-121.000	000474/PPH22/ICCM/2013	24/05/2013	1,657.00	50,126,421	125,316
13						
6	02.199.633.5-121.000	000475/PPH22/ICCM/2013	24/05/2013	1,132.20	34,745,108	86,862
13						
7	02.199.633.5-121.000	000476/PPH22/ICCM/2013	24/05/2013	464.80	14,848,798	37,122
13						
8	02.199.633.5-121.000	000484/PPH22/ICCM/2013	27/05/2013	4,192.20	119,308,377	298,270
13						
9	02.199.633.5-121.000	000487/PPH22/ICCM/2013	28/05/2013	5,289.60	155,211,939	388,029
14						
0	02.199.633.5-121.000	000488/PPH22/ICCM/2013	28/05/2013	3,173.80	87,006,553	217,516
14						
1	02.199.633.5-121.000	000495/PPH22/ICCM/2013	29/05/2013	3,802.40	104,645,090	261,612
14						
2	02.199.633.5-121.000	000503/PPH22/ICCM/2013	31/05/2013	2,399.00	69,990,825	174,977
14						
3	02.199.633.5-121.000	000504/PPH22/ICCM/2013	31/05/2013	3,269.80	94,442,451	236,106
14						
4	02.199.633.5-121.000	000510/PPH22/ICCM/2013	03/06/2013	2,415.20	65,849,462	164,624
14						
5	02.199.633.5-121.000	000511/PPH22/ICCM/2013	03/06/2013	2,026.20	54,112,184	135,280
14						
6	02.199.633.5-121.000	000512/PPH22/ICCM/2013	03/06/2013	3,383.40	90,759,840	226,900
14						
7	02.199.633.5-121.000	000513/PPH22/ICCM/2013	03/06/2013	1,387.40	38,238,964	95,597
14						
8	02.199.633.5-121.000	000514/PPH22/ICCM/2013	03/06/2013	4,281.40	118,154,834	295,387
14						
9	02.199.633.5-121.000	000520/PPH22/ICCM/2013	04/06/2013	3,236.60	87,292,947	218,232



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15						
0	02.199.633.5-121.000	000521/PPH22/ICCM/2013	04/06/2013	735.60	20,039,861	50,100
15						
1	02.199.633.5-121.000	000523/PPH22/ICCM/2013	05/06/2013	2,684.80	72,457,383	181,143
15						
2	02.199.633.5-121.000	000526/PPH22/ICCM/2013	07/06/2013	1,597.00	43,531,026	108,828
15						
3	02.199.633.5-121.000	000540/PPH22/ICCM/2013	10/06/2013	471.40	13,098,320	32,746
15						
4	02.199.633.5-121.000	000541/PPH22/ICCM/2013	10/06/2013	1,015.80	27,472,352	68,681
15						
5	02.199.633.5-121.000	000542/PPH22/ICCM/2013	10/06/2013	4,511.20	117,592,729	293,982
15						
6	02.199.633.5-121.000	000544/PPH22/ICCM/2013	12/06/2013	2,365.40	61,105,946	152,765
15						
7	02.199.633.5-121.000	000545/PPH22/ICCM/2013	12/06/2013	3,562.80	97,424,766	243,562
15						
8	02.199.633.5-121.000	000546/PPH22/ICCM/2013	12/06/2013	4,151.80	111,393,832	278,485
15						
9	02.199.633.5-121.000	000555/PPH22/ICCM/2013	17/06/2013	948.40	25,564,122	63,910
16						
0	02.199.633.5-121.000	000556/PPH22/ICCM/2013	17/06/2013	848.20	22,482,177	56,205
16						
1	02.199.633.5-121.000	000557/PPH22/ICCM/2013	17/06/2013	2,866.40	76,491,174	191,228
16						
2	02.199.633.5-121.000	000558/PPH22/ICCM/2013	17/06/2013	133.60	3,587,396	8,968
16						
3	02.199.633.5-121.000	000559/PPH22/ICCM/2013	17/06/2013	3,439.40	92,664,934	231,662
16						
4	02.199.633.5-121.000	000560/PPH22/ICCM/2013	17/06/2013	107.60	2,823,015	7,058
16						
5	02.199.633.5-121.000	000563/PPH22/ICCM/2013	18/06/2013	1,567.00	44,305,734	110,764
16						
6	02.199.633.5-121.000	000565/PPH22/ICCM/2013	21/06/2013	4,630.80	129,078,758	322,696
16						
7	02.199.633.5-121.000	000566/PPH22/ICCM/2013	21/06/2013	2,369.20	66,390,232	165,976
16						
8	02.199.633.5-121.000	000567/PPH22/ICCM/2013	21/06/2013	1,004.20	27,238,292	68,096
16						
9	02.199.633.5-121.000	000572/PPH22/ICCM/2013	21/06/2013	808.60	20,786,349	51,966
17						
0	02.199.633.5-121.000	000576/PPH22/ICCM/2013	25/06/2013	166.20	4,266,969	10,667
17						
1	02.199.633.5-121.000	000577/PPH22/ICCM/2013	25/06/2013	2,385.40	65,330,381	163,326
17						
2	02.199.633.5-121.000	000578/PPH22/ICCM/2013	25/06/2013	8,187.20	208,021,278	520,053
17						
3	02.199.633.5-121.000	000582/PPH22/ICCM/2013	26/06/2013	3,213.60	82,545,204	206,363
17						
4	02.199.633.5-121.000	000583/PPH22/ICCM/2013	26/06/2013	2,395.40	61,151,448	152,879
17						
5	02.199.633.5-121.000	000594/PPH22/ICCM/2013	03/07/2013	1,053.00	25,834,302	64,586
17						
6	02.199.633.5-121.000	000595/PPH22/ICCM/2013	03/07/2013	544.00	12,932,294	32,331
17						
7	02.199.633.5-121.000	000602/PPH22/ICCM/2013	05/07/2013	4,890.40	128,817,733	322,044
17						
8	02.199.633.5-121.000	000604/PPH22/ICCM/2013	08/07/2013	1,352.00	34,815,136	87,038
17						
9	02.199.633.5-121.000	000605/PPH22/ICCM/2013	08/07/2013	9,147.00	243,087,013	607,718
18						
0	02.199.633.5-121.000	000615/PPH22/ICCM/2013	12/07/2013	2,395.40	63,304,913	158,262
18						
1	02.199.633.5-121.000	000616/PPH22/ICCM/2013	15/07/2013	457.60	11,608,946	29,023
18						
2	02.199.633.5-121.000	000617/PPH22/ICCM/2013	15/07/2013	7,197.20	179,439,151	448,598
18						
3	02.199.633.5-121.000	000619/PPH22/ICCM/2013	15/07/2013	2,802.80	71,085,034	177,713



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18						
4	02.199.633.5-121.000	000620/PPH22/ICCM/2013	15/07/2013	1,967.80	50,783,212	126,958
18						
5	02.199.633.5-121.000	000624/PPH22/ICCM/2013	18/07/2013	1,527.20	41,179,726	102,949
18						
6	02.199.633.5-121.000	000633/PPH22/ICCM/2013	19/07/2013	3,652.60	98,288,252	245,721
18						
7	02.199.633.5-121.000	000638/PPH22/ICCM/2013	22/07/2013	1,620.80	44,578,192	111,446
18						
8	02.199.633.5-121.000	000639/PPH22/ICCM/2013	22/07/2013	1,379.20	36,024,677	90,062
18						
9	02.199.633.5-121.000	000640/PPH22/ICCM/2013	22/07/2013	1,505.00	40,860,449	102,151
19						
0	02.199.633.5-121.000	000641/PPH22/ICCM/2013	22/07/2013	1,433.40	41,684,849	104,212
19						
1	02.199.633.5-121.000	000643/PPH22/ICCM/2013	23/07/2013	5,202.90	65,816,685	164,542
19						
2	02.199.633.5-121.000	000644/PPH22/ICCM/2013	23/07/2013	5,718.60	156,248,736	390,622
19						
3	02.199.633.5-121.000	000645/PPH22/ICCM/2013	23/07/2013	2,505.00	67,800,957	169,503
19						
4	02.199.633.5-121.000	000647/PPH22/ICCM/2013	24/07/2013	343.00	9,215,930	23,040
19						
5	02.199.633.5-121.000	000648/PPH22/ICCM/2013	24/07/2013	3,557.90	97,216,060	243,040
19						
6	02.199.633.5-121.000	000649/PPH22/ICCM/2013	25/07/2013	2,389.00	61,262,202	153,156
19						
7	02.199.633.5-121.000	000655/PPH22/ICCM/2013	25/07/2013	3,988.60	105,440,915	263,603
19						
8	02.199.633.5-121.000	000656/PPH22/ICCM/2013	25/07/2013	5,675.40	151,703,438	379,255
19						
9	02.199.633.5-121.000	000657/PPH22/ICCM/2013	26/07/2013	766.70	20,427,188	51,068
20						
0	02.199.633.5-121.000	000658/PPH22/ICCM/2013	26/07/2013	5,570.70	146,935,959	367,340
20						
1	02.199.633.5-121.000	000664/PPH22/ICCM/2013	26/07/2013	5,179.70	128,130,239	320,326
20						
2	02.199.633.5-121.000	000665/PPH22/ICCM/2013	26/07/2013	429.30	10,875,929	27,190
20						
3	02.199.633.5-121.000	000669/PPH22/ICCM/2013	29/07/2013	5,069.10	63,363,750	158,410
20						
4	02.199.633.5-121.000	000672/PPH22/ICCM/2013	29/07/2013	2,784.60	71,854,376	179,636
20						
5	02.199.633.5-121.000	000673/PPH22/ICCM/2013	29/07/2013	2,035.70	51,301,676	128,255
20						
6	02.199.633.5-121.000	000674/PPH22/ICCM/2013	29/07/2013	1,148.10	29,232,578	73,082
20						
7	02.199.633.5-121.000	000679/PPH22/ICCM/2013	02/08/2013	3,851.90	101,698,750	254,247
20						
8	02.199.633.5-121.000	000680/PPH22/ICCM/2013	02/08/2013	948.70	24,791,334	61,978
20						
9	02.199.633.5-121.000	000682/PPH22/ICCM/2013	05/08/2013	4,830.60	127,003,237	317,508
21						
0	02.199.633.5-121.000	000687/PPH22/ICCM/2013	12/08/2013	2,605.00	76,719,725	191,799
21						
1	02.199.633.5-121.000	000688/PPH22/ICCM/2013	12/08/2013	2,894.40	74,447,615	186,119
21						
2	02.199.633.5-121.000	000691/PPH22/ICCM/2013	13/08/2013	7,485.20	223,454,850	558,637
21						
3	02.199.633.5-121.000	000692/PPH22/ICCM/2013	13/08/2013	1,986.20	52,175,051	130,438
21						
4	02.199.633.5-121.000	000693/PPH22/ICCM/2013	13/08/2013	1,735.10	49,744,276	124,361
21						
5	02.199.633.5-121.000	000694/PPH22/ICCM/2013	13/08/2013	2,237.10	64,799,794	161,999
21						
6	02.199.633.5-121.000	000695/PPH22/ICCM/2013	15/08/2013	5,292.70	67,601,011	169,003
21						
7	02.199.633.5-121.000	000698/PPH22/ICCM/2013	16/08/2013	3,972.20	101,953,663	254,884



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21						
8	02.199.633.5-121.000	000707/PPH22/ICCM/2013	20/08/2013	1,305.50	33,951,721	84,879
21						
9	02.199.633.5-121.000	000708/PPH22/ICCM/2013	20/08/2013	700.70	18,347,269	45,868
22						
0	02.199.633.5-121.000	000709/PPH22/ICCM/2013	20/08/2013	3,613.00	90,095,033	225,238
22						
1	02.199.633.5-121.000	000710/PPH22/ICCM/2013	20/08/2013	3,513.20	90,062,639	225,157
22						
2	02.199.633.5-121.000	000713/PPH22/ICCM/2013	23/08/2013	4,694.00	58,675,000	146,688
22						
3	02.199.633.5-121.000	000714/PPH22/ICCM/2013	27/08/2013	2,585.00	75,578,808	188,947
22						
4	02.199.633.5-121.000	000715/PPH22/ICCM/2013	27/08/2013	3,912.40	108,248,479	270,621
22						
5	02.199.633.5-121.000	000716/PPH22/ICCM/2013	30/08/2013	675.70	18,083,354	45,208
22						
6	02.199.633.5-121.000	000717/PPH22/ICCM/2013	30/08/2013	951.30	25,459,071	63,648
22						
7	02.199.633.5-121.000	000720/PPH22/ICCM/2013	30/08/2013	4,241.50	53,018,750	132,547
22						
8	02.199.633.5-121.000	000721/PPH22/ICCM/2013	02/09/2013	2,295.40	67,253,843	168,135
22						
9	02.199.633.5-121.000	000722/PPH22/ICCM/2013	02/09/2013	1,467.40	38,487,628	96,219
23						
0	02.199.633.5-121.000	000723/PPH22/ICCM/2013	02/09/2013	2,295.40	67,497,134	168,743
23						
1	02.199.633.5-121.000	000724/PPH22/ICCM/2013	03/09/2013	3,193.80	88,111,832	220,280
23						
2	02.199.633.5-121.000	000729/PPH22/ICCM/2013	04/09/2013	305.50	8,832,906	22,082
23						
3	02.199.633.5-121.000	000730/PPH22/ICCM/2013	04/09/2013	1,281.50	37,051,945	92,630
23						
4	02.199.633.5-121.000	000732/PPH22/ICCM/2013	04/09/2013	1,786.60	47,170,707	117,927
23						
5	02.199.633.5-121.000	000735/PPH22/ICCM/2013	04/09/2013	2,648.90	70,468,952	176,172
23						
6	02.199.633.5-121.000	000736/PPH22/ICCM/2013	04/09/2013	3,718.50	98,923,627	247,309
23						
7	02.199.633.5-121.000	000737/PPH22/ICCM/2013	04/09/2013	5,000.00	133,015,500	332,539
23						
8	02.199.633.5-121.000	000739/PPH22/ICCM/2013	05/09/2013	1,786.60	51,202,616	128,007
23						
9	02.199.633.5-121.000	000740/PPH22/ICCM/2013	05/09/2013	1,931.90	55,366,805	138,417
24						
0	02.199.633.5-121.000	000741/PPH22/ICCM/2013	05/09/2013	273.70	7,844,037	19,610
24						
1	02.199.633.5-121.000	000743/PPH22/ICCM/2013	06/09/2013	3,802.60	101,968,620	254,922
24						
2	02.199.633.5-121.000	000745/PPH22/ICCM/2013	09/09/2013	1,607.00	40,212,572	100,531
24						
3	02.199.633.5-121.000	000746/PPH22/ICCM/2013	09/09/2013	2,475.20	71,309,769	178,274
24						
4	02.199.633.5-121.000	000748/PPH22/ICCM/2013	10/09/2013	5,309.60	144,509,790	361,274
24						
5	02.199.633.5-121.000	000749/PPH22/ICCM/2013	10/09/2013	164.50	3,997,453	9,994
24						
6	02.199.633.5-121.000	000750/PPH22/ICCM/2013	10/09/2013	2,420.50	58,420,885	146,052
24						
7	02.199.633.5-121.000	000752/PPH22/ICCM/2013	11/09/2013	2,594.80	65,281,146	163,203
24						
8	02.199.633.5-121.000	000753/PPH22/ICCM/2013	11/09/2013	1,894.00	24,622,000	61,555
24						
9	02.199.633.5-121.000	000755/PPH22/ICCM/2013	11/09/2013	3,982.20	105,010,614	262,527
25						
0	02.199.633.5-121.000	000756/PPH22/ICCM/2013	12/09/2013	9,032.00	236,334,609	590,837
25						
1	02.199.633.5-121.000	000757/PPH22/ICCM/2013	12/09/2013	1,587.00	44,546,138	111,365



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25						
2	02.199.633.5-121.000	000758/PPH22/ICCM/2013	12/09/2013	383.50	9,865,691	24,664
25						
3	02.199.633.5-121.000	000759/PPH22/ICCM/2013	12/09/2013	5,000.00	131,700,000	329,250
25						
4	02.199.633.5-121.000	000760/PPH22/ICCM/2013	12/09/2013	425.10	11,756,991	29,392
25						
5	02.199.633.5-121.000	000762/PPH22/ICCM/2013	13/09/2013	1,667.00	48,887,276	122,218
25						
6	02.199.633.5-121.000	000765/PPH22/ICCM/2013	16/09/2013	3,213.80	92,123,577	230,309
25						
7	02.199.633.5-121.000	000766/PPH22/ICCM/2013	16/09/2013	3,998.90	116,721,750	291,804
25						
8	02.199.633.5-121.000	000767/PPH22/ICCM/2013	16/09/2013	671.90	18,963,706	47,409
25						
9	02.199.633.5-121.000	000768/PPH22/ICCM/2013	16/09/2013	4,022.20	112,864,954	282,162
26						
0	02.199.633.5-121.000	000774/PPH22/ICCM/2013	18/09/2013	289.60	8,134,902	20,337
26						
1	02.199.633.5-121.000	000775/PPH22/ICCM/2013	18/09/2013	10,000.00	283,130,600	707,827
26						
2	02.199.633.5-121.000	000776/PPH22/ICCM/2013	18/09/2013	1,783.70	51,931,890	129,830
26						
3	02.199.633.5-121.000	000777/PPH22/ICCM/2013	18/09/2013	711.50	20,327,911	50,820
26						
4	02.199.633.5-121.000	000780/PPH22/ICCM/2013	23/09/2013	4,216.30	120,299,830	300,750
26						
5	02.199.633.5-121.000	000781/PPH22/ICCM/2013	23/09/2013	1,163.10	33,082,286	82,706
26						
6	02.199.633.5-121.000	000786/PPH22/ICCM/2013	24/09/2013	7,155.80	217,214,309	543,036
26						
7	02.199.633.5-121.000	000793/PPH22/ICCM/2013	26/09/2013	2,844.20	87,870,137	219,675
26						
8	02.199.633.5-121.000	000794/PPH22/ICCM/2013	26/09/2013	2,531.00	79,396,964	198,492
26						
9	02.199.633.5-121.000	000795/PPH22/ICCM/2013	26/09/2013	4,997.00	154,215,415	385,539
27						
0	02.199.633.5-121.000	000796/PPH22/ICCM/2013	26/09/2013	2,378.40	73,623,657	184,059
27						
1	02.199.633.5-121.000	000797/PPH22/ICCM/2013	26/09/2013	2,472.00	77,219,842	193,050
27						
2	02.199.633.5-121.000	000798/PPH22/ICCM/2013	27/09/2013	4,201.80	136,145,001	340,363
27						
3	02.199.633.5-121.000	000799/PPH22/ICCM/2013	27/09/2013	947.80	30,600,424	76,501
27						
4	02.199.633.5-121.000	000800/PPH22/ICCM/2013	27/09/2013	5,459.60	176,267,226	440,668
27						
5	02.199.633.5-121.000	000801/PPH22/ICCM/2013	27/09/2013	4,601.00	139,957,359	349,893
27						
6	02.199.633.5-121.000	000804/PPH22/ICCM/2013	01/10/2013	798.60	25,630,077	64,075
27						
7	02.199.633.5-121.000	000805/PPH22/ICCM/2013	01/10/2013	1,597.00	49,054,730	122,637
27						
8	02.199.633.5-121.000	000806/PPH22/ICCM/2013	01/10/2013	4,451.20	143,763,967	359,410
27						
9	02.199.633.5-121.000	000807/PPH22/ICCM/2013	01/10/2013	3,153.80	99,438,052	248,595
28						
0	02.199.633.5-121.000	000810/PPH22/ICCM/2013	02/10/2013	3,682.80	117,421,069	293,553
28						
1	02.199.633.5-121.000	000811/PPH22/ICCM/2013	02/10/2013	1,597.00	50,460,824	126,152
28						
2	02.199.633.5-121.000	000813/PPH22/ICCM/2013	04/10/2013	3,183.80	103,574,108	258,935
28						
3	02.199.633.5-121.000	000814/PPH22/ICCM/2013	04/10/2013	3,972.20	134,012,018	335,030
28						
4	02.199.633.5-121.000	000815/PPH22/ICCM/2013	04/10/2013	7,145.80	240,419,512	601,051
28						
5	02.199.633.5-121.000	000785/PPH22/ICCM/2013	23/09/2013	1,518.40	19,739,200	49,348



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28						
6	02.199.633.5-121.000	000816/PPH22/ICCM/2013	07/10/2013	528.40	17,200,287	43,001
28						
7	02.199.633.5-121.000	000817/PPH22/ICCM/2013	07/10/2013	342.40	11,045,571	27,614
28						
8	02.199.633.5-121.000	000818/PPH22/ICCM/2013	08/10/2013	4,708.20	157,389,382	393,473
28						
9	02.199.633.5-121.000	000819/PPH22/ICCM/2013	08/10/2013	4,002.00	132,697,556	331,744
29						
0	02.199.633.5-121.000	000831/PPH22/ICCM/2013	16/10/2013	1,289.80	43,311,097	108,278
29						
1	02.199.633.5-121.000	000832/PPH22/ICCM/2013	16/10/2013	307.20	10,676,582	26,691
29						
2	02.199.633.5-121.000	000834/PPH22/ICCM/2013	21/10/2013	4,692.80	164,178,781	410,447
29						
3	02.199.633.5-121.000	000835/PPH22/ICCM/2013	21/10/2013	876.20	31,949,319	79,873
29						
4	02.199.633.5-121.000	000839/PPH22/ICCM/2013	21/10/2013	4,211.80	154,204,991	385,512
29						
5	02.199.633.5-121.000	000844/PPH22/ICCM/2013	25/10/2013	5,479.20	201,615,109	504,038
29						
6	02.199.633.5-121.000	000845/PPH22/ICCM/2013	25/10/2013	3,952.20	145,854,439	364,636
29						
7	02.199.633.5-121.000	000852/PPH22/ICCM/2013	29/10/2013	5,568.60	201,726,767	504,317
29						
8	02.199.633.5-121.000	000853/PPH22/ICCM/2013	29/10/2013	4,451.20	150,201,293	375,503
29						
9	02.199.633.5-121.000	000854/PPH22/ICCM/2013	29/10/2013	998.40	35,876,905	89,692
30						
0	02.199.633.5-121.000	000855/PPH22/ICCM/2013	29/10/2013	1,587.00	55,806,538	139,516
30						
1	02.199.633.5-121.000	000874/PPH22/ICCM/2013	13/11/2013	300.00	10,298,580	25,746
30						
2	02.199.633.5-121.000	000875/PPH22/ICCM/2013	13/11/2013	1,297.00	48,495,271	121,238
30						
3	02.199.633.5-121.000	000880/PPH22/ICCM/2013	18/11/2013	8,300.00	320,775,910	801,940
30						
4	02.199.633.5-121.000	000881/PPH22/ICCM/2013	18/11/2013	2,648.20	100,852,725	252,132
30						
5	02.199.633.5-121.000	000883/PPH22/ICCM/2013	20/11/2013	1,407.20	52,885,953	132,215
30						
6	02.199.633.5-121.000	000884/PPH22/ICCM/2013	20/11/2013	9,601.00	353,954,691	884,887
30						
7	02.199.633.5-121.000	000885/PPH22/ICCM/2013	20/11/2013	3,153.80	115,100,076	287,750
30						
8	02.199.633.5-121.000	000886/PPH22/ICCM/2013	20/11/2013	5,379.40	202,885,147	507,213
30						
9	02.199.633.5-121.000	000890/PPH22/ICCM/2013	25/11/2013	3,004.00	119,554,694	298,887
31						
0	02.199.633.5-121.000	000891/PPH22/ICCM/2013	25/11/2013	4,201.60	175,438,984	438,597
31						
1	02.199.633.5-121.000	000892/PPH22/ICCM/2013	25/11/2013	11,616.80	468,139,615	1,170,349
31						
2	02.199.633.5-121.000	000893/PPH22/ICCM/2013	26/11/2013	11,037.80	454,936,724	1,137,342
31						
3	02.199.633.5-121.000	000894/PPH22/ICCM/2013	26/11/2013	1,487.20	61,419,724	153,549
31						
4	02.199.633.5-121.000	000898/PPH22/ICCM/2013	27/11/2013	9,700.60	400,965,182	1,002,413
31						
5	02.199.633.5-121.000	000901/PPH22/ICCM/2013	28/11/2013	3,034.40	118,323,151	295,808
31						
6	02.199.633.5-121.000	000903/PPH22/ICCM/2013	29/11/2013	10,169.60	423,080,733	1,057,702
31						
7	02.199.633.5-121.000	000908/PPH22/ICCM/2013	04/12/2013	748.80	34,002,409	85,006
31						
8	02.199.633.5-121.000	000909/PPH22/ICCM/2013	04/12/2013	589.00	24,764,434	61,911
31						
9	02.199.633.5-121.000	000911/PPH22/ICCM/2013	06/12/2013	13,702.60	660,454,952	1,651,137



32						
0	02.199.633.5-121.000	000912/PPH22/ICCM/2013	09/12/2013	5,678.80	271,114,089	677,785
32						
1	02.199.633.5-121.000	000915/PPH22/ICCM/2013	10/12/2013	10,000.00	478,208,000	1,195,520
32						
2	02.199.633.5-121.000	000916/PPH22/ICCM/2013	10/12/2013	838.40	40,092,959	100,232
32						
3	02.199.633.5-121.000	000917/PPH22/ICCM/2013	10/12/2013	3,343.60	159,722,435	399,306
32						
4	02.199.633.5-121.000	000919/PPH22/ICCM/2013	11/12/2013	10,000.00	477,696,000	1,194,241
32						
5	02.199.633.5-121.000	000920/PPH22/ICCM/2013	11/12/2013	559.00	27,120,444	67,801
32						
6	02.199.633.5-121.000	000922/PPH22/ICCM/2013	12/12/2013	7,155.80	349,381,975	873,455
32						
7	02.199.633.5-121.000	000923/PPH22/ICCM/2013	12/12/2013	2,754.80	135,877,067	339,693
32						
8	02.199.633.5-121.000	000924/PPH22/ICCM/2013	12/12/2013	2,844.20	140,286,610	350,717
32						
9	02.199.633.5-121.000	000927/PPH22/ICCM/2013	13/12/2013	3,393.60	157,360,214	393,401
33						
0	02.199.633.5-121.000	000928/PPH22/ICCM/2013	13/12/2013	2,744.80	138,491,629	346,229
33						
1	02.199.633.5-121.000	000931/PPH22/ICCM/2013	16/12/2013	3,024.00	153,152,496	382,881
33						
2	02.199.633.5-121.000	000932/PPH22/ICCM/2013	16/12/2013	3,902.20	200,818,707	502,047
33						
3	02.199.633.5-121.000	000933/PPH22/ICCM/2013	16/12/2013	8,453.80	431,142,380	1,077,856
33						
4	02.199.633.5-121.000	000934/PPH22/ICCM/2013	16/12/2013	3,861.60	191,566,253	478,916
33						
5	02.199.633.5-121.000	000940/PPH22/ICCM/2013	17/12/2013	3,553.00	182,794,744	456,987
33						
6	02.199.633.5-121.000	000941/PPH22/ICCM/2013	17/12/2013	8,962.20	463,529,465	1,158,824
33						
7	02.199.633.5-121.000	000945/PPH22/ICCM/2013	18/12/2013	1,886.40	89,625,430	224,064
33						
8	02.199.633.5-121.000	000947/PPH22/ICCM/2013	18/12/2013	7,664.80	420,500,892	1,051,252
33						
9	02.199.633.5-121.000	000948/PPH22/ICCM/2013	18/12/2013	6,487.20	337,277,313	843,193
34						
0	02.199.633.5-121.000	000955/PPH22/ICCM/2013	19/12/2013	7,076.00	370,316,092	925,790
34						
1	02.199.633.5-121.000	000956/PPH22/ICCM/2013	20/12/2013	2,395.60	118,740,070	296,850
34						
2	02.199.633.5-121.000	000957/PPH22/ICCM/2013	20/12/2013	6,796.60	333,159,001	832,898
34						
3	02.199.633.5-121.000	000970/PPH22/ICCM/2013	23/12/2013	3,373.60	162,602,122	406,505
	JUMLAH			1,106,104.50	36,861,405,937	92,153,548

Adapun rincian pembelian kopi oleh PT INCO CAFCO kepada CV LORIN JAYAPRIMA dalam kurun waktu tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No	NPWP	Bukti Pemungutan	Tanggal	Qty	Nilai Objek Pajak	PPh yang dipungut
1	02.199.633.5-121.000	000007/PPH22/ICCM/2014	16/01/2014	7,395.40	412,512,453	1,031,280
2	02.199.633.5-121.000	000012/PPH22/ICCM/2014	17/01/2014	6,856.20	366,124,732	915,312
3	02.199.633.5-121.000	000013/PPH22/ICCM/2014	17/01/2014	2,215.60	114,104,250	285,261
4	02.199.633.5-121.000	000016/PPH22/ICCM/2014	20/01/2014	6,377.40	344,355,685	860,889



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	02.199.633.5-121.000	000017/PPH22/ICCM/2014	20/01/2014	2,385.40	127,103,129	317,758
6	02.199.633.5-121.000	000020/PPH22/ICCM/2014	22/01/2014	6,367.40	328,062,711	820,157
7	02.199.633.5-121.000	000022/PPH22/ICCM/2014	23/01/2014	4,799	257,053,636	642,634
8	02.199.633.5-121.000	000023/PPH22/ICCM/2014	23/01/2014	4,770.40	249,885,001	624,713
9	02.199.633.5-121.000	000026/PPH22/ICCM/2014	23/01/2014	4,790.60	256,657,353	641,643
10	02.199.633.5-121.000	000030/PPH22/ICCM/2014	24/01/2014	1,617	86,332,277	215,831
11	02.199.633.5-121.000	000031/PPH22/ICCM/2014	24/01/2014	3,144	162,859,200	407,148
12	02.199.633.5-121.000	000038/PPH22/ICCM/2014	28/01/2014	7,515	388,804,307	972,011
13	02.199.633.5-121.000	000039/PPH22/ICCM/2014	03/02/2014	4,780.60	271,970,724	679,927
14	02.199.633.5-121.000	000043/PPH22/ICCM/2014	04/02/2014	8,852.40	500,616,496	1,251,544
15	02.199.633.5-121.000	000046/PPH22/ICCM/2014	07/02/2014	5,579	305,625,989	764,065
16	02.199.633.5-121.000	000047/PPH22/ICCM/2014	07/02/2014	2,006.20	108,896,536	272,241
17	02.199.633.5-121.000	000049/PPH22/ICCM/2014	10/02/2014	2,485.40	130,039,110	325,098
18	02.199.633.5-121.000	000050/PPH22/ICCM/2014	10/02/2014	8,882.20	494,957,264	1,237,394
19	02.199.633.5-121.000	000053/PPH22/ICCM/2014	11/02/2014	998.2	55,394,191	138,485
20	02.199.633.5-121.000	000056/PPH22/ICCM/2014	12/02/2014	4,750.60	265,842,388	664,606
21	02.199.633.5-121.000	000057/PPH22/ICCM/2014	12/02/2014	1,677	89,803,350	224,508
22	02.199.633.5-121.000	000058/PPH22/ICCM/2014	12/02/2014	3,183.80	185,647,378	464,118
23	02.199.633.5-121.000	000059/PPH22/ICCM/2014	12/02/2014	4,790.60	267,653,217	669,133
24	02.199.633.5-121.000	000061/PPH22/ICCM/2014	17/02/2014	7,295.40	396,898,942	992,247
25	02.199.633.5-121.000	000062/PPH22/ICCM/2014	17/02/2014	3,593	195,702,805	489,257
26	02.199.633.5-121.000	000063/PPH22/ICCM/2014	17/02/2014	4,451.20	219,185,990	547,965
27	02.199.633.5-121.000	000078/PPH22/ICCM/2014	27/02/2014	5,758.60	346,828,961	867,072
28	02.199.633.5-121.000	000079/PPH22/ICCM/2014	27/02/2014	5,549	337,875,836	844,690
29	02.199.633.5-121.000	000082/PPH22/ICCM/2014	28/02/2014	5,179.80	314,090,123	785,225
30	02.199.633.5-121.000	000084/PPH22/ICCM/2014	03/03/2014	3,512.60	210,826,603	527,067
31	02.199.633.5-121.000	000085/PPH22/ICCM/2014	03/03/2014	8,174	489,046,823	1,222,617
32	02.199.633.5-121.000	000086/PPH22/ICCM/2014	03/03/2014	6,018	368,671,105	921,678
33	02.199.633.5-121.000	000089/PPH22/ICCM/2014	03/03/2014	798.8	44,964,851	112,412
34	02.199.633.5-121.000	000090/PPH22/ICCM/2014	03/03/2014	5,808	325,897,334	814,743



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

35	02.199.633.5-121.000	000091/PPH22/ICCM/2014	04/03/2014	8,004	496,587,370	1,241,468
36	02.199.633.5-121.000	000092/PPH22/ICCM/2014	04/03/2014	5,868.40	355,164,840	887,912
37	02.199.633.5-121.000	000096/PPH22/ICCM/2014	06/03/2014	9,141.80	549,440,464	1,373,603
38	02.199.633.5-121.000	000097/PPH22/ICCM/2014	06/03/2014	3,663.40	219,245,698	548,114
39	02.199.633.5-121.000	000098/PPH22/ICCM/2014	06/03/2014	328.8	19,492,250	48,731
40	02.199.633.5-121.000	000099/PPH22/ICCM/2014	07/03/2014	2,894.40	178,469,283	446,173
41	02.199.633.5-121.000	000100/PPH22/ICCM/2014	07/03/2014	9,431.20	563,534,949	1,408,837
42	02.199.633.5-121.000	000102/PPH22/ICCM/2014	07/03/2014	4,002	241,928,104	604,820
43	02.199.633.5-121.000	000111/PPH22/ICCM/2014	12/03/2014	6,867.40	444,358,551	1,110,896
44	02.199.633.5-121.000	000112/PPH22/ICCM/2014	12/03/2014	867.2	52,870,548	132,176
45	02.199.633.5-121.000	000115/PPH22/ICCM/2014	13/03/2014	3,453.20	227,555,520	568,889
46	02.199.633.5-121.000	000116/PPH22/ICCM/2014	13/03/2014	8,703.60	571,454,441	1,428,636
47	02.199.633.5-121.000	000117/PPH22/ICCM/2014	13/03/2014	3,132.60	202,675,304	506,688
48	02.199.633.5-121.000	000118/PPH22/ICCM/2014	14/03/2014	2,843.20	190,571,877	476,430
49	02.199.633.5-121.000	000119/PPH22/ICCM/2014	14/03/2014	4,132.80	274,988,246	687,471
50	02.199.633.5-121.000	000120/PPH22/ICCM/2014	14/03/2014	4,361.40	274,598,978	686,497
51	02.199.633.5-121.000	000136/PPH22/ICCM/2014	25/03/2014	1,505.80	98,790,117	246,975
52	02.199.633.5-121.000	000137/PPH22/ICCM/2014	25/03/2014	3,274.80	197,470,440	493,676
53	02.199.633.5-121.000	000138/PPH22/ICCM/2014	27/03/2014	7,127.20	423,845,675	1,059,614
54	02.199.633.5-121.000	000139/PPH22/ICCM/2014	27/03/2014	1,725.20	102,595,488	256,489
55	02.199.633.5-121.000	000147/PPH22/ICCM/2014	28/03/2014	10,229.60	573,816,625	1,434,542
56	02.199.633.5-121.000	000148/PPH22/ICCM/2014	28/03/2014	3,403.40	195,908,213	489,771
57	02.199.633.5-121.000	000154/PPH22/ICCM/2014	02/04/2014	3,203.80	190,325,744	475,814
58	02.199.633.5-121.000	000155/PPH22/ICCM/2014	02/04/2014	5,599	331,436,948	828,592
59	02.199.633.5-121.000	000156/PPH22/ICCM/2014	02/04/2014	7,844.40	446,684,611	1,116,710
60	02.199.633.5-121.000	000157/PPH22/ICCM/2014	02/04/2014	6,876.40	403,000,018	1,007,500
61	02.199.633.5-121.000	000158/PPH22/ICCM/2014	02/04/2014	5,589	323,886,015	809,715
62	02.199.633.5-121.000	000159/PPH22/ICCM/2014	03/04/2014	3,692.80	216,883,116	542,208
63	02.199.633.5-121.000	000160/PPH22/ICCM/2014	03/04/2014	12,115.80	700,785,384	1,751,960
64	02.199.633.5-121.000	000161/PPH22/ICCM/2014	03/04/2014	5,758.60	331,479,413	828,699



65	02.199.633.5-121.000	000162/PPH22/ICCM/2014	03/04/2014	4,002.20	241,602,809	604,007
66	02.199.633.5-121.000	000172/PPH22/ICCM/2014	08/04/2014	708.2	40,689,914	101,725
67	02.199.633.5-121.000	000173/PPH22/ICCM/2014	08/04/2014	7,813.60	452,553,945	1,131,385
68	02.199.633.5-121.000	000181/PPH22/ICCM/2014	16/04/2014	2,496.20	152,673,083	381,683
69	02.199.633.5-121.000	000182/PPH22/ICCM/2014	16/04/2014	1,036	59,796,625	149,492
70	02.199.633.5-121.000	000183/PPH22/ICCM/2014	16/04/2014	4,862.20	295,232,784	738,082
71	02.199.633.5-121.000	000187/PPH22/ICCM/2014	21/04/2014	2,914.40	183,790,807	459,477
72	02.199.633.5-121.000	000193/PPH22/ICCM/2014	23/04/2014	4,727.20	292,183,505	730,459
73	02.199.633.5-121.000	000196/PPH22/ICCM/2014	23/04/2014	2,448.60	153,638,631	384,097
74	02.199.633.5-121.000	000199/PPH22/ICCM/2014	24/04/2014	3,203.80	195,421,548	488,554
75	02.199.633.5-121.000	000200/PPH22/ICCM/2014	24/04/2014	4,012.20	254,301,260	635,753
76	02.199.633.5-121.000	000201/PPH22/ICCM/2014	24/04/2014	7,734.80	467,963,135	1,169,908
77	02.199.633.5-121.000	000203/PPH22/ICCM/2014	24/04/2014	5,768.60	369,644,966	924,112
78	02.199.633.5-121.000	000206/PPH22/ICCM/2014	25/04/2014	8,782.60	540,182,596	1,350,456
79	02.199.633.5-121.000	000210/PPH22/ICCM/2014	28/04/2014	10,169.80	623,800,277	1,559,501
80	02.199.633.5-121.000	000211/PPH22/ICCM/2014	28/04/2014	2,405.40	151,250,349	378,126
81	02.199.633.5-121.000	000212/PPH22/ICCM/2014	28/04/2014	5,179.60	318,229,444	795,574
82	02.199.633.5-121.000	000216/PPH22/ICCM/2014	29/04/2014	2,746	175,566,608	438,917
83	02.199.633.5-121.000	000217/PPH22/ICCM/2014	29/04/2014	2,743.20	173,318,119	433,295
84	02.199.633.5-121.000	000219/PPH22/ICCM/2014	30/04/2014	4,281.60	279,197,484	697,994
85	02.199.633.5-121.000	000238/PPH22/ICCM/2014	02/05/2014	6,806.60	425,491,459	1,063,729
86	02.199.633.5-121.000	000249/PPH22/ICCM/2014	05/05/2014	3,104	192,562,848	481,407
87	02.199.633.5-121.000	000251/PPH22/ICCM/2014	06/05/2014	162	10,181,797	25,454
88	02.199.633.5-121.000	000252/PPH22/ICCM/2014	06/05/2014	3,203.80	192,889,264	482,223
89	02.199.633.5-121.000	000253/PPH22/ICCM/2014	06/05/2014	3,061.80	192,435,967	481,090
90	02.199.633.5-121.000	000254/PPH22/ICCM/2014	06/05/2014	4,022	257,011,833	642,530
91	02.199.633.5-121.000	000260/PPH22/ICCM/2014	06/05/2014	1,636.80	101,986,062	254,965
92	02.199.633.5-121.000	000263/PPH22/ICCM/2014	07/05/2014	3,972.20	253,425,566	633,564
93	02.199.633.5-121.000	000266/PPH22/ICCM/2014	09/05/2014	4,012	253,652,682	634,132
94	02.199.633.5-121.000	000270/PPH22/ICCM/2014	13/05/2014	7,086	469,140,676	1,172,852



95	02.199.633.5-121.000	000271/PPH22/ICCM/2014	13/05/2014	5,129.80	320,011,185	800,028
96	02.199.633.5-121.000	000274/PPH22/ICCM/2014	13/05/2014	6,786.60	432,403,468	1,081,009
97	02.199.633.5-121.000	000276/PPH22/ICCM/2014	13/05/2014	1,410.40	86,151,463	215,379
98	02.199.633.5-121.000	000277/PPH22/ICCM/2014	13/05/2014	775.4	48,655,497	121,639
99	02.199.633.5-121.000	000282/PPH22/ICCM/2014	14/05/2014	4,581	287,471,264	718,678
100	02.199.633.5-121.000	000283/PPH22/ICCM/2014	14/05/2014	3,513.20	224,423,392	561,058
101	02.199.633.5-121.000	000284/PPH22/ICCM/2014	14/05/2014	798.6	48,859,945	122,150
102	02.199.633.5-121.000	000285/PPH22/ICCM/2014	14/05/2014	2,415.40	146,264,547	365,661
103	02.199.633.5-121.000	000289/PPH22/ICCM/2014	14/05/2014	1,375.60	83,980,380	209,951
104	02.199.633.5-121.000	000290/PPH22/ICCM/2014	14/05/2014	2,846.20	174,550,331	436,376
105	02.199.633.5-121.000	000295/PPH22/ICCM/2014	16/05/2014	3,633	218,708,053	546,770
106	02.199.633.5-121.000	000299/PPH22/ICCM/2014	16/05/2014	7,385.40	458,803,946	1,147,010
107	02.199.633.5-121.000	000300/PPH22/ICCM/2014	16/05/2014	3,583.60	217,217,764	543,044
108	02.199.633.5-121.000	000301/PPH22/ICCM/2014	19/05/2014	100	3,407,700	8,519
109	02.199.633.5-121.000	000302/PPH22/ICCM/2014	19/05/2014	5,958	362,162,988	905,407
110	02.199.633.5-121.000	000303/PPH22/ICCM/2014	19/05/2014	1,254.60	79,020,981	197,552
111	02.199.633.5-121.000	000304/PPH22/ICCM/2014	19/05/2014	458.4	28,741,680	71,854
112	02.199.633.5-121.000	000305/PPH22/ICCM/2014	19/05/2014	3,077.60	184,779,104	461,948
113	02.199.633.5-121.000	000307/PPH22/ICCM/2014	19/05/2014	5,978.20	353,074,883	882,687
114	02.199.633.5-121.000	000308/PPH22/ICCM/2014	19/05/2014	2,415.40	142,654,490	356,636
115	02.199.633.5-121.000	000310/PPH22/ICCM/2014	20/05/2014	3,193.60	190,431,813	476,080
116	02.199.633.5-121.000	000320/PPH22/ICCM/2014	20/05/2014	6,287.60	372,738,988	931,847
117	02.199.633.5-121.000	000311/PPH22/ICCM/2014	20/05/2014	4,047.60	236,111,079	590,278
118	02.199.633.5-121.000	000312/PPH22/ICCM/2014	20/05/2014	423.6	25,218,391	63,046
119	02.199.633.5-121.000	000313/PPH22/ICCM/2014	20/05/2014	8,902.40	527,694,211	1,319,236
120	02.199.633.5-121.000	000317/PPH22/ICCM/2014	21/05/2014	6,886.40	424,362,693	1,060,907
121	02.199.633.5-121.000	000321/PPH22/ICCM/2014	22/05/2014	3,213.80	184,475,334	461,188
122	02.199.633.5-121.000	000322/PPH22/ICCM/2014	22/05/2014	4,710.60	266,513,972	666,285
123	02.199.633.5-121.000	000323/PPH22/ICCM/2014	22/05/2014	364.4	19,881,081	49,703
124	02.199.633.5-121.000	000324/PPH22/ICCM/2014	22/05/2014	3,787.60	218,502,099	546,255



125	02.199.633.5-121.000	000325/PPH22/ICCM/2014	22/05/2014	100	3,431,750	8,579
126	02.199.633.5-121.000	000326/PPH22/ICCM/2014	22/05/2014	100	3,309,280	8,273
127	02.199.633.5-121.000	000333/PPH22/ICCM/2014	23/05/2014	2,415.40	143,140,227	357,851
128	02.199.633.5-121.000	000334/PPH22/ICCM/2014	23/05/2014	3,093.80	172,114,282	430,286
129	02.199.633.5-121.000	000335/PPH22/ICCM/2014	23/05/2014	8,593	489,053,409	1,222,634
130	02.199.633.5-121.000	000336/PPH22/ICCM/2014	23/05/2014	100	3,374,400	8,436
131	02.199.633.5-121.000	000337/PPH22/ICCM/2014	26/05/2014	4,415.20	264,344,647	660,862
132	02.199.633.5-121.000	000338/PPH22/ICCM/2014	26/05/2014	2,960.20	174,907,265	437,268
133	02.199.633.5-121.000	000339/PPH22/ICCM/2014	26/05/2014	3,193.80	187,229,371	468,073
134	02.199.633.5-121.000	000340/PPH22/ICCM/2014	26/05/2014	4,990	290,635,065	726,588
135	02.199.633.5-121.000	000341/PPH22/ICCM/2014	26/05/2014	1,976	107,678,247	269,196
136	02.199.633.5-121.000	000342/PPH22/ICCM/2014	26/05/2014	3,193.80	176,352,693	440,882
137	02.199.633.5-121.000	000343/PPH22/ICCM/2014	26/05/2014	4,191.80	231,527,785	578,819
138	02.199.633.5-121.000	000347/PPH22/ICCM/2014	28/05/2014	5,559	306,674,910	766,687
139	02.199.633.5-121.000	000348/PPH22/ICCM/2014	28/05/2014	4,411.40	250,853,908	627,135
140	02.199.633.5-121.000	000349/PPH22/ICCM/2014	28/05/2014	2,415.40	134,065,328	335,163
141	02.199.633.5-121.000	000351/PPH22/ICCM/2014	30/05/2014	100	3,411,770	8,529
142	02.199.633.5-121.000	000352/PPH22/ICCM/2014	30/05/2014	4,790.40	265,917,116	664,793
143	02.199.633.5-121.000	000355/PPH22/ICCM/2014	30/05/2014	2,415.40	132,902,071	332,255
144	02.199.633.5-121.000	000356/PPH22/ICCM/2014	30/05/2014	5,512	309,424,388	773,561
145	02.199.633.5-121.000	000357/PPH22/ICCM/2014	30/05/2014	4,019	225,612,584	564,031
146	02.199.633.5-121.000	000358/PPH22/ICCM/2014	30/05/2014	100	3,429,900	8,575
147	02.199.633.5-121.000	000359/PPH22/ICCM/2014	30/05/2014	3,852.20	214,973,562	537,434
148	02.199.633.5-121.000	000374/PPH22/ICCM/2014	02/06/2014	100	3,387,350	8,468
149	02.199.633.5-121.000	000375/PPH22/ICCM/2014	02/06/2014	5,149.60	283,810,420	709,526
150	02.199.633.5-121.000	000382/PPH22/ICCM/2014	03/06/2014	3,203.80	176,957,087	442,392
151	02.199.633.5-121.000	000383/PPH22/ICCM/2014	03/06/2014	5,219.80	282,180,300	705,450
152	02.199.633.5-121.000	000384/PPH22/ICCM/2014	03/06/2014	935.8	51,829,798	129,574
153	02.199.633.5-121.000	000385/PPH22/ICCM/2014	03/06/2014	6,140.20	339,514,377	848,785
154	02.199.633.5-121.000	000386/PPH22/ICCM/2014	03/06/2014	1,507	78,858,808	197,147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155	02.199.633.5-121.000	000387/PPH22/ICCM/2014	03/06/2014	100	3,210,860	8,027
156	02.199.633.5-121.000	000392/PPH22/ICCM/2014	03/06/2014	3,203.80	180,709,122	451,773
157	02.199.633.5-121.000	000393/PPH22/ICCM/2014	04/06/2014	2,405.40	133,659,539	334,149
158	02.199.633.5-121.000	000394/PPH22/ICCM/2014	04/06/2014	2,295.40	129,138,974	322,847
159	02.199.633.5-121.000	000395/PPH22/ICCM/2014	04/06/2014	100	3,452,100	8,630
160	02.199.633.5-121.000	000396/PPH22/ICCM/2014	04/06/2014	100	3,391,050	8,478
161	02.199.633.5-121.000	000397/PPH22/ICCM/2014	04/06/2014	5,688.60	314,380,195	785,950
162	02.199.633.5-121.000	000399/PPH22/ICCM/2014	05/06/2014	3,303.40	181,566,261	453,916
163	02.199.633.5-121.000	000400/PPH22/ICCM/2014	05/06/2014	1,607	95,497,020	238,743
164	02.199.633.5-121.000	000401/PPH22/ICCM/2014	05/06/2014	100	3,372,550	8,431
165	02.199.633.5-121.000	000404/PPH22/ICCM/2014	06/06/2014	5,888.20	320,440,260	801,101
166	02.199.633.5-121.000	000405/PPH22/ICCM/2014	06/06/2014	100	3,339,250	8,348
167	02.199.633.5-121.000	000410/PPH22/ICCM/2014	06/06/2014	100	3,344,800	8,362
168	02.199.633.5-121.000	000411/PPH22/ICCM/2014	06/06/2014	1,587	86,721,536	216,804
169	02.199.633.5-121.000	000412/PPH22/ICCM/2014	06/06/2014	2,584.80	140,900,550	352,251
170	02.199.633.5-121.000	000417/PPH22/ICCM/2014	10/06/2014	2,824.40	151,408,176	378,520
171	02.199.633.5-121.000	000419/PPH22/ICCM/2014	10/06/2014	580.6	32,611,983	81,530
172	02.199.633.5-121.000	000420/PPH22/ICCM/2014	10/06/2014	2,603.20	143,795,431	359,489
173	02.199.633.5-121.000	000423/PPH22/ICCM/2014	11/06/2014	5,489	293,338,527	733,346
174	02.199.633.5-121.000	000424/PPH22/ICCM/2014	11/06/2014	4,660.60	253,434,573	633,586
175	02.199.633.5-121.000	000425/PPH22/ICCM/2014	11/06/2014	100	3,392,900	8,482
176	02.199.633.5-121.000	000426/PPH22/ICCM/2014	11/06/2014	100	3,334,440	8,336
177	02.199.633.5-121.000	000428/PPH22/ICCM/2014	11/06/2014	4,690.80	252,573,312	631,433
178	02.199.633.5-121.000	000429/PPH22/ICCM/2014	12/06/2014	3,193.80	169,402,346	423,506
179	02.199.633.5-121.000	000430/PPH22/ICCM/2014	13/06/2014	100	3,339,250	8,348
180	02.199.633.5-121.000	000431/PPH22/ICCM/2014	13/06/2014	1,916.20	102,551,671	256,379
181	02.199.633.5-121.000	000435/PPH22/ICCM/2014	13/06/2014	1,228.80	66,885,390	167,213
182	02.199.633.5-121.000	000436/PPH22/ICCM/2014	13/06/2014	4,270.20	227,337,762	568,344
183	02.199.633.5-121.000	000437/PPH22/ICCM/2014	13/06/2014	100	3,396,230	8,491
184	02.199.633.5-121.000	000438/PPH22/ICCM/2014	16/06/2014	6,587	346,668,540	866,671



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185	02.199.633.5-121.000	000440/PPH22/ICCM/2014	17/06/2014	3,972.20	206,404,251	516,011
186	02.199.633.5-121.000	000441/PPH22/ICCM/2014	17/06/2014	100	3,404,000	8,510
187	02.199.633.5-121.000	000442/PPH22/ICCM/2014	17/06/2014	3,093.80	165,085,168	412,713
188	02.199.633.5-121.000	000446/PPH22/ICCM/2014	18/06/2014	3,892.40	201,245,254	503,113
189	02.199.633.5-121.000	000447/PPH22/ICCM/2014	18/06/2014	2,005	109,109,494	272,774
190	02.199.633.5-121.000	000448/PPH22/ICCM/2014	18/06/2014	2,855.20	155,913,906	389,785
191	02.199.633.5-121.000	000449/PPH22/ICCM/2014	18/06/2014	100	3,483,550	8,709
192	02.199.633.5-121.000	000452/PPH22/ICCM/2014	18/06/2014	5,399.40	277,266,209	693,166
193	02.199.633.5-121.000	000453/PPH22/ICCM/2014	18/06/2014	2,525.40	129,006,018	322,515
194	02.199.633.5-121.000	000455/PPH22/ICCM/2014	19/06/2014	3,982	199,827,910	499,570
195	02.199.633.5-121.000	000456/PPH22/ICCM/2014	19/06/2014	100	3,257,480	8,144
196	02.199.633.5-121.000	000457/PPH22/ICCM/2014	19/06/2014	5,189.80	268,159,561	670,399
197	02.199.633.5-121.000	000458/PPH22/ICCM/2014	19/06/2014	2,903.40	147,289,482	368,224
198	02.199.633.5-121.000	000459/PPH22/ICCM/2014	19/06/2014	1,198.40	58,981,653	147,454
199	02.199.633.5-121.000	000462/PPH22/ICCM/2014	20/06/2014	5,479	272,992,819	682,482
200	02.199.633.5-121.000	000463/PPH22/ICCM/2014	20/06/2014	100	3,333,700	8,334
201	02.199.633.5-121.000	000470/PPH22/ICCM/2014	24/06/2014	100	3,404,000	8,510
202	02.199.633.5-121.000	000471/PPH22/ICCM/2014	24/06/2014	3,093.80	156,546,280	391,366
203	02.199.633.5-121.000	000472/PPH22/ICCM/2014	24/06/2014	1,926.40	101,449,040	253,622
204	02.199.633.5-121.000	000473/PPH22/ICCM/2014	24/06/2014	130.4	7,216,792	18,042
205	02.199.633.5-121.000	000474/PPH22/ICCM/2014	24/06/2014	3,322.60	175,930,839	439,827
206	02.199.633.5-121.000	000481/PPH22/ICCM/2014	26/06/2014	100	3,485,770	8,714
207	02.199.633.5-121.000	000482/PPH22/ICCM/2014	26/06/2014	4,979.80	258,030,827	645,077
208	02.199.633.5-121.000	000483/PPH22/ICCM/2014	26/06/2014	1,856.40	97,064,751	242,662
209	02.199.633.5-121.000	000484/PPH22/ICCM/2014	26/06/2014	100	3,470,230	8,676
210	02.199.633.5-121.000	000485/PPH22/ICCM/2014	27/06/2014	3,143.60	163,635,225	409,088
211	02.199.633.5-121.000	000486/PPH22/ICCM/2014	27/06/2014	5,459	286,719,782	716,799
212	02.199.633.5-121.000	000522/PPH22/ICCM/2014	12/08/2014	100	3,507,600	8,769
213	02.199.633.5-121.000	000523/PPH22/ICCM/2014	12/08/2014	3,313.40	188,466,192	471,165
214	02.199.633.5-121.000	000525/PPH22/ICCM/2014	13/08/2014	6,387.40	351,204,802	878,012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215	02.199.633.5-121.000	000547/PPH22/ICCM/2014	10/10/2014	2,803.90	195,445,850	488,615
216	02.199.633.5-121.000	000548/PPH22/ICCM/2014	10/10/2014	2,475.60	160,753,086	401,883
217	02.199.633.5-121.000	000549/PPH22/ICCM/2014	10/10/2014	4,642.40	310,437,288	776,093
218	02.199.633.5-121.000	000550/PPH22/ICCM/2014	10/10/2014	2,425.80	154,007,978	385,020
219	02.199.633.5-121.000	000551/PPH22/ICCM/2014	10/10/2014	377.30	23,953,834	59,885
220	02.199.633.5-121.000	000552/PPH22/ICCM/2014	13/10/2014	3,898.90	260,602,476	651,506
221	02.199.633.5-121.000	000554/PPH22/ICCM/2014	13/10/2014	7,774.60	521,286,930	1,303,217
222	02.199.633.5-121.000	000555/PPH22/ICCM/2014	13/10/2014	7,483.10	463,521,920	1,158,805
223	02.199.633.5-121.000	000559/PPH22/ICCM/2014	14/10/2014	1,994.00	135,761,490	339,404
224	02.199.633.5-121.000	000560/PPH22/ICCM/2014	14/10/2014	4,589.80	313,198,772	782,997
225	02.199.633.5-121.000	000561/PPH22/ICCM/2014	14/10/2014	11,758.70	780,351,427	1,950,879
226	02.199.633.5-121.000	000562/PPH22/ICCM/2014	14/10/2014	659.70	41,837,184	104,593
227	02.199.633.5-121.000	000563/PPH22/ICCM/2014	14/10/2014	2,424.30	150,730,853	376,827
228	02.199.633.5-121.000	000556/PPH22/ICCM/2014	14/10/2014	2,318.00	152,901,075	382,253
229	02.199.633.5-121.000	000557/PPH22/ICCM/2014	14/10/2014	3,376.10	222,695,995	556,740
230	02.199.633.5-121.000	000567/PPH22/ICCM/2014	15/10/2014	1,982.60	124,118,690	310,297
231	02.199.633.5-121.000	000568/PPH22/ICCM/2014	16/10/2014	13,678.50	819,889,290	2,049,723
232	02.199.633.5-121.000	000570/PPH22/ICCM/2014	16/10/2014	6,478.70	390,298,916	975,747
233	02.199.633.5-121.000	000571/PPH22/ICCM/2014	17/10/2014	4,521.20	299,690,003	749,225
234	02.199.633.5-121.000	000572/PPH22/ICCM/2014	17/10/2014	997.80	68,374,115	170,935
235	02.199.633.5-121.000	000578/PPH22/ICCM/2014	17/10/2014	5,406.50	351,192,724	877,982
236	02.199.633.5-121.000	000579/PPH22/ICCM/2014	17/10/2014	8,339.00	533,896,636	1,334,740
237	02.199.633.5-121.000	000580/PPH22/ICCM/2014	20/10/2014	5,990.00	414,253,425	1,035,634
238	02.199.633.5-121.000	000582/PPH22/ICCM/2014	20/10/2014	7,814.40	547,000,184	1,367,500
239	02.199.633.5-121.000	000588/PPH22/ICCM/2014	21/10/2014	7,697.40	526,046,089	1,315,115
240	02.199.633.5-121.000	000589/PPH22/ICCM/2014	21/10/2014	7,994.90	523,843,837	1,309,610
241	02.199.633.5-121.000	000590/PPH22/ICCM/2014	22/10/2014	8,704.50	593,272,258	1,483,181
242	02.199.633.5-121.000	000591/PPH22/ICCM/2014	22/10/2014	5,492.30	374,972,503	937,431
243	02.199.633.5-121.000	000603/PPH22/ICCM/2014	22/10/2014	2,745.60	170,191,068	425,478
244	02.199.633.5-121.000	000604/PPH22/ICCM/2014	22/10/2014	5,940.00	368,201,830	920,505



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245	02.199.633.5-121.000	000605/PPH22/ICCM/2014	22/10/2014	3,986.30	270,797,332	676,993
246	02.199.633.5-121.000	000606/PPH22/ICCM/2014	22/10/2014	9,778.90	609,737,884	1,524,345
247	02.199.633.5-121.000	000607/PPH22/ICCM/2014	22/10/2014	15,071.50	971,208,816	2,428,022
248	02.199.633.5-121.000	000595/PPH22/ICCM/2014	22/10/2014	6,377.40	424,310,105	1,060,775
249	02.199.633.5-121.000	000596/PPH22/ICCM/2014	22/10/2014	3,485.80	244,896,970	612,242
250	02.199.633.5-121.000	000597/PPH22/ICCM/2014	22/10/2014	8,015.80	569,454,295	1,423,636
251	02.199.633.5-121.000	000610/PPH22/ICCM/2014	23/10/2014	8,558.80	514,909,390	1,287,273
252	02.199.633.5-121.000	000611/PPH22/ICCM/2014	23/10/2014	5,563.40	341,292,336	853,231
253	02.199.633.5-121.000	000612/PPH22/ICCM/2014	23/10/2014	100.00	4,982,400	12,456
254	02.199.633.5-121.000	000619/PPH22/ICCM/2014	27/10/2014	3,095.20	177,737,527	444,344
255	02.199.633.5-121.000	000620/PPH22/ICCM/2014	27/10/2014	100.00	4,908,000	12,270
256	02.199.633.5-121.000	000621/PPH22/ICCM/2014	27/10/2014	3,212.70	183,672,886	459,182
257	02.199.633.5-121.000	000622/PPH22/ICCM/2014	27/10/2014	400.00	19,545,600	48,864
258	02.199.633.5-121.000	000637/PPH22/ICCM/2014	30/10/2014	7,996.00	414,282,355	1,035,706
259	02.199.633.5-121.000	000638/PPH22/ICCM/2014	30/10/2014	1,703.20	87,851,397	219,628
260	02.199.633.5-121.000	000639/PPH22/ICCM/2014	30/10/2014	2,276.00	118,961,831	297,405
261	02.199.633.5-121.000	000677/PPH22/ICCM/2014	11/11/2014	8,165.50	436,936,558	1,092,341
262	02.199.633.5-121.000	000678/PPH22/ICCM/2014	11/11/2014	200	6,371,924	15,930
263	02.199.633.5-121.000	000679/PPH22/ICCM/2014	11/11/2014	163.4	5,419,455	13,549
264	02.199.633.5-121.000	000680/PPH22/ICCM/2014	11/11/2014	4,611.20	251,315,565	628,289
265	02.199.633.5-121.000	000682/PPH22/ICCM/2014	12/11/2014	4,322.30	229,639,606	574,099
266	02.199.633.5-121.000	000683/PPH22/ICCM/2014	12/11/2014	200	6,784,024	16,960
267	02.199.633.5-121.000	000684/PPH22/ICCM/2014	12/11/2014	4,947.30	281,851,738	704,629
268	02.199.633.5-121.000	000689/PPH22/ICCM/2014	13/11/2014	296.6	14,190,308	35,476
269	02.199.633.5-121.000	000690/PPH22/ICCM/2014	13/11/2014	5,677.70	293,370,790	733,427
270	02.199.633.5-121.000	000691/PPH22/ICCM/2014	13/11/2014	7,966.90	383,830,902	959,577
271	02.199.633.5-121.000	000699/PPH22/ICCM/2014	14/11/2014	13,843.90	681,335,845	1,703,340
272	02.199.633.5-121.000	000700/PPH22/ICCM/2014	14/11/2014	7,478.10	372,398,013	930,995
273	02.199.633.5-121.000	000701/PPH22/ICCM/2014	17/11/2014	4,632.50	247,105,240	617,763
274	02.199.633.5-121.000	000702/PPH22/ICCM/2014	17/11/2014	200	10,668,332	26,671



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

275	02.199.633.5-121.000	000703/PPH22/ICCM/2014	17/11/2014	2,096.90	111,852,127	279,630
276	02.199.633.5-121.000	000704/PPH22/ICCM/2014	17/11/2014	6,581.10	325,388,801	813,472
277	02.199.633.5-121.000	000705/PPH22/ICCM/2014	17/11/2014	200	9,794,408	24,486
278	02.199.633.5-121.000	000706/PPH22/ICCM/2014	17/11/2014	5,958.70	274,541,621	686,354
279	02.199.633.5-121.000	000712/PPH22/ICCM/2014	18/11/2014	1,414.80	70,526,012	176,315
280	02.199.633.5-121.000	000713/PPH22/ICCM/2014	18/11/2014	572	28,513,485	71,284
281	02.199.633.5-121.000	000714/PPH22/ICCM/2014	18/11/2014	1,748.60	91,065,252	227,663
282	02.199.633.5-121.000	000715/PPH22/ICCM/2014	18/11/2014	2,229.80	107,523,743	268,809
283	02.199.633.5-121.000	000722/PPH22/ICCM/2014	19/11/2014	938.8	44,111,865	110,280
284	02.199.633.5-121.000	000723/PPH22/ICCM/2014	19/11/2014	4,553.80	211,933,852	529,835
285	02.199.633.5-121.000	000729/PPH22/ICCM/2014	20/11/2014	4,985.30	230,784,493	576,961
286	02.199.633.5-121.000	000730/PPH22/ICCM/2014	20/11/2014	3,981.10	186,398,287	465,996
287	02.199.633.5-121.000	000733/PPH22/ICCM/2014	21/11/2014	5,790	269,481,654	673,704
288	02.199.633.5-121.000	000734/PPH22/ICCM/2014	21/11/2014	3,990.90	185,528,959	463,822
289	02.199.633.5-121.000	000750/PPH22/ICCM/2014	24/11/2014	200	6,420,794	16,052
290	02.199.633.5-121.000	000751/PPH22/ICCM/2014	24/11/2014	540.2	24,911,971	62,280
291	02.199.633.5-121.000	000752/PPH22/ICCM/2014	24/11/2014	5,248.60	242,045,487	605,114
292	02.199.633.5-121.000	000757/PPH22/ICCM/2014	25/11/2014	1,796.20	83,030,063	207,575
293	02.199.633.5-121.000	000758/PPH22/ICCM/2014	25/11/2014	200	6,435,998	16,090
294	02.199.633.5-121.000	000766/PPH22/ICCM/2014	26/11/2014	4,001.70	183,149,005	457,873
295	02.199.633.5-121.000	000767/PPH22/ICCM/2014	26/11/2014	8,187.50	375,554,075	938,885
296	02.199.633.5-121.000	000768/PPH22/ICCM/2014	26/11/2014	9,789.40	451,068,142	1,127,671
297	02.199.633.5-121.000	000769/PPH22/ICCM/2014	26/11/2014	200	6,415,364	16,038
298	02.199.633.5-121.000	000770/PPH22/ICCM/2014	26/11/2014	6,982.20	322,446,375	806,116
299	02.199.633.5-121.000	000772/PPH22/ICCM/2014	26/11/2014	1,607.20	75,672,440	189,181
300	02.199.633.5-121.000	000773/PPH22/ICCM/2014	26/11/2014	6,378.20	306,082,483	765,206
301	02.199.633.5-121.000	000774/PPH22/ICCM/2014	26/11/2014	2,387.20	112,707,828	281,770
302	02.199.633.5-121.000	000779/PPH22/ICCM/2014	27/11/2014	200	6,582,970	16,457
303	02.199.633.5-121.000	000780/PPH22/ICCM/2014	27/11/2014	1,992.80	96,033,530	240,084
304	02.199.633.5-121.000	000781/PPH22/ICCM/2014	27/11/2014	5,375.70	268,173,514	670,434



305	02.199.633.5-121.000	000782/PPH22/ICCM/2014	27/11/2014	7,676	380,018,035	950,045	
306	02.199.633.5-121.000	000785/PPH22/ICCM/2014	28/11/2014	5,167.10	258,175,702	645,439	
307	02.199.633.5-121.000	000786/PPH22/ICCM/2014	28/11/2014	200	6,577,250	16,443	
308	02.199.633.5-121.000	000787/PPH22/ICCM/2014	28/11/2014	2,100	101,111,598	252,779	
309	02.199.633.5-121.000	000788/PPH22/ICCM/2014	28/11/2014	6,477.30	313,642,914	784,107	
310	02.199.633.5-121.000	000800/PPH22/ICCM/2014	01/12/2014	8,154.60	411,501,503	1,028,753	
311	02.199.633.5-121.000	000802/PPH22/ICCM/2014	01/12/2014	926.8	47,303,872	118,259	
312	02.199.633.5-121.000	000803/PPH22/ICCM/2014	01/12/2014	200	6,640,890	16,602	
313	02.199.633.5-121.000	000804/PPH22/ICCM/2014	01/12/2014	5,048.80	257,690,752	644,226	
314	02.199.633.5-121.000	000805/PPH22/ICCM/2014	01/12/2014	4,784.10	241,351,865	603,379	
315	02.199.633.5-121.000	000806/PPH22/ICCM/2014	02/12/2014	200	6,256,446	15,641	
316	02.199.633.5-121.000	000807/PPH22/ICCM/2014	02/12/2014	2,382.30	113,226,550	283,066	
317	02.199.633.5-121.000	000821/PPH22/ICCM/2014	09/12/2014	9,557.60	475,513,156	1,188,782	
318	02.199.633.5-121.000	000836/PPH22/ICCM/2014	16/12/2014	3,181.20	166,121,469	415,303	
	JUMLAH			0	1,239,063.9	71,201,414,77	6 178,003,525

Bahwa dari total jumlah *quantity* pembelian kopi, PPh Pasal 22 dan jumlah harga pembelian yang dilakukan PT INDO CAFCO dari CV LORIN JAYA PRIMA adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Quantity	PPh Pasal 22	Jumlah Pembelian Bruro
1	2011	1,767,633.30	243,480,860	97,392,338,746
2	2012	1,109,542.40	130,542,275	52,216,920,862
3	2013	1,106,104.50	92,153,548	36,861,405,937
4	2014	1,239,063.90	178,003,525	71,201,414,776
	JUMLAH	5,222,344.10	644,180,208	257,672,080,321

Bahwa disamping menjual kopi kepada PT Indo Cafco terdakwa **DERMAWATI TURNIP** selaku direktur CV LORIN JAYA PRIMA juga melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kopi kepada PT OLAM INDONESIA dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014. Adapun rincian penjualan kopi oleh terdakwa **DERMAWATI TURNIP** kepada PT OLAM INDONESIA adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Date	Supplier	Grade	Netto	Nego Price	Actual Value	Nego Price Gross Up	Value Gross Up	PPH 22	Amount
1	16-Aug-13	Bonar Girsang	Asalan	9.270.6	24.200	224.348.520	24.261	224.910.797	562.277	224.348.520
2	21-Aug-13	Bonar Girsang	Asalan	14.498.1	27.000	391.448.700	27.068	392.429.774	981.074	391.448.700
3	22-Aug-13	Bonar Girsang	Asalan	9.086.6	26.200	238.068.920	26.266	238.665.584	596.664	238.068.920
4	22-Aug-13	Bonar Girsang	Asalan	7.283.3	25.800	187.909.140	25.865	188.380.090	470.950	187.909.140
5	23-Aug-13	Bonar Girsang	Asalan	11.086.0	25.400	281.584.400	25.464	282.290.125	705.725	281.584.400
6	26-Aug-13	Bonar Girsang	Asalan	8.486.5	25.400	215.557.100	25.464	216.097.343	540.243	215.557.100
7	TOTAL TAHUN 2013			59.711.1		1.538.916.780		1.542.773.714	3.856.934	1.538.916.780
8	08-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	13.944.4	60.450	842.938.980	60.602	845.051.609	2.112.629	842.938.980
9	08-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	8.465.4	60.900	515.542.860	61.053	516.834.947	1.292.087	515.542.860
10	08-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	7.970.9	59.300	472.674.370	59.449	473.859.018	1.184.648	472.674.370
11	08-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	7.666.8	61.500	471.508.200	61.654	472.689.925	1.181.725	471.508.200
12	08-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	4.377.8	59.500	260.479.100	59.649	261.131.930	652.830	260.479.100
13	10-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	8.972.6	61.300	550.020.380	61.454	551.398.877	1.378.497	550.020.380
14	10-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	5.945.4	59.800	355.534.920	59.950	356.425.985	891.065	355.534.920
15	11-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	9.962.0	60.600	603.697.200	60.752	605.210.226	1.513.026	603.697.200
16	11-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	4.974.4	62.300	309.905.120	62.456	310.681.825	776.705	309.905.120
17	11-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	4.983.4	60.000	299.004.000	60.150	299.753.383	749.383	299.004.000
18	11-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	14.963.0	61.500	920.224.500	61.654	922.530.827	2.306.327	920.224.500
19	11-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	6.480.4	61.500	398.544.600	61.654	399.543.459	998.859	398.544.600
20	12-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	13.958.0	61.300	855.625.400	61.454	857.769.825	2.144.425	855.625.400
21	12-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	6.689.9	61.300	410.090.870	61.454	411.118.667	1.027.797	410.090.870
22	14-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	10.662.8	60.500	645.099.400	60.652	646.716.190	1.616.790	645.099.400
23	14-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	4.078.3	58.000	236.541.400	58.145	237.134.236	592.836	236.541.400
24	14-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	10.368.8	62.500	648.050.000	62.657	649.674.185	1.624.185	648.050.000
25	15-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	13.948.0	61.500	857.802.000	61.654	859.951.880	2.149.880	857.802.000
26	15-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	13.110.4	64.250	842.343.200	64.411	844.454.336	2.111.136	842.343.200
27	15-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	5.074.7	64.500	327.318.150	64.662	328.138.496	820.346	327.318.150
28	17-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	14.955.0	58.200	870.381.000	58.346	872.562.406	2.181.406	870.381.000
29	17-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	8.474.5	58.000	491.521.000	58.145	492.752.882	1.231.882	491.521.000
30	19-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	9.980.0	63.000	628.740.000	63.158	630.315.789	1.575.789	628.740.000
31	21-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	11.994.2	60.200	722.050.840	60.351	723.860.491	1.809.651	722.050.840
32	22-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	6.280.1	60.100	377.434.010	60.251	378.379.960	945.950	377.434.010
33	23-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	7.480.0	57.000	426.360.000	57.143	427.428.571	1.068.571	426.360.000
34	23-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	4.976.0	58.000	288.608.000	58.145	289.331.328	723.328	288.608.000
35	24-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	6.181.4	62.500	386.337.500	62.657	387.305.764	968.264	386.337.500
36	07-Jan-00	Bonar Girsang	Asalan	3.584.2	60.800	217.919.360	60.952	218.465.524	546.164	217.919.360
37	26-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	11.136.4	61.400	683.774.960	61.554	685.488.682	1.713.722	683.774.960
38	28-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	8.290.3	59.000	489.127.700	59.148	490.353.584	1.225.884	489.127.700
39	28-Apr-14	Bonar Girsang	Asalan	6.979.0	57.500	401.292.500	57.644	402.298.246	1.005.746	401.292.500
40	03-May-14	Bonar Girsang	Asalan	14.466.5	59.000	853.523.500	59.148	855.662.657	2.139.157	853.523.500
41	05-May-14	Bonar Girsang	Asalan	8.777.8	59.000	517.890.200	59.148	519.188.170	1.297.970	517.890.200
42	09-Jun-14	Bonar Girsang	Asalan	14.965.0	53.250	796.886.250	53.383	798.883.459	1.997.209	796.886.250
43	09-Jun-14	Bonar Girsang	Asalan	8.943.0	53.500	478.450.500	53.634	479.649.624	1.199.124	478.450.500
44	18-Jun-14	Bonar Girsang	Asalan	14.957.9	50.000	747.895.000	50.125	749.769.424	1.874.424	747.895.000
45	19-Jun-14	Bonar Girsang	Asalan	10.042.1	50.700	509.134.470	50.827	510.410.496	1.276.026	509.134.470
46	19-Jun-14	Bonar Girsang	Asalan	1.612.8	50.700	81.768.960	50.827	81.973.895	204.935	81.768.960
47	21-Jun-14	Bonar Girsang	Asalan	7.364.9	52.500	386.657.250	52.632	387.626.316	969.066	386.657.250
48	24-Jun-14	Bonar Girsang	Asalan	12.003.8	52.100	625.397.980	52.231	626.965.393	1.567.413	625.397.980
49	25-Jun-14	Bonar Girsang	Asalan	14.937.3	51.800	773.752.140	51.930	775.691.368	1.939.228	773.752.140



Bahwa selama kurun waktu dari masa pajak tahun 2011, 2012, 2013 sampai dengan tahun 2014, terdakwa **DERMAWATI TURNIP** selaku direktur CV LORIN JAYAPRIMA tidak ada membuat pembukuan perusahaan dan juga tidak membuat laporan berupa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, sehingga terdakwa **DERMAWATI TURNIP** selaku direktur CV LORIN JAYAPRIMA dalam hal ini tidak melakukan kewajibannya yaitu berupa pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Pasal 29 UU nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam hal ini PPh Badan CV LORIN JAYAPRIMA yang merupakan kewajiban dari terdakwa **DERMAWATI TURNIP** selaku direktur CV LORIN JAYAPRIMA.

Bahwa pihak dari KPP Pratama Medan Polonia telah beberapa kali melakukan tegoran dan himbauan agar dilakukan pelaporan Surat Pemberitahuan pajak dari CV LORIN JAYAPRIMA, akan tetapi oleh terdakwa **DERMAWATI TURNIP** selaku direktur CV LORIN JAYAPRIMA tidak menanggapi dan tidak juga melakukan laporan Surat Pemberitahuan pajak dan membayar pajak yang masih terhutang dari CV LORIN JAYAPRIMA.

Bahwa tegoran dan himbauan yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Surat tugas Nomor :12569 tanggal 28 April 2015
2. Surat Tugas Nomor: 30073/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 08 Agustus 2017
3. S-12570/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Himbauan/Klarifikasi untuk melakukan penyeteroran dan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 sd 2014
4. Surat Nomor : S-14414/WPJ.01/KP.0310/2015 tanggal 09 Juni 2015 perihal panggilan konseling
5. Surat Undangan Nomor : Und-14451/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 10 Juni 2015 perihal Undangan sosialisasi
6. Surat Nomor S-24839/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 21 September 2015 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
7. Surat Nomor S-289575/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal Desember 2015 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun pajak 2012
8. Surat Nomor S-27697/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Konfirmasi Bukti Potong PPh Pasal 22
9. Surat Nomor S-27698 tanggal 31 Juli 2017 perihal Konfirmasi Bukti Potong PPh Pasal 22



10. Surat Nomor S-28964/WPJ.01/KP.03/2016 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Himbauan memanfaatkan Program Amnesty Pajak
11. Surat Nomor S-12570/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 28 April 2015 perihal himbauan/Klarifikasi untuk melakukan penyetoran dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 dan 2012
12. Surat Nomor S-13726/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal himbauan/Klarifikasi kedua untuk melakukan penyetoran dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 dan 2014

Sehingga dari fakta ini perbuatan dari terdakwa **DERMAWATI TURNIP** selaku direktur CV LORIN JAYAPRIMA yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan tidak membayar PPh Badan dari CV LORIN JAYAPRIMA merupakan perbuatan yang disengaja, sebab . terdakwa **DERMAWATI TURNIP** selaku direktur CV LORIN JAYAPRIMA sudah mengetahui ada kewajibannya selaku Wajib Pajak untuk *menyampaikan Surat Pemberitahuan* akan tetapi tidak menyampaikan apa yang menjadi kewajiban meski telah berkali-kali diberitahukan terkait kewajiban tersebut oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.

Bahwa terdakwa **DERMAWATI TURNIP** yang terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia sejak tanggal 19 Februari 2003 dengan NPWP 02.199.633.6-121.000 memiliki kewajiban yaitu mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Bahwa sebagaimana diketahui fungsi dari Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. harta dan kewajiban; dan/atau



d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Bahwa dengan tidak ada dilakukannya pembayaran PPh badan dengan tidak disampaikannya surat pemberitahuan, maka negara telah dirugikan dalam hal pendapatan negara dari pajak yang merupakan kewajiban dari CV LORIN JAYAPRIMA yang terdaftar sebagai wajib pajak NPWP : 02.199.633.6-121.000 untuk tahun 2011, 2012, 2013 sampai dengan 2014.

Bahwa dengan demikian nilai kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan CV LORIN JAYAPRIMA tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2011 s.d. 2014 adalah sekurang-kurangnya sebesar **Rp 6.630.940.036,- (enam milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga puluh enam rupiah)** yang rinciannya adalah sebagai berikut:

	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Peredaran Bruto					
Penjualan Kopi ke PT Indo Cafco	97.392.338.746	52.216.920.862	36.861.405.937	71.201.414.775	257.672.080.320
Penjualan Kopi ke PT Olam Indonesia			1.542.773.714	22.634.433.855	24.177.207.569
Jumlah Penjualan	97.392.338.746	52.216.920.862	38.404.179.651	93.835.848.630	281.849.287.889
Norma Penghitungan Penghasilan Neto	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%
Penghasilan Kena Pajak	10.226.195.000	5.482.776.000	4.032.438.000	9.852.764.000	29.594.173.000
Pajak Penghasilan Terutang	2.556.548.750	1.370.694.000	945.109.513	2.463.191.000	7.335.543.263
Kredit Pajak:					
PPh Pasal 22 dipungut oleh PT Indo Cafco	243.460.860	130.542.275	92.153.548	178.003.525	644.160.208
PPh Pasal 22 dipungut oleh PT Olam Indonesia			3.856.934	56.586.085	60.443.019
Jumlah Kredit Pajak	243.460.860	130.542.275	96.010.482	234.589.610	704.603.227
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	2.313.087.890	1.240.151.725	849.099.031	2.228.601.390	6.630.940.036

Perbuatan terdakwa **DERMAWATI TURNIP** sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Deliana Magdalena Hutajulu, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar keterangan saksi pada BAP saat Penyidikan yang telah saksi baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saksi masih tetap.
- Bahwa benar saksi saat ini menjabat sebagai Account Representatif (AR) di Medan Polonia sejak tahun 2019 sampai sekarang.
- Bahwa CV. Lorin Jayaprima merupakan salah satu Wajib Pajak yang terdaftar di KPPP Medan Polonia dan berada dalam pengawasan KPPP Medan Polonia dimana saksi sebagai AR yang mengawasinya.
- Bahwa berdasarkan data di Sistem Informasi Perpajakan, pengurus CV. Lorin Jayaprima adalah Dermawati Turnip sebagai Direktur dan Bonarsius Girsang sebagai Komisaris.
- Bahwa berdasarkan data administrasi Sistem Informasi Data Perpajakan CV. Lorin Jayaprima; NPWP 02.199.633.5-121.000 terdaftar di KPPP Medan Polonia sejak 19 Februari 2003.
- Bahwa CV. Lorin Jaya Prima mempunyai kegiatan usaha perdagangan biji kopi, di mana di sistem perpajakan CV. Lorin Jayaprima tercatat dengan jenis usaha Perdagangan Besar Atas Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak.
- Bahwa dari bukti potong PPh Pasal 22, diketahui bahwa CV. Lorin Jayaprima mempunyai transaksi penjualan kopi dengan PT. Indo Cafco. CV. Lorin Jayaprima Wajib membuat pembukuan atas kegiatan usahanya.
- Bahwa dari Data SIDJP Alamat kegiatan usaha CV. Lorin Jayaprima adalah di Jalan Flamboyan Dalam No.8 Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan. Tetapi dari informasi penyidik yang telah kelokasi, Wajib Pajak mempunyai tempat usaha berupa gudang dan penjemuran kopi di daerah Lau bakeri.
- Bahwa saksi pernah melakukan kegiatan kunjungan ketempat alamat CV. Lorin Jayaprima di Jalan Flamboyan Dalam No.8 Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, hasil kunjungan.



- Bahwa dari SPT PPh Badan terakhir yang dilaporkan oleh Wajib Pajak CV. Lorin Jayaprima adalah tahun pajak 2010, dimana penandatanganan SPT PPh Badan bernama Dermawati Turnip selaku Direktur.
 - Bahwa CV. Lorin Jayaprima tidak pernah melaporkan SPT PPh Badan sejak tahun pajak 2011 sd 2014.
 - Bahwa KPP Pratama Medan Polonia telah menyampaikan Surat Teguran kepada CV. Lorin Jayaprima untuk menyampaikan SPT Tahunan Badan.
 - Bahwa saksi juga pernah menyampaikan Surat Teguran berupa teguran untuk menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Badan CV. Lorin Jayaprima untuk tahun pajak 2011 sd 2014.
 - Bahwa Surat Teguran disampaikan ke CV. Lorin Jayaprima lewat Pos dan tidak ada yang kembali, sehingga surat tersebut telah sampai dan diterima oleh CV. Lorin Jayaprima.
 - Bahwa dari data SI DJP, CV. Lorin Jayaprima tidak melakukan pelaporan pajak sejak tahun pajak 2011 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa saksi bisa mengetahui ada kegiatan dan penghasilan CV. Lorin Jayaprima yang tidak dilaporkan adalah dari laporan pihak ketiga (lawan transaksi) yaitu bukti potong PPh Pasal 22 tahun pajak 2011 sd 2015 yang dilaporkan lawan transaksi dalam hal ini PT. Indo Cofco.
 - Bahwa KPP Pratama Medan Polonia pernah melakukan klarifikasi atas bukti potong tahun pajak 2011 sd 2014 ke CV. Lorin Jayaprima dan oleh CV. Lorin Jayaprima tidak pernah memenuhi panggilan klarifikasi dari kantor pajak.
 - Bahwa pernah juga disampaikan undangan dan konseling tetap tidak pernah memberikan jawaban. Hanya saja pernah memberikan klarifikasi lewat telp dimana CV. Lorin Jayaprima menyatakan bahwa tidak semua bukti potong tersebut adalah berasal dari penjualan kopi milik mereka ke PT. Indo Cofco.
 - Bahwa meskipun lawan transaksi CV. Lorin Jayaprima telah melakukan pemotongan PPh Pasal 22, kewajiban dari CV. Lorin Jayaprima adalah melaporkan penghasilan yang diterima di SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud Pasal 22 yang telah dipotong dapat dikreditkan oleh CV. Lorin Jayaprima untuk mengurangi PPh Terutang di akhir tahun yang kurang atau (lebih bayar) oleh Wajib Pajak.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.



2. Saksi Syahrul Mufti, dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP saat Penyidikan yang telah saksi baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saksi masih tetap.
- Bahwa saksi bekerja di DJP Pajak Sumut 1 di Kantor KPPP Pratama Medan Polonia sebagai Kepala Seksi Pelayanan.
- Bahwa dari data yang ada di berkas KPPP Medan Polonia dan data Sisitem Informasi perpajakan (Si DJP), diperoleh fakta CV. Lorin Jayaprima adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPPP Medan Polonia sejak 19 Februari 2003.
- Bahwa dari data master file SIDJP, CV. Lorin Jayaprima memiliki NPWP 02.493.647.8-122.000 dan terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia sejak 19 Februari 2003.
- Bahwa CV. Lorin Jayaprima merupakan salah satu Wajib Pajak yang terdaftar di KPPP Medan Polonia dan berada dalam pengawasan KPPP Medan Polonia dimana saksi sebagai AR yang mengawasinya.
- Bahwa berdasarkan akte pendirian CV. Lorin Jayaprima No.01 tanggal 15 Januari 2003 dan data SI DJP yang menjadi pengurus CV. Lorin Jayaprima adalah Dermawati Turnip dan Sdr. Bonarsius Girsang.
- Bahwa dari laporan SPT masa dan tahunan CV. Lorin Jayaprima, yang menandatangani adalah Dermawati Turnip selaku Direktur CV. Lorin Jayaprima.
- Bahwa kewenangan saksi selaku Kepala seksi Pelayanan dapat melihat laporan wajib Pajak yang telah direkam atau disampaikan secara online melalui aplikasi SIDJP dan berkas fisik atas SPT yang disampaikan oleh wajib Pajak. Laporan tersebut dapat dilihat tanggal penyampaian laporan, nilai pembayaran, penandatanganan dan transaksi yang terutang pajak sesuai format SPT yang berlaku di periode tersebut, CV. Lorin Jayaprima melaporkan laporan pajak SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2003 dengan setoran Rp.258.700,- dan melaporkan SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2004 sd 2010 status NIHIL. Untuk laporan SPT Masa, CV LORIN JAYAPRIMA melaporkan SPT Masa PPh 21 dan 25 masa Januari 2004 sd 2011 dengan status Nihil.
- Bahwa dari data SI DJP, laporan SPT Masa PPN masa Februari 2011 dan Desember 2011 diketahui yang menandatangani SPT adalah Dermawati Turnip selaku pengurus.



- Bahwa dengan suaminya adapun tahun 2012 sd 2014 WP tidak melaporkan SPT Masa PPN.
- Bahwa dari aplikasi SIDJP Klasifikasi Usaha CV. Lorin Jayaprima adalah perdagangan besar atas balas jasa.
- Bahwa biasanya Account Representatif (AR) yang melakukan kunjungan kelapangan.
- Bahwa dari penelusuran dokumen yang ada dari berkas fisik maupun data pada aplikasi Portal dan SIDJP tidak ditemukan adanya dokumen usul penghapusan NPWP atau surat lainnya yang menyatakan keberatan sebagai wajib pajak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Johannes Sagala, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP saat Penyidikan yang telah saksi baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saksi masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Medan Polonia.
- Bahwa tugas sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak adalah memeriksa pajak dari wajib pajak.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap CV. Lorin Jayaprima dikarenakan ada laporan data penjualan kopi dalam waktu tahun 2013 dan 2014.
- Bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap CV. Lorin Jayaprima yang saksi lakukan dengan cara sebagai berikut : Setelah menerima SP2, Pemeriksa menyampaikan pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada Wajib Pajak, namun Wajib Pajak dalam hal ini pengurus CV. Lorin Jayaprima tidak hadir. Kemudian saksi melakukan panggilan telepon kepada Terdakwa Dermawati Turnip agar bersedia hadir ke KPP Medan Polonia.
- Bahwa di hari yang telah ditentukan, Wajib Pajak benar ada hadir di KPP Medan Polonia dan bersedia memberikan keterangan, akan tetapi terdakwa mengaku tidak dapat memberikan dokumen terkait transaksi yang telah dilakukan oleh CV. Lorin Jayaprima dan juga tidak ada melakukan pembukuan.



- Bahwa aaksi juga ada mengunjungi lokasi Wajib Pajak untuk melihat proses bisnis Wajib Pajak (terdakwa), namun tidak ditemukan adanya kegiatan usaha di lokasi yang terdaftar pada sistem SIDJP yang beralamat di Jl. Flamboyan No 8. Setelah beberapa lama diketahui bahwa atas Wajib Pajak CV. Lorin Jayaprima sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan sehingga untuk jenis pajak PPh Badan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak Kanwil.
 - Bahwa saksi bersama tim kanwil mendatangi lokasi Gudang Wajib Pajak/pengurus Wajib Pajak yang berada di daerah tanjunganom dan memberitahukan penghentian pemeriksaan PPh Badan Wajib Pajak. Pemeriksa menyelesaikan pemeriksaan potput dengan menerbitkan SPHP dan menyampaikan kerumah pengurus Wajib Pajak namun Wajib Pajak tidak ada dan hanya ada asisten rumah tangga.
 - Bahwa asisten rumah tangga tersebut menolak menerima surat hasil pemeriksaan karena takut.
 - Bahwa benar meski permintaan keterangan telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak kepada Terdakwa, tim pemeriksa dan saksi tetap masih memberikan pemahaman secara persuasif agar Terdakwa bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya.
 - Bahwa meskipun telah diberi pemahaman dan penjelasan terhadap terdakwa tentang kewajiban pajaknya, terdakwa dan CV. Lorin Jayaprima tetapi tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi Marselinus Mangiring Tua, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP saat Penyidikan yang telah saksi baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saksi masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi pernah menjabat kepala seksi Pengawasan dan Konsultasi IV dan V KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2017-2021.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala seksi pengawasan di KPP Pratama Medan Polonia adalah melakukan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dan CV. Lorin Jayaprima merupakan salah satu Wajib Pajak yang berada dalam tugas pengawasan dan konsultasi saksi.



- Bahwa dari data internal sistim informasi DJP diketahui bahwa CV. Lorin Jayaprima tidak pernah melaporkan SPT Tahunan PPh Badan.
- Bahwa hal tersebut telah dilakukan himbauan berdasarkan surat himbauan No. S-12570/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 28 April 2015 yang telah diterbitkan sebelumnya.
- Bahwa dari data diketahui kalau CV. Lorin Jayaprima aktif melakukan kegiatan usahanya dan memperoleh penghasilan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan atau menerima surat permohonan sebagai Wajib Pajak Non Efektif dari CV. Lorin Jayaprima.
- Bahwa dari Account representatif sebelumnya yaitu Junita Sijabat data kegiatan usaha CV. Lorin Jayaprima dari surat himbauan yang terekam di Sistem Informasi Perpajakan (Aproweb) dikirimkan surat konfirmasi bukti potong PPh pasal 22 ke KPP Madya Medan tempat Wajib Pajak penerbit bukti potong terdaftar dan ke Wajib Pajak Penerbitnya langsung PT. Indo Cafco untuk mendapatkan ada tidaknya bukti potong PPh Pasal 22 tersebut.
- Bahwa dengan tidak disampaikan SPT CV. Lorin Jayaprima maka berakibat pada tidak diketahui berapa kewajiban PPh badan CV. Lorin Jayaprima yang harus dibayar ke negara sebagai pajak.
- Bahwa dengan tidak ada menyampaikan SPT tahunan oleh CV. Lorin Jayaprima selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, maka ada indikasi CV. Lorin Jayaprima tidak melaksanakan kewajiban PPh Badan. Padahal diketahui kegiatan CV. Lorin Jayaprima ada melakukan jual beli kopi dengan lawan transaksi PT. Indo Cafco.
- Bahwa berdasarkan data yang berasal dari pihak ketiga yang langsung bertransaksi dengan Wajib Pajak dalam hal ini CV. Lorin Jayaprima maka data tersebut kedudukannya kuat dan diyakini kebenarannya.
- Bahwa berdasarkan surat himbauan yang telah dikirimkan oleh Wajib Pajak S-12570/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 28 April 2015 peredaran usaha CV. Lorin Jayaprima berdasarkan bukti potong PPh Pasal 22 adalah:
 - a) Tahun 2011 jumlahpenjualansebesarRp. 97.392.338.746
 - b) Tahun 2012 jumlahpenjualansebesarRp. 52.293.179.312
 - c) Tahun 2013 jumlahpenjualansebesarRp. 33.434.298.777
 - d) Tahun 2014 jumlahpenjualansebesarRp.33.317.334.718
- Bahwa KPP Pratama Medan Polonia ada menerbitkan Laporan Informasi, Data, dan Pengaduan (IDL) Nomor LAP-3079/WPJ.01/KP.03/2018 tanpa tanggal Januari 2018 atas data bukti potong PPh Pasal 22 dan telah



dilakukan himbauan kepada terdakwa selaku direktur CV. Lorin Jayaprima tetapi tidak pernah ditanggapi surat himbauan tersebut.

- Bahwa dari konfirmasi bukti potong PPh Pasal 22 dan Laporan Audit atas CV. Lorin Jayaprima diketahui kalau memiliki kegiatan usaha dan memperoleh penghasilan tahun 2011 dan 2012 tetapi Wajib Pajak tidak menyampaikan Laporan SPT Tahunan PPh Badan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menolak sebagian keterangan saksi dan menganggap tidak benar.

5. Saksi Junita Sijabat, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP saat Penyidikan yang telah saksi baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saksi masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut.

- Bahwa saksi pernah bertugas di KPP Pratama Medan Polonia Tahun 2014 sebagai AR dengan tugas Melakukan pengawasan Wajib Pajak yang menjadi wilayah pengawasannya.

- Bahwa CV. Lorin Jayaprima memiliki NPWP 02.199.633.5-121.000 yang terdaftar di KPPP Medan Polonia sejak 19 Februari 2003.

- Bahwa pengurus dari CV. Lorin Jayaprima tersebut Direktornya adalah Dermawati Turnip dan Komisaris Bonarsius Girsang.

- Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, CV. Lorin Jayaprima hanya menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPN untuk masa Pajak Januari s.d Desember 2011 dan masa Maret 2012.

- Bahwa untuk masa lainnya, CV. Lorin Jayaprima tidak pernah melaporkan SPT Masa.

- Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan 2014, CV. Lorin Jayaprima tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan ke KPP.

- Bahwa dari data *Approweb* pernah diterbitkan SP2DK yang ditujukan kepada CV Lorinjaya Prima.

- Bahwa dari Laporan Informasi Data dan Pengaduan (IDL) Nomor LAP-3079/WPJ.01/KP.03/2018 Januari 2018 merupakan IDLP atas CV. Lorinjaya Prima untuk tahun 2011 dan 2012 yang bersumber dari Hasil Klarifikasi Data Bukti Potong PPh Pasal 22 Tahun 2011-2012 yang bersumber dari Data Hasil Analisis CTA yang menyatakan peredaran usaha (omset) CV. Lorinjaya



Prima atas penyerahan biji kopi tidak sesuai dengan data bukti potong PPh Pasal 22 dari PT. Indo Cafco.

- Bahwa surat himbauan Nomor Surat S-12570/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 28 April 2015 pada awalnya adalah data CTA dari kantor pusat berupa data bukti potong PPh Pasal 22 atas transaksi penjualan kopi CV LJP ke PT. Indo Cafco selama tahun 2011 s.d 2013.

- Bahwa dari KPP di ketahui terdapat bukti potong PPh Pasal 22 untuk tahun 2014 sehingga atas data bukti potong PPh pasal 22 dari tahun 2011 s.d Tahun 2014 tersebut dijadikan dasar untuk menerbitkan surat himbauan no Surat S-12570/WPJ.01/ KP.03/2015 tanggal 28 April 2015.

- Bahwa saksi tidak melakukan kunjungan kelokasi alamat Wajib Pajak karena telah dilakukan A.R. sebelumnya berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) No. LAP-104/WPJ.01/KP.0310/2015 Tanggal 12 Juni 2015.

- Bahwa Laporan Informasi Data dan Pengaduan (IDLP) Nomor LAP-3079/WPJ.01/KP.03/2018 tanpa tanggal Januari 2018 merupakan IDLP atas CV LJP untuk tahun 2011 dan 2012 yang bersumber dari Hasil Klarifikasi Data Bukti Potong PPh Pasal 22 Tahun 2011-2012 yang bersumber dari Data Hasil Analisis CTA yang menyatakan peredaran usaha (omset) CV LJP atas penyerahan biji kopi tidak sesuai dengan data bukti potong PPh Pasal 22 dari PT. Indo Cafco.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

6. Saksi Arifuddin, disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP saat Penyidikan yang telah saksi baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saksi masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut.

- Bahwa CV LJP salah satu Wajib Pajak yang berada dalam pengawasan saya di Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Pratama Medan Polonia. CV LJP berdasarkan data Sistem Informasi Perpajakan termasuk Wajib Pajak tidak tertib atau tidak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- Bahwa surat himbauan disampaikan melalui Pos.

- Bahwa saksi dan staff AR pernah melakukan kunjungan visit kealamat Wajib Pajak terdaftar yaitu di Jalan Falmboyan Dalam No.8 Tanjung Selamat Medan. Ketika berada dialamat tersebut rumah dalam keadaan kosong



berdasarkan informasi terdapat rumah lain Wajib Pajak di jalan terompet No.105, sehingga kami melakukan Kunjungan kealamat lain di jalanterompet No.105 Medan Selayang Medan.

- Bahwa kegiatan kunjungan tersebut dilakukan pada tanggal 28 April 2015 dengan membawa Surat Tugas dari Kepala Kantor KPP Medan Polonia dengan membawa copy surat himbauan No. No.12570 tanggal 28 April 2015. Pada saat itu kami bertemu dengan Dermawati Turnip dan Surat himbauan tersebut telah saksi serahkan ke Dermawati Turnip.
 - Bahwa Wajib Pajak (Dermawati Turnip) tidak menanggapi surat himbauan kami.
 - Bahwa oleh karena himbauan pertama tidak ditanggapi, kami tindak lanjuti dengan surat himbauan yang kedua No.S-13726 tanggal 21 Mei 2015 yang ditujukan ke Bonarsius Girsang (CV. Lorin Jayaprima) yang beralamat di Jalan Terompet 105 Medan Selayang, surat himbauan kedua kami kirim lewat pos.
 - Bahwa benar telah dilakukan pemanggilan untuk konseling terhadap Wajib Pajak.
 - Bahwa Wajib Pajak (Dermawati Turnip) tidak pernah menanggapi atas surat panggilan konseling yang telah kami kirim kewajiban Pajak.
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa Wajib Pajak CV. Lorin Jaya Prima tidak menyampaikan pembukuan atau catatan dan saksi tidak pernah menerima informasi data laporan keuangan CV. Lorin Jayaprima.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

7. Saksi Lasmey Nurwini Sinaga, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP saat Penyidikan yang telah saksi baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saksi masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi pernah menjadi AR KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2010 sd 2015.
- Bahwa CV. Lorin Jayaprima salah satu Wajib Pajak yang terdaftar di KPPP Medan Polonia dan masuk dalam pengawasan saksi sebagai *Account Representative*.
- Bahwa pengurus CV. Lorin Jayaprima secara pribadi tidak kenal.



- Bahwa saat saksi AR pernah menerbitkan Surat Himbuan kepada CV. Lorin Jayaprima yang berisi himbuan untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2011 s.d. 2014.
- Bahwa saksi pernah melakukan kegiatan Visit atau kunjungan kealamat CV. Lorin Jayaprima di Jalan Flamboyan Dalam No.8 Tanjung selamat.
- Bahwa saksi pernah mengirim surat panggilan Konseling ke CV. Lorin Jayaprima.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah CV. Lorin Jayaprima ada menanggapi surat panggilan tersebut.
- Bahwa saksi bersama Arifuddin pernah melakukan kegiatan kunjungan ke alamat CV. Lorinjaya Prima di Jalan Flamboyan dalam No.8 Medan tuntungan tetapi kami tidak bertemu dengan Wajib Pajak.
- Bahwa berdasarkan informasi Pengurus Wajib Pajak CV LJP mempunyai tempat tinggal lain di Jalan Terompet No.105, di alamat tersebut kami bertemu dengan Terdakwa Dermawati Turnip yang saat itu mengaku sebagai pemilik CV. Lorin Jayaprima. Saat itu kami dari KPP Medan Polonia menjelaskan tentang data yang ada di dalam surat himbuan yang sudah kami kirim, tanggapan dari Terdakwa Dermawati Turnip akan memberikan klarifikasi dengan datang ke kantor KPP Medan Polonia.
- Bahwa sejak visit Terdakwa Dermawati Turnip tidak langsung datang mengklarifikasi surat himbuan kami, tetapi setelah kami buat surat undangan konseling maka Terdakwa Dermawati Turnip ada datang ke KPP Medan Polonia untuk dilakukan konseling atas surat himbuan tersebut. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menolak sebagian keterangan saksi dan menganggap tidak benar.

8. Saksi Janita Siboro, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP saat Penyidikan yang telah saksi baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saksi masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi adalah pegawai PT. Indo Caftco sejak tahun 2009 s.d. sekarang dengan jabatan terakhir sebagai Kepala bagian *Purchasing*.
- Bahwa saksi mengenal CV. Lorin Jayaprima dengan Bonarsius Girsang orang dari CV. Lorin Jayaprima.



- Bahwa saksi mengenal Bonarsius Girsang juga meneruskan purchasing terdahulu yang jika bertransaksi dengan CV. Lorin Jayaprima berhubungan dengan Bonarsius Girsang sehingga saksi tahunya Bonarsius Girsang orang yang bertanggungjawab atas transaksi pembelian PT. Indo Cafco dari CV. Lorin Jayaprima.
- Bahwa saksi tidak tahu apa kedudukan Bonarsius Girsang di CV. Lorin Jayaprima.
- Bahwa dalam masa 2011 s.d. 2014 PT. Indo Cafco pernah membeli kopi dari CV. Lorin Jayaprima.
- Bahwa Bonarsius Girsang tidak pernah menawarkan menjual kopi dari perusahaan lain selain CV. Lorin Jayaprima.
- Bahwa sudah menjadi kebijakan di PT. Indo Cafco transaksi kopi hanya dengan pihak yang membawa kopi dan selama ini PT. Indo Cafco di PT. Indo Cafco mengenal Bonarsius Girsang sebagai pihak yang menjual kopi dari CV. Lorin Jayaprima.
- Bahwa jika ada misalnya Bonarsius Girsang menjual kopi mewakili pihak lain selain CV. Lorin Jayaprima akan ditolak PT. Indo Cafco.
- Bahwa PT. Indo Cafco tidak pernah bertransaksi dengan pihak ketiga atau perantara karena akan membingungkan pembukuan dan pencatatan PT. Indo Cafco.
- Bahwa pembelian kopi dari CV. Lorin Jayaprima berdasarkan kesepakatan jualbeli dengan pihak CV. Lorin Jayaprima yaitu antara bagian purchasing.
- Bahwa PT. Indo Cafco tidak pernah membeli kopi dari perseorangan atau petani kopi.
- Bahwa PT. Indo Cafco tidak pernah melakukan pembayaran via transfer antara bank dimana penerima transfer pembayaran dari PT. Indo Cafco bukan atas nama CV. Lorin Jayaprima.
- Bahwa selama periode tahun 2011 sd 2014 pembayaran yang dilakukan PT. Indo Cafco selalu mengacu kedokumen Arabica Coffee Purchasing Note yang menyebutkan nama vendor.



- Bahwa dalam transaksi antara PT. Indo Cafco dengan CV. Lorin Jayaprima di dokumen Arabica Coffee Purchasing Note selalu menyebutkan nama vendor penjual kopi ke PT. Indo Cafco adalah CV. Lorin Jayaprima.

- Bahwa semua pembelian kopi tahun 2011 sd 2014 dengan bukti dokumen yang telah diserahkan dimana surat jalan berasal dari CV. Lorin Jayaprima adalah benar 100% memang benar milik CV. Lorin Jayaprima yang dijual ke PT. Indo Cafco.

- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan informasi kepada CV. Lorin Jayaprima bahwa kewajiban pajak CV. Lorin Jayaprima, akan disetor dan dilaporkan oleh pihak PT. Indo Cafco. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

9. Saksi Pristian Renggalita, disumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP saat Penyidikan yang telah saksi baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saksi masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut.

- Bahwa PT. Olam Indonesia bergerak di bidang perdagangan besar hasil bumi perkebunan terutama kopi dan kakao.

- Bahwa Kopi dan Kakao terbagi atas bagian dan manajemen yang berbeda.

- Bahwa saksi hanya bertugas di bagian purchasing kopi saja.

- Bahwa PT. Olam Indonesia murni perusahaan perdagangan, tidak melakukan kegiatan pengolahan kopi atau kakao menjadi produk tertentu.

- Bahwa PT. Olam Indonesia hanya melakukan proses sortir atau pengeringan terhadap kopi yang dibeli sampai standar kopi menjadi grade satu, setelah kopi memenuhi standar grade satu baru bias dilakukan penjualan.

- Bahwa berdasarkan data yang kami miliki, pembelian kopi PT. Olam Indonesia dari CV. Lorin Jayaprima baru dilakukan tahun 2013 dan 2014.



- Bahwa jumlah Kopi yang dibeli tahun 2013 sebanyak 59.711,1 M Ton dengan nilai rupiah Rp.1.542.773.714,- dengan nilai PPh Pasal 22 yang sudah dipotong dan disetor sebesar Rp.3.856.934,- dengan jumlah pembayaran yang dikirim ke CV. Lorin Jayaprima sebesar Rp.1.538.916.780,-.
- Bahwa tahun 2014 Jumlah Kopi yang dibeli 384,979,6 M Ton dengan nilai Rp 22.634.433.855,- dengan PPh Pasal 22 yang telah dipungut dan disetor senilai Rp.56.586.085,- dengan jumlah pembayaran ke CV. Lorin Jayaprima sebesar Rp 22.577.847.770,-
- Bahwa saksi menyatakan bahwa CV. Lorin Jayaprima adalah perusahaan yang memang aktif melakukan usaha penjualan kopi pada tahun 2011 sd 2014 Karena dari data dokumen nota timbang surat jalan, laporan quality laboratorium dan nota pembayaran yang dibuat PT. Olam Indonesia, CV. Lorin Jayaprima benar adalah perusahaan yang aktif melakukan penjualan kopi ke PT. Olam Indonesia.
- Bahwa dari dokumen pembelian kopi PT. Olam Indonesia, dari surat jalan pengiriman kopi tercantum nama CV. Lorin Jayaprima atau kadang-kadang nama Bonarsius Girsang tanpa menggunakan surat jalan berlabel CV. Lorin Jayaprima.
- Bahwa berdasarkan dokumen pembelian kopi PT. Olam Indonesia dari CV. Lorin Jayaprima dilakukan ditahun 2013 dan 2014.
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

10. Saksi Warda Nur Hakiki, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada BAP saat Penyidikan yang telah saksi baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan saksi masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut.
- Bahwa PT. Olam Indonesia bergerak di bidang perdagangan besar hasil bumi perkebunan terutama kopi dan kakao.
- Bahwa PT. Olam Indonesia tidak melakukan kegiatan pengolahan kopi atau kakao menjadi produk tertentu. PT. Olam Indonesia hanya melakukan proses



sortir atau pengeringan terhadap kopi yang dibeli sampai standar kopi menjadi grade satu, setelah kopi memenuhi standar grade satu baru bias dilakukan penjualan.

- Bahwa PT. Olam Indonesia memperoleh kopi dari wilayah di Sumatera Utara dan Aceh.

- Bahwa pembayaran PT. Olam Indonesia di lakukan dengan cara transfer antar rekening yaitu dari Rekening PT. Olam Indonesia di BCA ke rekening supplier. Tetapi pada kondisi tertentu dimana supplier menginginkan pencairan dana yang lebih cepat dan meminta pembayaran secara tunai, PT. Olam Indonesia menerbitkan cek tunai.

- Bahwa PT. Olam Indonesia tidak pernah membeli kopi dari perorangan atau badan Hukum.

- Bahwa setiap pembelian kopi dari pihak penjual dilakukan pembayaran ke pihak penjual yang sama juga.

- Bahwa dari dulu PT. Olam Indonesia selalu mengkomunikasikan bahwa pembayaran telah dikirim ke nomor rekening yang diberikan oleh supplier yang memasok kopi ke PT. Olam Indonesia.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar 2 (dua) orang keterangan saksi meringankan (ade charge), sebagai berikut:

1. Saksi Empri Halasson Tampubolon, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan di CV. Lorin Jayaprima dimana direktornya adalah Dermawati Turnip (Terdakwa).

- Bahwa tugas saksi adalah freeland dan dipanggil jika dibutuhkan.

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Dermawati Turnip untuk meminta dokumen dari PT. Olam Indonesia maupun PT. Indo Cafco.

- Bahwa saksi tidak tahu apa itu dokumen yang mau diminta.



- Bahwa dokumen yang saksi minta tersebut tidak diberikan oleh pihak dari PT. Olam Indonesia maupun PT. Indo Cafco.

2. Saksi Binsar Hutagalung, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan di CV. Lorin Jayaprima dengan posisi supir dimana direktornya adalah Dermawati Turnip (Terdakwa).

- Bahwa tugas saksi adalah membawa truk untuk angkut kopi dan itu jika ada yang mau diangkut saksi dipanggil.

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Dermawati Turnip untuk meminta dokumen dari PT. Olam Indonesia maupun PT. Indo Cafco.

- Bahwa saksi tidak tahu apa itu dokumen yang mau diminta.

- Bahwa dokumen yang saksi minta tersebut tidak diberikan oleh pihak dari PT. Olam Indonesia maupun PT. Indo Cafco.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan 2 (dua) Ahli, sebagai berikut:

1. Ahli Empri Halasson Tampubolon, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai ahli dibidang perpajakan dalam perkara ini.

- Bahwa keterangan Ahli pada BAP saat Penyidikan yang telah ahli baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan ahli masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut.

- Bahwa keahlian Ahli di bidang hukum pidana berdasarkan jenjang pendidikan Sarjana (S1), Magister Hukum (S2) dan Doktor Hukum (S3), semuanya jurusan hukum pidana.

- Bahwa **Unsur-Unsur Delik** adalah:

1. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "Tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" (actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (dolus) dan kealpaan (schuld).



Kesengajaan terdiri dari 3(tiga) bentuk, yakni kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoogmerk), kesengajaan dengan keinsafan pasti (opset als zekerheidsbewustzijn) dan kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus eventualis).

Sementara Kealpaan terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu : tidak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.

2. Unsur Obyektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- Act (delikcommission), perbuatan aktif atau perbuatan positif.
- DelikOmission, perbuatan pasif atau negatif.Perbuatan mendiamkan atau membiarkanAkibat (result) perbuatan manusiaKeadaan-keadaan (circumstances).Keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- Sifat dapat dihukum atau sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan membebaskan pelaku dari hukuman. Sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, yakni larangan atau perintah.

- Bahwa pidana pajak masuk dalam asas hukum **LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS**.Ketentuan yang khusus dapat mengesampingkan ketentuan yang umum. Jika terdapat tindak pidana di bidang perpajakan maka Pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal pidana di dalam UU KUP. Sementara proses penyidikan dan pembuktian tetap mengacu pada pasal-pasal dalam KUHAP.

- Bahwa hukum pajak termasuk dalam bagian "Administrative Penal Law". Hukum administrasi yang di dalamnya terdapat sanksi pidana. Oleh karena Fungsi Pajak itu sendiri adalah Fungsi Budgeter untuk kepentingan penerimaan negara.Penerapan asas Ultimum remedium pada hukum pajak khususnya pidana pajak didasarkan pada sifatnya yang "ius singular" atau memiliki sistem norma dan sanksi sendiri berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*. Asas ultimum remedium ini juga diterapkan dalam penegakan hukum yaitu pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan) bahkan penyidikan. Masih terdapat alasan pemaaf agar seseorang tidak dipidana dan menjalani hukuman dipenjara melalui mekanisme Pasal-pasal yang ada dalam Undang-undang perpajakan.

- Penerapan Asas Ultimum remedium tujuannya untuk mendukung penyelesaian perkara tindak pidana di bidang perpajakan mengutamakan



kepentingan penerimaan negara sehingga asas lainnya berupa kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dapat secara beriringan dicapai

- Bahwa makna kata “dapat” pada unsur “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”, bahwa kerugian itu bisa bersifat nyata dan juga bisa bersifat potensi kerugian yang dapat dihitung. Sebagai acuan bahwa Unsur “dapat menimbulkan kerugian” terdapat juga pada Pasal 263 KUHP, yang menurut Adami Chazawi bahwa tidak penting bagi siapa kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian Surat palsu atau Surat yang dipalsu. Kemungkinan akan adanya kerugian berlaku bagi siapa saja. Siapapun orang berpeluang mengalami kerugian dan kemungkinan akan kerugian beserta macamnya kerugian itu harus dibuktikan.
- Bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan ketentuan pidana dibidang perpajakan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Objektif:

- Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Kedua unsur objektif di atas merupakan unsur perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan, sehingga dapat terpenuhi ada atau tidaknya perbuatan pidana di bidang perpajakan.

Unsur Subjektif

“Dengan Sengaja”, jika suatu pasal menyebutkan kata “dengan sengaja”, maka tiga bentuk kesengajaan dapat diterapkan untuk mengukur terpenuhi atau tidak unsure kesalahan ini.

- Bahwa kesengajaan adalah sesuatu yang dikehendaki sedangkan kealpaan adalah tidak dikehendaki.
- Bahwa bentuk-bentuk kesengajaan itu yaitu : Kesengajaan sebagai maksud (OpzetOogmerk), Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (Opzet metBewustheid van Zekerheid of Noodzakelijkheid)dan Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (Opzet met Waarschijnlijkheid Bewustzinj atau dolus eventualis).



- Bahwa menurut MVT untuk terpenuhinya unsur 'dengan sengaja' diperlukan waktu untuk berpikir dengan tenang, Sudah cukup bagi pelaku untuk berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. Rumusan "Sengaja" dicantumkan dalam norma pidana baik dalam KUHP atau undang-undang lain yang bersifat khusus yang mengatur tentang pidana juga. Misalnya Pasal 340 KUHP 'Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dst....". Dalam KUHP terdapat juga rumusan "Sengaja" yang telah tercakup dalam arti atau makna suatu kata. Artinya hal tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa sengaja. Misalnya Pasal 167 KUHP "Barang siapa dengan paksa dan melawan hukum memasuki sebuah rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup.

- Bahwa Untuk melihat adanya unsure kesengajaan dalam kasus ini, maka dapat diverifikasi dari fakta-fakta di atas sebagai berikut:

1. Bahwa sepanjang tahun 2011 s.d 2014 CV LORIN JAYAPRIMA telah melakukan kegiatan usaha yaitu penjualan biji kopi kepada PT INDO CAFCO dan PT OLAM INDONESIA dimana biji kopi itu diperoleh dari petani Kopi. CV LORIN JAYAPRIMA juga sudah menerima pembayaran atas penjualan kopi kepada kedua perusahaan tersebut tetapi dari tahun 2011 sampai dengan 2014 CV LORIN JAYAPRIMA tidak pernah menyampaikan/melaporkan SPT-

2. Bahwa secara Administrasi perpajakan, AR KPP Pratama Medan Polonia sudah melakukan teguran/himbauan atas ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 s.d 2014. Wajib Pajak juga sudah diperiksa oleh KPP Pratama Medan Polonia. Atas kegiatan administrasi perpajakan ini sebagai upaya persuasif DJP terhadap wajib pajak juga tidak direspon dengan baik oleh Wajib Pajak. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Tersangka sudah mengetahui kewajiban yang harus dilakukannya untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 s.d 2014, namun tidak dilakukan oleh Tersangka. Dengan demikina unsur "kesengajaan" pada kasus ini patut diduga telah terpenuhi

- Bahwa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan menurut ahli unsur perbuatan melawan hukum.



- Bahwa makna kata “dapat” pada unsur “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”, bahwa kerugian itu bisa bersifat nyata dan juga bisa bersifat potensi kerugian yang dapat dihitung. Sebagai acuan bahwa Unsur “dapat menimbulkan kerugian” terdapat juga pada Pasal 263 KUHP, yang menurut Adami Chazawi bahwa tidak penting bagi siapa kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian Surat palsu atau Surat yang dipalsu. Kemungkinan akan adanya kerugian berlaku bagi siapa saja. Siapapun orang berpeluang mengalami kerugian dan kemungkinan akan kerugian beserta macamnya kerugian itu harus dibuktikan.

2. Ahli Fatwa Furqana, berjanji dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebagai ahli dibidang perpajakan dalam perkara ini.
- Bahwa keterangan Ahli pada BAP saat penyidikan yang telah ahli baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan Ahli masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut.
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang Peraturan Perpajakan dan cara Menghitung dalam perpajakan.
- Bahwa Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sering disebut Undang-Undang KUP;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sering disebut Undang-Undang PPh;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sering disebut Undang-Undang PPN;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, sering disebut Undang-Undang PBB.
 - e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, sering disebut Undang-Undang BPHTB.

f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, sering disebut Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

- Bahwa terhadap kejahatan atau tindak pidana perpajakan yang terjadi pada Tahun Pajak 2016 di berlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sering disebut Undang-Undang KUP.
- Bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Bahwa berdasarkan faktor dominan untuk menentukan timbulnya kewajiban pajak, pajak dapat dibedakan atas Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Sedangkan berdasarkan mekanisme pemungutannya, pajak dapat dibedakan atas Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.
- Bahwa yang dimaksud pajak subjektif adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama sekali oleh keadaan subjek pajaknya walaupun kewajiban pem-bayaran pajak tergantung pada keadaan objek pajaknya, contoh Pajak Penghasilan (PPh).
- Bahwa yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan oleh keadaan objek pajaknya, contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Bahwa Pajak Langsung misalnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor.
- Bahwa Pajak Tidak Langsung misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bea Masuk, Pajak Ekspor.
- Bahwa sistem dan mekanisme perpajakan yang berlaku di Indonesia mempunyai ciri dan corak tersendiri yaitu **self assessment**. Lebih jelas lagi dalam Penjelasan Umum dan UU. No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum



Dan Tata Cara Perpajakan ditegaskan bahwa ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah:

- a. Bahwa pungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.
 - b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - c. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.
 - d. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap menganut sistem self assessment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Wajib Pajak" sesuai dengan yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang mana sesuai Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan se-bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dise-butkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



- Bahwa setiap Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan menandatangani serta menyampaikan kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.
- Bahwa kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Undang-Undang KUP).
- Bahwa tidak menyampaikan SPT memiliki sanksi pidana sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- Bahwa apabila terdapat Wajib Pajak yang dalam suatu Tahun Pajak, Masa Pajak, atau bagian Tahun Pajak:
 - Bahwa pada prinsipnya semua barang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali barang-barang yang ditentukan oleh UU seperti bahan pokok.
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 15A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sering disebut UU PPN, berbunyi **Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.**
 - Bahwa setiap Wajib Pajak pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan SPT dan melaporkan penghasilan dalam SPT tersebut. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT adalah Wajib Pajak yang mempunyai status NE (Non Efektif).
 - Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang KUP disebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara...dst. Maka berlaku terhadap semua Surat Pemberitahuan yang tidak disampaikan secara sengaja yang menjadi kewajiban Wajib Pajak yang telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak pada saat Wajib Pajak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak maupun pada saat permohonan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.



- Bahwa apabila dalam kurun waktu tahun pajak 2011 sampai dengan 2014 CV LORIN JAYA PRIMA tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2011 sampai dengan 2014 dimana KPP Pratama Medan Polonia telah menghimbau, maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum.
- Bahwa pengurus aktif suatu Badan Usaha tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan di perusahaannya.
- Bahwa menurut Ahli yang mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan di CV. Lorin Jayaprima adalah Dermawati Turnip sebagai Direktur.
- Bahwa sepanjang Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan bukti yang bersangkutan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan melalui Bukti Penerimaan Surat yang diberikan oleh petugas pajak dan di dalam SIDJP tidak terdapat catatan bahwa Wajib Pajak telah menyampaikan SPT, maka Ahli berpendapat bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi unsur tidak menyampaikan SPT.
- Bahwa berdasarkan bukti yang telah dilakukan penyitaan dan keterangan saksi saksi yang diperoleh selama proses penyidikan yang telah disampaikan kepada Ahli pendapat Ahli terdapat beberapa data yang tidak diketahui untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang seharusnya terutang dimana Wajib Pajak tidak bisa memperlihatkan pembukuan maupun bukti-bukti pendukung terkait kegiatan usahanya.
- Bahwa untuk menghitung kerugian pada pendapatan negara Ahli akan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang PPh dan KEP-02/PJ.7/1991 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto Bagi Wajib Pajak Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan Tetapi Tidak Menyelenggarakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa dari Norma Penghitungan Penghasilan Neto dihubungkan dengan jenis usaha CV. Lorin Jayaprima yang di Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Nomor 6231 Perdagangan eceran hasil industri (bahan) makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau dengan besaran Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar 10,5%.



- Bahwa dari besaran peredaran bruto yang dijadikan dasar untuk menghitung kerugian pada pendapatan negara dalam kasus ini adalah jumlah penghasilan CV Lorin Jayaprima berdasarkan dokumen bukti pemungutan PPh Pasal 22 Tahun 2011 s.d. 2014 sehingga akibat perbuatan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2011 s.d. 2014, kerugian pada pendapatan negara dihitung sebagai berikut:

	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Peredaran Bruto					
Penjualan Kopi ke PT Indo Cafco	97.392.338.746	52.216.920.862	36.861.405.937	71.201.414.775	257.672.080.320
Penjualan Kopi ke PT Olam Indonesia			1.542.773.714	22.634.433.855	24.177.207.569
Jumlah Penjualan	97.392.338.746	52.216.920.862	38.404.179.651	93.835.848.630	281.849.287.889
Norma Penghitungan Penghasilan Neto	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%
Penghasilan Kena Pajak	10.226.195.000	5.482.776.000	4.032.438.000	9.852.764.000	29.594.173.000
Pajak Penghasilan Terutang	2.556.548.750	1.370.694.000	945.109.513	2.463.191.000	7.335.543.263
Kredit Pajak:					
PPh Pasal 22 dipungut oleh PT Indo Cafco	243.460.860	130.542.275	92.153.548	178.003.525	644.160.208
PPh Pasal 22 dipungut oleh PT Olam Indonesia			3.856.934	56.586.085	60.443.019
Jumlah Kredit Pajak	243.460.860	130.542.275	96.010.482	234.589.610	704.603.227
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	2.313.087.890	1.240.151.725	849.099.031	2.228.601.390	6.630.940.036

- Bahwa dengan demikian nilai kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan CV LJP tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2011 s.d. 2014 adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp.6.630.940.036,- (enam milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Dermawati Turnip**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP saat penyidikan yang telah Terdakwa baca dan tandatangani adalah benar dan sampai saat ini keterangan Terdakwa masih tetap sebagaimana dalam BAP tersebut.
- Bahwa CV. Lorin Jayaprima didirikan tahun 2003 dengan pengurus Terdakwa sendiri sebagai Direktur dan suami Terdakwa bernama Bonarsius Girsang sebagai Persero comanditer.
- Bahwa CV. Lorin Jayaprima didirikan untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank untuk tambahan modal, yaitu modal usaha mengangeni kopi dari petani. Selama ini sebelum ada CV. Lorin Jayaprima, pembelian dilakukan dengan laku bayar atau kepercayaan dan kami mendapatkan fee dari penjualan kopi.



- Bahwa jenis kopi yang dijual oleh CV. Lorin Jayaprima ada dua jenis kopi yang paling banyak kopi jenis arabica atau kopi sigalarutang atau kopi ateng, satu lagi jenis robusta tetapi jumlahnya sedikit sekali.
- Bahwa metode pembelian kopi sesuai keadaan dan kesepakatan saat itu yaitu:
 1. Jika kami memiliki uang maka kami langsung membeli kopi tersebut dari petani, kopinya diantar oleh petani atau kami yang menjemput tergantung kesepakatan yang menanggung ongkos.
 2. Jika tidak cukup uang maka dengan cara laku bayar artinya kopi petani kami bayar setelah laku dibayar perusahaan yaitu CV. Indo Cafco dan PT. Olam Indonesia.
- Bahwa lawan transaksi penjualan kopi oleh CV. Lorinjaya Prima adalah CV. Indo Cafco dan PT. Olam Indonesia.
- Bahwap pembayaran dilakukan dengancara transfer antar rekening bank atau dengan menerbitkan cek. Jika pembayaran transfer mungkin dilakukan di rekening Bank BNI, sedangakn pencairan cek paling sering kami lakukan di RABO Bank di jalan Asia.
- Bahwa CV. Lorin Jayaprima pernah menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2004 sd 2010.
- Bahwa laporan SPT PPh Badan CV. Lorin Jayaprima tersebut di buat oleh Hotlin Opusunggu, seorang free lance yang Terdakwa kenal di kegiatan gereja. Dia datang menawarkan diri membantu pelaporan pajak CV LJP karena tahu CV LJP baru berdiri dari notaris tempat akte pendirian perusahaan dibuat.
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 pihak PT. Indo Cafco akan membantu membayar pajak kami dan melaporkan SPT tahunan, sehingga kami memberhentikan Hotlin Ompusunggu karena saat itu Terdakwa menjalani program bayi tabung yang pertama yang membutuhkan Terdakwa badrest total sehingga tidak bisa beraktivitas diluar. Tetapi Terdakwa tidak ingat siapa orang PT. Indo Cafco yang mengatakan hal tersebut kepada suami Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah dihibau dan pernah datang kekantor pajak dan pada saat di datangi AR, Lasmey Sinaga menyebutkan secara verbal bahwa utang pajak CV. Lorin Jayaprima sebesar 6 (enam) milyar dan saat di BAP oleh Muhammad Lutfhi pada tanggal 21 Maret 2022 secara verbal menyebutkan bahwa utang pajak CV. Lorin Jayaprima sebesar 2,5 (dua koma lima) milyar yang membuat kebingungan Wajib Pajak.



Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

A01	Fotokopi Akte Notaris Pauline Sinaga, SH, MKN Nomor 01 tanggal 15 Januari 2003 Tentang Pendirian Perseroan Komanditer C.V. LORIN JAYAPRIMA.
A02	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak 02 sd 09 tahun 2011 dan Masa Pajak 11 sd 12 tahun 20112. Satu set surat tugas No.12569 tanggal 28 April 2015 dilampiri :3. Laporan pelaksanaan visit No.104/WPJ.01/KP.0301/2015 tanggal 12 Juni 2015.4. Surat Tugas No.30073/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 08 Agustus 2017 no. Laporan Visit No.1275/WPJ.01/KP.03010/2017 tanggal 11 September 2017.5. Surat tugas ST-1336/WPJ.01/KP.03/2021 tanggal 30 September 2021 dengan laporan visit LPK-4/WPJ.01/KP.0307/2021 tanggal 04 Oktober 2021.6. S-12570/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Himbaiaun/Klarifikasi untuk melakukan penyetoran dan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 sd 2014.7. S-14414/WPJ.01/KP.0310/2015 tanggal 09 Juni 2015 peihal panggilan konseling8. Und-14451/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 10 Juni 2015 perihal Undangan sosialisasi.9. S-24839/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 21 September 2015 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.10. S-289575/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal Desember 2015 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun pajak 2012.11. S-27697/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Konfirmasi Bukti Potong PPh Pasal 2212. S-27698 tanggal 31 Juli 2017 perihal Konfirmasi Bukti Potong PPh Pasal 22.13. S-2413/WPJ.01/KP.0703/2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal jawaban konfirmasi Bukti potong PPh Pasal 22 a.n CV LORIN JAYAPRIMA.14. S-29948/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 03 Agustus 2017 perihal Permintaan laporan Audit KAP tahun buku 2011.15. S-29949/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 03 Agustus 2017 perihal Permintaan laporan Audit KAP tahun buku 201216. S-28964/WPJ.01/KP.03/2016 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Himbauan memanfaatkan Program Amnesty Pajak17. S-12570/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 28 April 2015 perihal himbauan/Klarifikasi untuk melakukan penyetoran dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 dan 2012.18. S-13726/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal himbauan/Klarifikasi kedua untuk melakukan penyetoran dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 dan 2014.19. SR-28850/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 30 November 2015 perihal permintaan Laporan Audt KAP tahun 2012.20. BA Permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan kepada Wajib Pajak CV LJP melalui telpon.21. LPAD No.PEM:01009688\121\aug\2017 tanggal 14 Aug-17 Surat lain-lain dari Akuntan Publik (KAP) JOACHIM POLTAK LIAN & REKAN berupa laporan Auditor Independen atas lap.Keuangan CV LORIN JAYAPRIMA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011.22. S-29941/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 03 Agustus 2017 perihal Permintaan Daftar laporan Jasa Audit KAP23. S-983/PPPK/2017 tanggal 11 Agustus 2017 perihal Jawaban permintaan Daftar laporan Jasa Audit KAP24. Kronologis IDLP CV LORIN JAYAPRIMA.25. SR-2943/WPJ.01/KP.03/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal usulan IDLP



A03	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Januari sd Desember 2011 2. Prin out Laporan SPT Masa Wajib Pajak tahun 2011 3. SPT Masa PPN Nihil Masa Januari 2011 sd Desember 2011 4. Satu Set Laporan kemajuan pemeriksaan Wajib pajak CV LJP No.LAP-027/PL/WPJ.01/KP.0305/2018 tanggal 27 Desember 2018 tahun pajak 2013 5. Satu set surat ketetapan pajak NIHIL PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 6. Satu Set surat tagihan pajak PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 senilai Rp.100.000,- 7. Satu set surat ketetapan pajak NIHIL PPh Pasal 21 Masa Januari sd Desember 2014 8. Satu Set surat tagihan pajak PPh Pasal 21 Masa Januari sd Desember 2014 senilai Rp.1.200.000,- 9. Satu Set Laporan kemajuan pemeriksaan Wajib pajak CV LJP No.LAP-028/PL/WPJ.01/KP.0305/2018 tanggal 27 Desember 2018 tahun pajak 2014 10. Akte pendirian CV LORIN JAYAPRIMA No.01 tanggal 15 Januari 2003 dari Notaris PAULINE SINAGA
A04	<ol style="list-style-type: none"> 1. Installment Schedule agreement no : 0015138/2/02/02/2011 2. Installment Schedule agreement no :0017406/2/02/04/2012 3. Surat kuasa dari Ricard Nikson Pakpahan kepada Rio Leonardo tanggal 11 November 2021 4. Foto kopi KTP a.n DERMAWATI TURNIP 5. Foto Kopi Permohonan fasilitas pembiayaan konsumen a.n DERMAWATI TURNIP tanggal 20 April 2012 6. Foto Kopi Dokumen perjanjian pembiayaan konsumen No.0017406/2/02/04/2012 tanggal 20 April 2012 7. Foto Kopi surat pesanan barang berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen no.0017406/2/02/04/2012 tanggal 20 April 2012 8. Foto Kopi tanda terima barang berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen no.0017406/2/02/04/2012 tanggal 20 April 2012. 9. Foto Copy Tanda terima tanggal 28 Maret 2013 dari PT DSF kepada DERMAWATI TURNIP dengan lampiran foto kopi BPKB faktur dan kuitansi pembelian. 10. Foto kopi delivery order No.21204028 tanggal 21 April 2012 dari PT Ratu Mobil Sejadad kepada PT Dipo Star Finance yang diterima oleh DERMAWATI TURNIP. 11. Kartu Keluarga a.n BONARSIOUS GIRSANG 12. Formulir Latar Belakang Analisa dan Rekomendasi a.n Dermawati Turnip 13. Rekening koran a,n CV LORIN JAYAPRIMA No.Rek 0154627505 Bank BNI Cabang USU Medan sebanyak 8 lembar
A05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) set Fotokopi dokumen pembukaan rekening nasabah atas nama CV LORIN JAYAPRIMA nomor rekening 6666666695. 2. 1 (satu) set Print Out Rekening Koran atas nama CV LORIN JAYAPRIMA nomor rekening 0154627504 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014. 3. 1 (satu) set Print Out Rekening Koran atas nama CV LORIN JAYAPRIMA nomor rekening 0301708002 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014. 4. 1 (satu) set Print Out Rekening Koran atas nama CV LORIN JAYAPRIMA nomor rekening 0236789915 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014 5. 1 (satu) set Print Out Rekening Koran atas nama CV LORIN JAYAPRIMA nomor rekening 0236799876 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014 6. 1 (satu) Set Fotokopi Surat Keputusan Kredit Nomor MDC/2/0999/R 7. 1 (satu) set Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 2011.269.MDC 8. 1 (satu) set Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 2012.156.MDC 9. 1 (satu) set Fotokopi Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2012.156.MDC 10. 1 (satu) Set Fotokopi Surat Keputusan Kredit Nomor MDC/2/0425/R.
A06	<ol style="list-style-type: none"> 7. Dokumen pembukaan rekening nasabah atas nama BONARSIOUS GIRSANG nomor rekening 2027218888. 8. Dokumen pembukaan rekening nasabah atas nama DERMAWATI TURNIP nomor rekening 0227144128 9. Rekening Koran atas nama BONARSIOUS GIRSANG nomor rekening 2027218888 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014.



	<p>10. Rekening Koran atas nama DERMAWATI TURNIP nomor rekening 0227144128 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014.</p> <p>11. Rekening Koran atas nama BONARSIUS GIRSANG nomor rekening 2027218888 Periode 01/01/2022 s.d. 31/01/2022</p> <p>12. Rekening Koran atas nama DERMAWATI TURNIP nomor rekening 0227144128 Periode 01/01/2022 s.d. 31/01/2022</p>
A07	<p>1. 3 Box Dokumen Pembelian PT INDO CAFCO dari CV LORIN JAYAPRIMA Tahun 2011, 2013, dan 2014</p> <p>2. 1 Box Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan PT INDO CAFCO kepada CV LORIN JAYAPRIMA Tahun 2011 s.d. 2014.</p> <p>3. 4 Set Rekening koran Rabobank nomor 5600001002 a.n. PT INDO CAFCO sebagai bukti pembayaran ke CV LORIN JAYAPRIMA</p>
A08	<p>1. Dokumen pembelian kopi oleh PT Olam Indonesia dari CV Lorin Jayaprima tahun 2013 sebanyak 6 set bukti pembelian beserta kelengkapannya</p> <p>2. Dokumen pembelian kopi oleh PT Olam Indonesia dari CV Lorin Jayaprima tahun 2014 masa :</p> <p>a. April sebanyak 31 Set</p> <p>b. Mei sebanyak 2 Set</p> <p>c. Juni sebanyak 7 Set</p> <p>3. SPT Masa PPh Pasal 22 April 2014 beserta bukti potong dan bukti setor atas pembelian kopi</p> <p>4. SPT Masa PPh Pasal 22 Mei 2014 beserta bukti potong dan bukti setor atas pembelian kopi</p> <p>5. SPT Masa PPh Pasal 22 Juni 2014 beserta bukti potong dan bukti setor atas pembelian kopi</p> <p>6. Bukti Pembayaran via transfer beserta lampiran</p> <p>7. Bukti pembayaran via cek</p>

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa CV. Lorin Jayaprima didirikan pada tanggal 15 Januari 2003 berdasarkan Akta Notaris Pauline Sinaga Nomor 01 tanggal 15 Januari 2003.
- Bahwa CV. Lorin Jayaprima terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia sejak tanggal 19 Februari 2003 dengan NPWP 02.199.633.6.121.000.
- Bahwa sesuai dengan Akta Notaris Pauline Sinaga Nomor 01 tanggal 15 Januari 2003 susunan pengurus CV. Lorin Jayaprima adalah, Direktur Dermawati Turnip, persero komanditer adalah Bonarsius Girsang yang juga suami dari Dermawati Turnip.
- Bahwa CV. Lorin Jayaprima beralamat di Jalan Flamboyan Dalam No.8 Tanjung Selamat, Medan Tuntungan. Kegiatan usaha dari perusahaan tersebut adalah usaha Penjualan Biji Kopi kepada PT. Indo Cafco dan PT. Olam Indonesia.



- Bahwa Dermawati Turnip sebagai Direktur CV. Lorin Jayaprima tahu soal teknis pembelian kopi dari PT. Indo Cafco.
- Bahwa Dermawati Turnip mengetahui sepanjang tahun 2011 s.d 2014 CV. Lorin Jayaprima melakukan penjualan kopi kepada PT. Indo Cafco.
- Bahwa sejak tanggal pendirian sampai tahun 2010 CV. Lorin Jayaprima masih menyampaikan SPT ke KPP terdaftar. SPT tersebut ditandatangani oleh Dermawati Turnip.
- Bahwa sepanjang tahun 2011 s.d 2014, CV. Lorin Jayaprima melakukan penjualan biji kopi kepada PT. Indo Cafco dan PT. Olam Indonesia. sebesar Rp.281.849.287.889 (dua ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa rincian penjualan biji kopi kepada PT Indo Cafco adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Quantity	PPh Pasal 22	Jumlah Pembelian Bruto
1	2011	1,767,633.30	243,480,860	97,392,338,746
2	2012	1,109,542.40	130,542,275	52,216,920,862
3	2013	1,106,104.50	92,153,548	36,861,405,937
4	2014	1,239,063.90	178,003,525	71,201,414,776
	JUMLAH	5,222,344.10	644,180,208	257,672,080,321

- Bahwa rincian penjualan biji kopi dengan PT Olam Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Quantity	PPh Pasal 22	Jumlah Pembelian Bruto
1	2013	1,538.916.780	3.856.934	1.542.773.714
2	2014	22.557,847.770	56.585.085	22.634.433.855
	J u m l a h			24.177.207.569

- Bahwa transaksi penjualan biji kopi tersebut diketahui dari bukti potong PPh Pasal 22 yang dilaporkan oleh PT. Indo Cafco dan PT. Olam Indonesia.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 s.d 2014 terjadi penjualan kopi dari CV. Lorin Jayaprima kepada PT. Indo Cafco dan PT. Olam Indonesia sebesar Rp.281.849.287.889 tetapi CV. Lorin Jayaprima **tidak pernah menyampaikan** SPT Tahunan PPh Badan tahun 2011 s,d 2014.
- Bahwa atas penjualan biji kopi tersebut telah di lakukan pemotongan PPh Pasal 22 oleh PT. Indo Cafco dan PT. Olam Indonesia.
- Bahwa Account Representatif (AR) KPP Pratama Medan Polonia sudah menyampaikan himbauan kepada CV. Lorin Jayaprima agar menyampaikan



SPT nya ke KPP Pratama Medan Polonia tetapi Wajib Pajak tetap tidak pernah menyampaikan SPT.

- Bahwa CV. Lorin Jaya Prima tidak pernah membuat pembukuan.
- Bahwa terdakwa membenarkan pihak dari KPP Medan Polonia telah beberapa kali memberitahukan terkait dengan kewajiban dari terdakwa yang tidak menyampaikan SPT selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa alasan terdakwa tidak menyampaikan SPT karena sudah janji dari PT. Indo Caftco yang akan membuatkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar : Pasal 39 Ayat (1) c Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang melanggar Pasal 39 Ayat (1) c Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan
3. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dihadapan hukum. Unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana perpajakan, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana berkenaan dengan perpajakan maka kepadanya harus diminta pertanggung jawabannya atas tindak pidana perpajakan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa **Dermawati Turnip** selaku direktur CV. Lorin Jayaprima yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Pauline Sinaga, S.H., M.Kn., Nomor 01 tanggal 15 Januari 2003 Tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Lorin Jayaprima dan terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia sejak tanggal 19 Februari 2003 dengan NPWP 02.199.633.6-121.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa **Dermawati Turnip** adalah adalah direktur CV. Lorin Jayaprima dengan NPWP 02.199.633.6-121.000 yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan menyampaikan Surat pemberitahuan aktivitas maupun kewajiban pajak dari CV. Lorin Jayaprima dan dihubungkan dengan kewajiban Terdakwa **Dermawati Turnip** pertanggungjawaban membuat dan melaporkan menyampaikan SPT pajak menjadi tanggungjawab Terdakwa **Dermawati Turnip**. Sehingga Terdakwa sebagai setiap orang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dan Pengusaha kena Pajak;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, bahwa Terdakwa dengan identitasnya tersebut di atas, telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memahami dan mengerti segala pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat hukum kepadanya, menjawab pertanyaan pertanyaan maupun mengenali barang bukti, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik atas keterangan saksi - saksi sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, sedangkan secara subyektif Terdakwa mempunyai latar belakang pendidikan setingkat Dipolma tiga dipandang telah memenuhi standar intelektual yang memadai untuk dapat mengerti dan memahami segala apa yang terjadi dan yang dilakukannya dengan aspek pertanggung jawaban, oleh karena itu Terdakwa **Dermawati Turnip** adalah orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad.2 Unsur “Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan”.

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik unsur ini mensyaratkan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan. Bahwa dalam hukum pidana menganut prinsip *Genn straf zonder schuld (no Punishment without fault)*, yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Bahwa orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pada diri pelaku terdapat unsur kesalahan. Kesalahan itu sendiri menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Kesalahan dalam hukum pidana ada dua bentuk yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Maka untuk dapat dipidanya seseorang atas perbuatan delik yang dituduhkan padanya, perumusan sederhana untuk menyatakan kesalahan seseorang terbukti oleh Scaffmeister dalam bukunya Hukum Pidana mengatakan bahwa pertama perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang dan selanjutnya dilihat perbuatan melawan hukumnya dan pencelaan terhadap perbuatan tersebut (**unsur kesalahan**) dan bila seluruh elemen tersebut terpenuhi, maka pada diri terdakwa dapat dipidana (Scaffmeister,2007:26).

Menimbang, bahwa apabila dalam rumusan delik unsur kesengajaan disebutkan secara *eksplisit*, maka menjadi kewajiban untuk dibuktikan kesalahan terdakwa dalam bentuk kesengajaan tersebut dalam persidangan (*Eddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum pidana 2014 :135*). Bahwa menurut Ahli hukum pidana yang dihadirkan dalam persidangan yaitu Dr. Mahmud Mulyadi, S.H, M.Hum., menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kesengajaan itu yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*), Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) dan Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheid Bewustzinj atau dolus eventualis*). Dimana menurut MVT untuk terpenuhinya unsur ‘dengan sengaja’ diperlukan waktu untuk berpikir dengan tenang, sudah cukup bagi pelaku untuk berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. Rumusan “Sengaja” dicantumkan dalam norma pidana baik dalam KUHP atau undang-undang lain yang bersifat khusus yang mengatur tentang pidana juga, misalnya Pasal 340 KUHP ‘Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dst...’. Dalam KUHP terdapat juga rumusan “Sengaja” yang telah tercakup dalam arti atau makna suatu kata. Artinya hal tersebut tidak mungkin dilakukan



tanpa sengaja, misalnya Pasal 167 KUHP “Barang siapa dengan paksa dan melawan hukum memasuki sebuah rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup”. Dalam Tuntutan ini kami lebih sependapat dengan pengertian kesengajaan seperti yang disebutkan dalam *memori van toelicting (MvT)* yang lazim disebut sebagai teori “pengetahuan”. Pengertian kesengajaan telah dijelaskan sebagai perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*will en witten*). Artinya seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan yang dilakukannya itu memang diketahuinya dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut memang dikehendakinya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dari keterangan saksi, surat, Ahli yang dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa CV. Lorin Jayaprima beralamat di Jalan Flamboyan Dalam No.8 Tanjung Selamat, Medan Tuntungan. Kegiatan usaha dari perusahaan tersebut adalah usaha Penjualan Biji Kopi kepada PT. Indo Cafce dan PT. Olam Indonesia.
- Bahwa Terdakwa Dermawati Turnip sebagai Direktur CV. Lorin Jayaprima tahu soal teknis pembelian kopi dari PT. Indo Cafco.
- Bahwa Terdakwa Dermawati Turnip mengetahui sepanjang tahun 2011 s.d 2014 CV. Lorin Jayaprima melakukan penjualan kopi kepada PT. Indo Cafce dan PT. Olam Indonesia.
- Bahwa sejak tanggal pendirian sampai tahun 2010 CV. Lorin Jayaprima masih menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP terdaftar. SPT tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Dermawati Turnip selaku direktur CV. Lorin Jayaprima.
- Bahwa sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, CV. Lorin Jayaprima melakukan penjualan biji kopi kepada PT. Indo Cafce dan PT. Olam Indonesia sebesar Rp 281.849.287.889 (dua ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa rincian penjualan biji kopi kepada PT. Indo Cafco adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Quantity	PPh Pasal 22	Jumlah Pembelian Bruto
1	2011	1,767,633.30	243,480,860	97,392,338,746
2	2012	1,109,542.40	130,542,275	52,216,920,862
3	2013	1,106,104.50	92,153,548	36,861,405,937
4	2014	1,239,063.90	178,003,525	71,201,414,776



JUMLAH	5,222,344.10	644,180,208	257,672,080,321
--------	--------------	-------------	-----------------

- Bahwa rincian penjualan biji kopi dengan PT Olam Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Quantity	PPh Pasal 22	Jumlah Pembelian Bruto
1	2013	1,538.916.780	3.856.934	1.542.773.714
2	2014	22.557,847.770	56.585.085	22.634.433.855
Jumlah				24.177.207.569

- Bahwa transaksi penjualan biji kopi tersebut diketahui dari bukti potong PPh Pasal 22 yang dilaporkan oleh PT. Indo Cafce dan PT. Olam Indonesia.

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terjadi penjualan kopi dari CV. Lorin Jayaprima kepada PT. Indo Cafce dan PT Olam Indonesia sebesar Rp 281.849.287.889 tetapi CV. Lorin Jayaprima **tidak pernah menyampaikan** SPT Tahunan PPh Badan tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

- Bahwa atas penjualan biji kopi tersebut telah di lakukan pemotongan PPh Pasal 22 oleh PT. Indo Cafce dan PT. Olam Indonesia.

- Bahwa *Account Representatif* (AR) KPP Pratama Medan Polonia sudah menyampaikan himbauan kepada CV. Lorin Jayaprima agar menyampaikan SPT nya ke KPP Pratama Medan Polonia tetapi Wajib Pajak tetap tidak pernah menyampaikan SPT diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Surat tugas Nomor :12569 tanggal 28 April 2015
2. Surat Tugas Nomor: 30073/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 08 Agustus 2017
3. S-12570/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Himbauan/Klarifikasi untuk melakukan penyetoran dan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 sd 2014
4. Surat Nomor : S-14414/WPJ.01/KP.0310/2015 tanggal 09 Juni 2015 perihal panggilan konseling
5. Surat Undangan Nomor : Und-14451/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 10 Juni 2015 perihal Undangan sosialisasi
6. Surat Nomor S-24839/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 21 September 2015 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
7. Surat Nomor S-289575/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal Desember 2015 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun pajak 2012
8. Surat Nomor S-27697/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Konfirmasi Bukti Potong PPh Pasal 22



9. Surat Nomor S-27698 tanggal 31 Juli 2017 perihal Konfirmasi Bukti Potong PPh Pasal 22
 10. Surat Nomor S-28964/WPJ.01/KP.03/2016 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Himbauan memanfaatkan Program Amnesty Pajak
 11. Surat Nomor S-12570/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 28 April 2015 perihal himbauan/Klarifikasi untuk melakukan penyeteroran dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 dan 2012.
 12. Surat Nomor S-13726/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal himbauan/Klarifikasi kedua untuk melakukan penyeteroran dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 dan 2014
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika pihak dari KPP Medan Polonia benar telah beberapa kali memberitahukan terkait dengan kewajiban dari Terdakwa Dermawati Turnip yang tidak menyampaikan SPT selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.
 - Bahwa alasan Terdakwa Dermawati Turnip tidak menyampaikan SPT adalah PT. Indo Cafco sudah janji yang akan membuatkan.
 - Bahwa CV. Lorin Jayaprima tidak pernah membuat pembukuan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap selama persidangan, dan dihubungkan dengan unsur dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tidak melaporkan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan cara sengaja. Karena Terdakwa telah mengetahui melalui himbuan dari KPP Pratama Medan Polonia dan Terdakwa tetap tidak mau memenuhi kewajibannya. Artinya pihak dari Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumut I melalui KPP Pratama Medan Polonia telah melaksanakan kewajiban untuk memenuhi syarat sebelum ditingkatkan ketahap penyidikan. Sebagaimana diketahui pidana dalam tindak pidana perpajakan bersifat *ultimum remedium*, upaya yang dilakukan agar Terdakwa mau membayar PPh Badan yang terutang dengan cara melaporkan Surat Pemberitahuan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kesengajaan Terdakwa tidak melaporkan Surat Pemberitahuan yang menjadi kewajiban dari CV. Lorin Jayaprima dimana Terdakwa selaku direktur telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berkedudukan sebagai direktur CV. Lorin Jayaprima dengan Nomor NPWP 02.199.633.6-121.000 memiliki kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), dalam Pasal 1 angka 8 menyebutkan pengertian dari Surat pemberitahuan sebagai berikut:

“Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”

Pasal 2 ayat (1) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 243/PMK.03/2014 menyebutkan :

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”

Dengan demikian unsur “*Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Undur “Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”.

Menimbang, bahwa pengertian dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dalam keterangan ahli hukum pidana yang dihadirkan dalam persidangan Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum., menerangkan makna kata “dapat” pada unsur “dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”, bahwa kerugian itu bisa bersifat nyata dan juga bisa bersifat potensi kerugian yang dapat dihitung. Ahli mengutip keterangan Adami Chazawi saat menjelaskan Unsur “dapat menimbulkan kerugian” pada Pasal 263 KUHP, yang menurut Adami Chazawi bahwa tidak penting bagi siapa kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian Surat palsu atau Surat yang dipalsu. Kemungkinan akan adanya kerugian berlaku bagi siapa saja. Siapapun orang berpeluang mengalami kerugian dan kemungkinan akan kerugian beserta macamnya kerugian itu

Halaman 87 dari 90 Putusan Pidana Nomor 1770/Pid.Sus/2023/PN Mdn



harus dibuktikan. (Adami Chazawi (2000). Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal. 106);

Menimbang, bahwa kerugian pada pendapatan negara berdasarkan keterangan Ahli perpajakan bernama Fatwa Furqana yang memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan menerangkan, bahwa berdasarkan bukti yang telah dilakukan penyitaan dan keterangan saksi saksi yang diperoleh selama proses penyidikan yang telah disampaikan kepada Ahli maka terdapat beberapa data yang tidak diketahui untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang seharusnya terutang dimana Wajib Pajak tidak bisa memperlihatkan pembukuan maupun bukti-bukti pendukung terkait kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa benar untuk menghitung kerugian pada pendapatan Negara, selanjutnya Ahli menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto berdasarkan Pasal 14 ayat (5) UU PPh dan KEP-02/PJ.7/1991 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto Bagi Wajib Pajak Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan Tetapi Tidak Menyelenggarakan sebagaimana mestinya. Bahwa dari Norma Penghitungan Penghasilan Netto dihubungkan dengan jenis usaha CV. Lorin Jayaprima yang diklasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Nomor 6231 Perdagangan eceran hasil industri (bahan) makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau dengan besaran Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar 10,5%;

Menimbang, bahwa dari besaran peredaran bruto yang dijadikan dasar untuk menghitung kerugian pada pendapatan negara dalam kasus ini adalah jumlah penghasilan CV. Lorin Jayaprima berdasarkan dokumen bukti pemungutan PPh Pasal 22 Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 akibat perbuatan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, kerugian pada pendapatan negara dihitung sebagai berikut:

	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Peredaran Bruto					
Penjualan Kopi ke PT Indo Cefco	97.392.338.746	52.216.920.862	36.861.405.937	71.201.414.775	257.672.080.320
Penjualan Kopi ke PT Olam Indonesia			1.542.773.714	22.634.433.855	24.177.207.569
Jumlah Penjualan	97.392.338.746	52.216.920.862	38.404.179.651	93.835.848.630	281.849.287.889
Norma Penghitungan Penghasilan Netto	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%	10,5%
Penghasilan Kena Pajak	10.226.195.000	5.482.776.000	4.032.438.000	9.852.764.000	29.594.173.000
Pajak Penghasilan Terutang	2.556.548.750	1.370.694.000	945.109.513	2.463.191.000	7.335.543.263
Kredit Pajak:					
PPh Pasal 22 dipungut oleh PT Indo Cefco	243.460.860	130.542.275	92.153.548	178.003.525	644.160.208
PPh Pasal 22 dipungut oleh PT Olam Indonesia			3.856.934	56.586.085	60.443.019
Jumlah Kredit Pajak	243.460.860	130.542.275	96.010.482	234.589.610	704.603.227
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	2.313.087.890	1.240.151.725	849.099.031	2.228.601.390	6.630.940.036

Halaman 88 dari 90 Putusan Pidana Nomor 1770/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa dengan demikian nilai kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan CV. Lorin Jayaprima tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 6.630.940.036,- (enam milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga puluh enam rupiah). Dengan demikian unsur dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam ilmu hukum pidana disebut dengan istilah perbarengan perbuatan pidana. Ketentuan yang diatur dalam perbarengan perbuatan pidana ini bukanlah menjadi unsur dari tindak pidana melainkan ajaran umum tentang maksimal ancaman pidana dalam hal terjadi perbarengan tadi;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP Pidana disebut sebagai perbarengan beberapa perbuatan pidana berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Bahwa ukuran untuk menentukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut terletak pada satu kehendak atau niat yang sama untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud oleh ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tersebut selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut sebagai bentuk perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum selama persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan keterangan Ahli serta barang bukti yang diperlihatkan selam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana berupa sengaja dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan;



Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah pula terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu tidak sekali saja, melainkan telah melakukan beberapa perbuatan pidana berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Bahwa perbuatan tersebut telah dimulai terdakwa sejak masa pajak antara bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2011, bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2012, bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2013, bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti perbuatan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan niat yang sama secara berlanjut, yaitu tidak menyampaikan surat pemberitahuan yang merupakan kewajiban dari terdakwa selaku direktur CV. Lorin Jayaprima dengan NPWP 02.199.633.6-121.000 yang telah melakukan transaksi penjualan kopi dalam kurun waktu tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 dengan lawan transaksi PT. Indo Cafco dan PT. Olam Indonesia. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 Ayat (1) c Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka secara mutatis mutandis alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah harus dibebaskan dari dakwaan, tidaklah beralasan hukum sehingga dengan demikian Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

A01	Fotokopi Akte Notaris Pauline Sinaga, SH, MKN Nomor 01 tanggal 15 Januari 2003 Tentang Pendirian Perseroan Komanditer C.V. LORIN JAYAPRIMA.
A02	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak 02 sd 09 tahun 2011 dan Masa Pajak 11 sd 12 tahun 20112. Satu set surat tugas No.12569 tanggal 28 April 2015 dilampiri :3. Laporan pelaksanaan visit No.104/WPJ.01/KP.0301/2015 tanggal 12 Juni 2015.4. Surat Tugas No.30073/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 08 Agustus 2017 no. Laporan Visit No.1275/WPJ.01/KP.03010/2017 tanggal 11 September 2017.5. Surat tugas ST-1336/WPJ.01/KP.03/2021 tanggal 30 September 2021 dengan laporan visit LPK-4/WPJ.01/KP.0307/2021 tanggal 04 Oktober 2021.6. S-12570/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Himbaiaun/Klarifikasi untuk melakukan penyetoran dan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 sd 2014.7. S-14414/WPJ.01/KP.0310/2015 tanggal 09 Juni 2015 perihal panggilan konseling8. Und-14451/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 10 Juni 2015 perihal Undangan sosialisasi.9. S-24839/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 21 September 2015 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.10. S-289575/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal Desember 2015 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun pajak 2012.11. S-27697/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Konfirmasi Bukti Potong PPh Pasal 2212. S-27698 tanggal 31 Juli 2017 perihal Konfirmasi Bukti Potong PPh Pasal 22.13. S-2413/WPJ.01/KP.0703/2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal jawaban konfirmasi Bukti potong PPh Pasal 22 a.n CV LORIN JAYAPRIMA.14. S-29948/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 03 Agustus 2017 perihal Permintaan laporan Audit KAP tahun buku 2011.15. S-29949/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 03 Agustus 2017 perihal Permintaan laporan Audit KAP tahun buku 201216. S-28964/WPJ.01/KP.03/2016 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Himbauan memanfaatkan Program Amnesty Pajak17. S-12570/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 28 April 2015 perihal himbauan/Klarifikasi untuk melakukan penyetoran dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun



	<p>2011 dan 2012.</p> <p>18. S-13726/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal himbauan/Klarifikasi kedua untuk melakukan penyeteroran dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 dan 2014.</p> <p>19. SR-28850/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 30 November 2015 perihal permintaan Laporan Audt KAP tahun 2012.</p> <p>20. BA Permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan kepada Wajib Pajak CV LJP melalui telpon.</p> <p>21. LPAD No.PEM:01009688\121\aug\2017 tanggal 14 Aug-17 Surat lain-lain dari Akuntan Publik (KAP) JOACHIM POLTAK LIAN & REKAN berupa laporan Auditor Independen atas lap.Keuangan CV LORIN JAYAPRIMA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011.</p> <p>22. S-29941/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 03 Agustus 2017 perihal Permintaan Daftar laporan Jasa Audit KAP</p> <p>23. S-983/PPPK/2017 tanggal 11 Agustus 2017 perihal Jawaban permintaan Daftar laporan Jasa Audit KAP</p> <p>24. Kronologis IDLP CV LORIN JAYAPRIMA.</p> <p>25. SR-2943/WPJ.01/KP.03/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal usulan IDLP</p>
A03	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Januari sd Desember 2011 2. Prin out Laporan SPT Masa Wajib Pajak tahun 2011 3. SPT Masa PPN Nihil Masa Januari 2011 sd Desember 2011 4. Satu Set Laporan kemajuan pemeriksaan Wajib pajak CV LJP No.LAP-027/PL/WPJ.01/KP.0305/2018 tanggal 27 Desember 2018 tahun pajak 2013 5. Satu set surat ketetapan pajak NIHIL PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 6. Satu Set surat tagihan pajak PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 senilai Rp.100.000,- 7. Satu set surat ketetapan pajak NIHIL PPh Pasal 21 Masa Januari sd Desember 2014 8. Satu Set surat tagihan pajak PPh Pasal 21 Masa Januari sd Desember 2014 senilai Rp.1.200.000,- 9. Satu Set Laporan kemajuan pemeriksaan Wajib pajak CV LJP No.LAP-028/PL/WPJ.01/KP.0305/2018 tanggal 27 Desember 2018 tahun pajak 2014 10. Akte pendirian CV LORIN JAYAPRIMA No.01 tanggal 15 Januari 2003 dari Notaris PAULINE SINAGA
A04	<ol style="list-style-type: none"> 1. Installment Schedule agreement no : 0015138/2/02/02/2011 2. Installment Schedule agreement no :0017406/2/02/04/2012 3. Surat kuasa dari Ricard Nikson Pakpahan kepada Rio Leonardo tanggal 11 November 2021 4. Foto kopi KTP a.n DERMAWATI TURNIP 5. Foto Kopi Permohonan fasillitas pembiayaan konsumen a.n DERMAWATI TURNIP tanggal 20 April 2012 6. Foto Kopi Dokumen perjanjian pembiayaan konsumen No.0017406/2/02/04/2012 tanggal 20 April 2012 7. Foto Kopi surat pesanan barang berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen no.0017406/2/02/04/2012 tanggal 20 April 2012 8. Foto Kopi tanda terima barang berdsarkan perjanjian pembiayaan konsumen no.0017406/2/02/04/2012 tanggal 20 April 2012. 9. Foto Copy Tanda terima tanggal 28 Maret 2013 dari PT DSF kepad DERMAWATI TURNIP dengan lampiran foto kopi BPKB faktur dan kuitansi pembelian. 10. Foto kopi delivery order No.21204028 tanggal 21 April 2012 dari PT Ratu Mobil Sejadag kepada PT Dipo Star Finance yang diterima oleh DERMAWATI TURNIP. 11. Kartu Keluarga a.n BONARSIUS GIRSANG 12. Formulir Latar Belakang Analisa dan Rekomnedasi a.n Dermawati Turnip 13. Rekening koran a.n CV LORIN JAYAPRIMA No.Rek 0154627505 Bank BNI Cabang USU Medan sebanyak 8 lembar
A05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) set Fotokopi dokumen pembukaan rekening nasabah atas nama CV LORIN JAYAPRIMA nomor rekening 6666666695. 2. 1 (satu) set Print Out Rekening Koran atas nama CV LORIN JAYAPRIMA nomor



	<p>rekening 0154627504 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014.</p> <p>3. 1 (satu) set Print Out Rekening Koran atas nama CV LORIN JAYAPRIMA nomor rekening 0301708002 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014.</p> <p>4. 1 (satu) set Print Out Rekening Koran atas nama CV LORIN JAYAPRIMA nomor rekening 0236789915 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014</p> <p>5. 1 (satu) set Print Out Rekening Koran atas nama CV LORIN JAYAPRIMA nomor rekening 0236799876 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014</p> <p>6. 1 (satu) Set Fotokopi Surat Keputusan Kredit Nomor MDC/2/0999/R</p> <p>7. 1 (satu) set Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 2011.269.MDC</p> <p>8. 1 (satu) set Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 2012.156.MDC</p> <p>9. 1 (satu) set Fotokopi Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2012.156.MDC</p> <p>10. 1 (satu) Set Fotokopi Surat Keputusan Kredit Nomor MDC/2/0425/R.</p>
A06	<p>1. Dokumen pembukaan rekening nasabah atas nama BONARSIUS GIRSANG nomor rekening 2027218888.</p> <p>2. Dokumen pembukaan rekening nasabah atas nama DERMAWATI TURNIP nomor rekening 0227144128</p> <p>3. Rekening Koran atas nama BONARSIUS GIRSANG nomor rekening 2027218888 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014.</p> <p>4. Rekening Koran atas nama DERMAWATI TURNIP nomor rekening 0227144128 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014.</p> <p>5. Rekening Koran atas nama BONARSIUS GIRSANG nomor rekening 2027218888 Periode 01/01/2022 s.d. 31/01/2022</p> <p>6. Rekening Koran atas nama DERMAWATI TURNIP nomor rekening 0227144128 Periode 01/01/2022 s.d. 31/01/2022</p>
A07	<p>1. 3 Box Dokumen Pembelian PT INDO CAFCO dari CV LORIN JAYAPRIMA Tahun 2011, 2013, dan 2014</p> <p>2. 1 Box Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan PT INDO CAFCO kepada CV LORIN JAYAPRIMA Tahun 2011 s.d. 2014.</p> <p>3. 4 Set Rekening koran Rabobank nomor 5600001002 a.n. PT INDO CAFCO sebagai bukti pembayaran ke CV LORIN JAYAPRIMA</p>
A08	<p>1. Dokumen pembelian kopi oleh PT Olam Indonesia dari CV Lorin Jayaprime tahun 2013 sebanyak 6 set bukti pembelian beserta kelengkapannya</p> <p>2. Dokumen pembelian kopi oleh PT Olam Indonesia dari CV Lorin Jayaprime tahun 2014 masa :</p> <p>a. April sebanyak 31 Set</p> <p>b. Mei sebanyak 2 Set</p> <p>c. Juni sebanyak 7 Set</p> <p>3. SPT Masa PPh Pasal 22 April 2014 beserta bukti potong dan bukti setor atas pembelian kopi</p> <p>4. SPT Masa PPh Pasal 22 Mei 2014 beserta bukti potong dan bukti setor atas pembelian kopi</p> <p>5. SPT Masa PPh Pasal 22 Juni 2014 beserta bukti potong dan bukti setor atas pembelian kopi</p> <p>6. Bukti Pembayaran via transfer beserta lampiran</p> <p>7. Bukti pembayaran via cek</p>

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah meningkatkan pemasukan dari sektor pajak sejumlah Rp.6.630.940.036,- (enam milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga puluh enam rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) c Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dermawati Turnip** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah dua kali pajak terhutang yang tidak disetor yaitu **2 x Rp6.630.940.036,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga puluh enam rupiah) menjadi Rp13.261.880.072.00 (tiga belas milyar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh puluh dua rupiah)**, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan



memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

A01	Fotokopi Akte Notaris Pauline Sinaga, SH, MKN Nomor 01 tanggal 15 Januari 2003 Tentang Pendirian Perseroan Komanditer C.V. LORIN JAYAPRIMA.
A02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak 02 sd 09 tahun 2011 dan Masa Pajak 11 sd 12 tahun 2011 2. Satu set surat tugas No.12569 tanggal 28 April 2015 dilampiri : 3. Laporan pelaksanaan visit No.104/WPJ.01/KP.0301/2015 tanggal 12 Juni 2015. 4. Surat Tugas No.30073/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 08 Agustus 2017 no. Laporan Visit No.1275/WPJ.01/KP.03010/2017 tanggal 11 September 2017. 5. Surat tugas ST-1336/WPJ.01/KP.03/2021 tanggal 30 September 2021 dengan laporan visit LPK-4/WPJ.01/KP.0307/2021 tanggal 04 Oktober 2021. 6. S-12570/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Himbaiaun/Klarifikasi untuk melakukan penyetoran dan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 sd 2014. 7. S-14414/WPJ.01/KP.0310/2015 tanggal 09 Juni 2015 peihal panggilan konseling 8. Und-14451/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 10 Juni 2015 perihal Undangan sosialisasi. 9. S-24839/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 21 September 2015 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. 10. S-289575/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal Desember 2015 perihal permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun pajak 2012. 11. S-27697/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Konfirmasi Bukti Potong PPh Pasal 22 12. S-27698 tanggal 31 Juli 2017 perihal Konfirmasi Bukti Potong PPh Pasal 22. 13. S-2413/WPJ.01/KP.0703/2017 tanggal 22 Agustus 2017 perihal jawaban konfirmasi Bukti potong PPh Pasal 22 a.n CV LORIN JAYAPRIMA. 14. S-29948/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 03 Agustus 2017 perihal Permintaan laporan Audit KAP tahun buku 2011. 15. S-29949/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 03 Agustus 2017 perihal Permintaan laporan Audit KAP tahun buku 2012 16. S-28964/WPJ.01/KP.03/2016 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Himbauan memanfaatkan Program Amnesty Pajak 17. S-12570/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 28 April 2015 perihal himbauan/Klarifikasi untuk melakukan penyetoran dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 dan 2012. 18. S-13726/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal himbauan/Klarifikasi kedua untuk melakukan penyetoran dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2011 dan 2014. 19. SR-28850/WPJ.01/KP.03/2015 tanggal 30 November 2015 perihal permintaan Laporan Audt KAP tahun 2012. 20. BA Permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan kepada Wajib Pajak CV LJP melalui telpon. 21. LPAD No.PEM:01009688\121\aug\2017 tanggal 14 Aug-17 Surat lain-lain dari Akuntan Publik (KAP) JOACHIM POLTAK LIAN & REKAN berupa laporan Auditor Independen atas lap.Keuangan CV LORIN JAYAPRIMA untuk tahun yang berakhir



	<p>31 Desember 2011.</p> <p>22. S-29941/WPJ.01/KP.03/2017 tanggal 03 Agustus 2017 perihal Permintaan Daftar laporan Jasa Audit KAP</p> <p>23. S-983/PPPK/2017 tanggal 11 Agustus 2017 perihal Jawaban permintaan Daftar laporan Jasa Audit KAP</p> <p>24. Kronologis IDLP CV LORIN JAYAPRIMA.</p> <p>25. SR-2943/WPJ.01/KP.03/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal usulan IDLP</p>
A03	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Januari sd Desember 2011 2. Prin out Laporan SPT Masa Wajib Pajak tahun 2011 3. SPT Masa PPN Nihil Masa Januari 2011 sd Desember 2011 4. Satu Set Laporan kemajuan pemeriksaan Wajib pajak CV LJP No.LAP-027/PL/WPJ.01/KP.0305/2018 tanggal 27 Desember 2018 tahun pajak 2013 5. Satu set surat ketetapan pajak NIHIL PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 6. Satu Set surat tagihan pajak PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 senilai Rp.100.000,- 7. Satu set surat ketetapan pajak NIHIL PPh Pasal 21 Masa Januari sd Desember 2014 8. Satu Set surat tagihan pajak PPh Pasal 21 Masa Januari sd Desember 2014 senilai Rp.1.200.000,- 9. Satu Set Laporan kemajuan pemeriksaan Wajib pajak CV LJP No.LAP-028/PL/WPJ.01/KP.0305/2018 tanggal 27 Desember 2018 tahun pajak 2014 10. Akte pendirian CV LORIN JAYAPRIMA No.01 tanggal 15 Januari 2003 dari Notaris PAULINE SINAGA
A04	<ol style="list-style-type: none"> 1. Installment Schedule agreement no : 0015138/2/02/02/2011 2. Installment Schedule agreement no :0017406/2/02/04/2012 3. Surat kuasa dari Ricard Nikson Pakpahan kepada Rio Leonardo tanggal 11 November 2021 4. Foto kopi KTP a.n DERMAWATI TURNIP 5. Foto Kopi Permohonan fasillitas pembiayaan konsumen a.n DERMAWATI TURNIP tanggal 20 April 2012 6. Foto Kopi Dokumen perjanjian pembiayaan konsumen No.0017406/2/02/04/2012 tanggal 20 April 2012 7. Foto Kopi surat pesanan barang berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen no.0017406/2/02/04/2012 tanggal 20 April 2012 8. Foto Kopi tanda terima barang berdsarkan perjanjian pembiayaan konsumen no.0017406/2/02/04/2012 tanggal 20 April 2012. 9. Foto Copy Tanda terima tanggal 28 Maret 2013 dari PT DSF kepad DERMAWATI TURNIP dengan lampiran foto kopi BPKB faktur dan kuitansi pembelian. 10. Foto kopi delivery order No.21204028 tanggal 21 April 2012 dari PT Ratu Mobil Sejagad kepada PT Dipo Star Finance yang diterima oleh DERMAWATI TURNIP 11. Kartu Keluarga a.n BONARSIUS GIRSANG 12. Formulir Latar Belakang Analisa dan Rekomnedasi a,n Dermawati Turnip 13. Rekening koran a,n CV LORIN JAYAPRIMA No.Rek 0154627505 Bank BNI Cabang USU Medan sebanyak 8 lembar
A05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) set Fotokopi dokumen pembukaan rekening nasabah atas nama CV LORIN JAYAPRIMA nomor rekening 6666666695. 2. 1 (satu) set Print Out Rekening Koran atas nama CV LORIN JAYAPRIMA nomor rekening 0154627504 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014. 3. 1 (satu) set Print Out Rekening Koran atas nama CV LORIN JAYAPRIMA nomor rekening 0301708002 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014. 4. 1 (satu) set Print Out Rekening Koran atas nama CV LORIN JAYAPRIMA nomor rekening 0236789915 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014 5. 1 (satu) set Print Out Rekening Koran atas nama CV LORIN JAYAPRIMA nomor rekening 0236799876 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014 6. 1 (satu) Set Fotokopi Surat Keputusan Kredit Nomor MDC/2/0999/R 7. 1 (satu) set Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 2011.269.MDC 8. 1 (satu) set Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 2012.156.MDC 9. 1 (satu) set Fotokopi Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1)



	2012.156.MDC 10. 1 (satu) Set Fotokopi Surat Keputusan Kredit Nomor MDC/2/0425/R.
A06	1. Dokumen pembukaan rekening nasabah atas nama BONARSIUS GIRSANG nomor rekening 2027218888. 2. Dokumen pembukaan rekening nasabah atas nama DERMAWATI TURNIP nomor rekening 0227144128 3. Rekening Koran atas nama BONARSIUS GIRSANG nomor rekening 2027218888 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014. 4. Rekening Koran atas nama DERMAWATI TURNIP nomor rekening 0227144128 Periode 01/01/2011 s.d. 31/12/2014. 5. Rekening Koran atas nama BONARSIUS GIRSANG nomor rekening 2027218888 Periode 01/01/2022 s.d. 31/01/2022 6. Rekening Koran atas nama DERMAWATI TURNIP nomor rekening 0227144128 Periode 01/01/2022 s.d. 31/01/2022
A07	1. 3 Box Dokumen Pembelian PT INDO CAFCO dari CV LORIN JAYAPRIMA Tahun 2011, 2013, dan 2014 2. 1 Box Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan PT INDO CAFCO kepada CV LORIN JAYAPRIMA Tahun 2011 s.d. 2014. 3. 4 Set Rekening koran Rabobank nomor 5600001002 a.n. PT INDO CAFCO sebagai bukti pembayaran ke CV LORIN JAYAPRIMA
A08	1. Dokumen pembelian kopi oleh PT Olam Indonesia dari CV Lorin Jayaprime tahun 2013 sebanyak 6 set bukti pembelian beserta kelengkapannya 2. Dokumen pembelian kopi oleh PT Olam Indonesia dari CV Lorin Jayaprime tahun 2014 masa : a. April sebanyak 31 Set b. Mei sebanyak 2 Set c. Juni sebanyak 7 Set 3. SPT Masa PPh Pasal 22 April 2014 beserta bukti potong dan bukti setor atas pembelian kopi 4. SPT Masa PPh Pasal 22 Mei 2014 beserta bukti potong dan bukti setor atas pembelian kopi 5. SPT Masa PPh Pasal 22 Juni 2014 beserta bukti potong dan bukti setor atas pembelian kopi 6. Bukti Pembayaran via transfer beserta lampiran 7. Bukti pembayaran via cek

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 20 November 2023, oleh : Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Philip M. Soentpiet, S.H., dan Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Romadona, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Dr. Hendri Edison, S.H, M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Philip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.